



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. H. Longki Djanggola, M.Si
Gubernur Sulawesi Tengah



H. Rusli Dg. Palabbi, SH, MH
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

LPPD

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020**




GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinNya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 beserta Indikator Kinerja Kunci dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang memuat hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian SPM dan LAKIP yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah pada tahun 2020. Dalam laporan ini juga disampaikan capaian kinerja pada setiap urusan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan LPPD tahun 2020.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**
Drs. H. LONGKINDJANGGOLA, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	I-1
1.1.1	Penjelasan Umum	I-2
1.1.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	I-11
1.1.3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-55

BAB II

CAPAIAN	KINERJA	PENYELENGGARAAN	II-1
----------------	----------------	------------------------	------

PEMERINTAHAN DAERAH

2.1	Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-1
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-1
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-2
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-2
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-2

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	III-1
PEMBANTUAN	

3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi	III-9
3.1.1	Target Kinerja	
3.1.2	Realisasi	
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/kota	
3.2.1	Target Kinerja	
3.2.2	Realisasi	
3.3	Permasalahan	III-21
3.4	Saran dan Tindak Lanjut	III-21

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR	IV-1
---	------

PELAYANAN MINIMAL

4.1	Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2	Target Pencapaian Standar	IV-1

Pelayanan Minimal		
4.1.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi	IV-2
4.1.4 Dukungan Personil	IV- 6
4.1.5 Permasalahan dan Solusi	IV- 11
4.2 Urusan Kesehatan	IV-12
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	IV-18
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	IV-24
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-24
4.6 Urusan Sosial	IV-34
4.7 Program dan Kegiatan	IV- 54
BAB V	V-1
PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia Indonesia sebagaimana tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan usaha dan kerja sama yang serasi, selaras dan seimbang antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah konsekuensi penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- 2) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berpijak pada peraturan perundang-undangan di atas, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu perwujudan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral kepada Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan *progress report* terhadap laporan pelaksanaan tugas dan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini secara garis besar menggambarkan aspek-aspek berikut ini :

1. Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah, serta Data Umum Daerah;
2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
4. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
5. Penutup;

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – undang Pembentukan Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang meliputi empat wilayah kabupaten yaitu: Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Pada tahun 1994 dibentuklah Kotamadya Palu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dalam perkembangannya selama kurang lebih tiga puluh lima tahun, tepatnya sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1999, terjadi suatu perubahan yang ditandai dengan era Reformasi sebagai konsekuensi perubahan tatanan politik bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah maka diterbitkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian maka hingga akhir 2018 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari 175 Kecamatan serta 1845 Desa dan 175 Kelurahan.

b. Data Geografis Wilayah**❖ Batas Administrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat.

❖ Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.841,29 km². Sementara untuk wilayah Perairan Laut seluas 193.923,75 km², dan secara geografis Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2022' Lintang Utara dan 3048' Lintang Selatan serta 119022 dan 124022' Bujur Timur.

❖ Topografis.

Dilihat dari letak wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan daratan tinggi serta daratan rendah yang terdapat di daratan, lembah dan berada di daerah pantai. Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sbb :

- Daratan rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan laut sekitar 20,20 persen.
- Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen,
- Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.
- Wilayah dengan ketinggian diatas 1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,33 persen.

Demikian juga dengan tingkat kemiringan lahan, yakni:

- Kemiringan 0-2 derajat sekitar 13,00 persen.
- Kemiringan 2,1-15 derajat sekitar 1,00 persen.
- Kemiringan 15,1-40 derajat sekitar 16,10 persen.

- Kemiringan diatas 40,1 derajat sekitar 50,60 persen.
- Pulau-pulau kecil (belum terdata) sekitar 19,30 persen.

Sulawesi Tengah adalah salah satu Provinsi di Pulau Sulawesi yang mempunyai kekayaan alam yang cukup beragam, kandungan mineral, air dan segala isinya, flora dan fauna yang beraneka ragam. Kawasan lindung di Sulawesi Tengah dengan proporsi 35,55% dari luas total wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, daerah kawasan lindung ini menyebar merata diseluruh wilayah Sulawesi Tengah. Jenis kawasan lindung di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kriteria kawasan lindung terdiri dari :

- ❖ Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, meliputi :
 - Kawasan hutan lindung
 - Kawasan resapan air
- ❖ Kawasan Perlindungan setempat, meliputi :
 - Sempadan Pantai
 - Sempadan Sungai
 - Kawasan sekitar danau
 - Kawasan sekitar mata air.
- ❖ Kawasan suaka alam, meliputi :
 - Kawasan cagar alam
 - Kawasan suaka marga satwa.
- ❖ Kawasan pelestarian alam, meliputi :
 - Kawasan Taman Nasional
 - Kawasan Taman Hutan Rakyat
 - Taman Wisata Alam.
- ❖ Kawasan Cagar Budaya
- ❖ Kawasan rawan Bencana Alam.
- ❖ Kawasan lindung lainnya meliputi :
 - Kawasan taman baru
 - Kawasan Pantai berhutan bakau.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta penerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada lokasi tertentu, sehingga menyebabkan pola penyebaran tidak merata. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya ditemukan di wilayah perkotaan, karena merupakan sentra aktivitas ekonomi.

No	Kabupaten / Kota	Jumlah			Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah KK	Laki Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Ket
		Kecamatan	Kelurahan	Desa						
1	Banggai	23	46	291	9.672,70	117.690	188.361	180.861	369.222	
2	P o s o	19	28	142	7.112,25	77.244	128.361	120.239	248.600	
3	Donggala	16	9	158	4.275,08	92.553	156.874	147.684	304.558	
4	Tolitoli	10	6	103	4.079,77	70.238	112.329	108.082	220.411	
5	B u o l	11	7	108	4.043,57	41.595	75.642	71.932	147.556	
6	Morowali	9	7	126	3.037,04	62.830	87.010	71.500	158.510	
7	Banggai Kepulauan	12	3	141	2.488,79	39.082	62.874	60.960	123.834	
8	Parigi Moutong	23	5	278	5.089,91	130.885	231.405	219.784	451.189	
9	Tojo Una Una	12	12	134	5.721,15	50.897	84.854	80.720	165.574	
10	S i g i	15	0	176	5.196,02	83.245	130.279	123.635	253.914	
11	Banggai Laut	7	3	63	725,67	21.438	36.320	35.740	72.060	
12	Morowali Utara	10	3	122	10.004,28	39.817	65.133	58.403	123.536	
13	Kota Palu	8	46	0	395,06	116.804	187.025	185.088	372.113	
Total		175	175	1.842	61.841,29	944.318	1.546.449	1.464.628	3.011.077	

Sumber Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

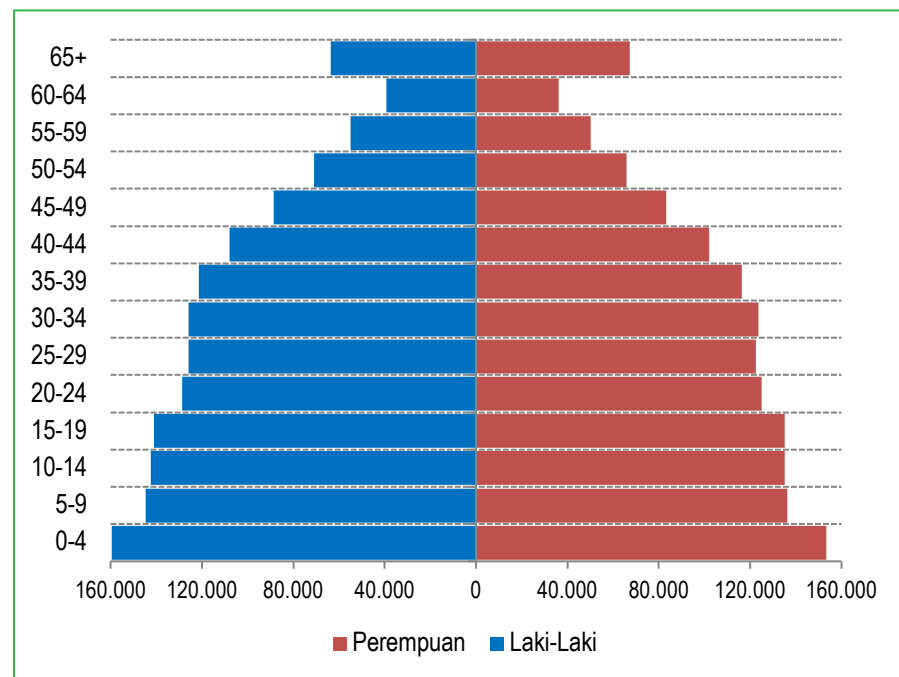
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota

Tabel I. 1

Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kabupaten / Kota Dan Jenis Kelamin Dilengkapi Dengan Jumlah Kecamatan Dan Desa / Kelurahan Tahun 2020

Berdasarkan hasil rekapitulasi data kependudukan pada tahun 2020 berjumlah 3.011.077 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.546.449 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.464.628 jiwa, sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yakni 48 Jiwa/Km² pada tahun 2020.

Gambar I. 1
Piramida Penduduk Sulawesi Tengah 2020



Ditinjau dari sebaran penduduk, pada tahun 2020 penduduk di Sulawesi Tengah didominasi oleh kelompok usia muda. Hal ini dapat dilihat dari bentuk piramida penduduk Sulawesi Tengah 2020 yang berbentuk Piramida Penduduk Muda (*Expansive*) (Gambar 1.1). Adapun kelompok usia dengan jumlah tertinggi yaitu kelompok balita (0-4 tahun) yang sebanyak 299.228 jiwa dan jumlah terbanyak berikutnya yaitu kelompok-kelompok usia di atasnya. Sementara itu untuk usia produktif, kelompok penduduk dengan jumlah paling sedikit yaitu kelompok usia 60-64 tahun sebanyak 95.988 jiwa.

F. Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH (Rp)		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	4.106.116.585.244,95	3.657.307.595.379,07	87,48
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.054.606.448.582,08	1.122.773.786.838,07	100,94
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	850.700.000.000,00	914.780.331.698,60	107,53
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.167.996.775,00	14.690.106.655,58	111,56
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.380.692.073,00	21.914.954.430,00	97,92
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	168.357.759.734,08	171.388.394.053,89	67,19
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.006.594.138.193,87	2.494.501.944.224,00	82,74
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	190.400.930.611,87	275.921.110.604,00	144,92
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.492.182.666.000,00	1.488.847.818.000,00	99,78
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.324.010.541.582,00	729.733.015.620,00	54,59
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	44.915.998.469,00	40.031.864.317,00	89,13
1.3.1	Pendapatan Hibah	19.306.293.943,00	14.422.159.791,00	74,70
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	24.928.624.000,00	24.928.624.000,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	681.080.526,00	681.080.526,00	100,00
2	BELANJA	4.536.056.241.044,55	3.745.034.267.890,90	81,16
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.737.675.267.394,51	2.031.402.508.275,00	74,20
2.1.1	Belanja Pegawai	1.314.077.128.291,30	1.207.722.955.628,00	91,91
2.1.4	Belanja Hibah	918.079.152.823,40	349.346.000.000,00	38,05
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.479.500.000,00	1.191.500.000,00	80,53
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	443.270.948.483,00	427.382.228.304,00	96,42

2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	43.275.206.500,00	43.259.243.030,00	99,96
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	17.493.331.296,81	2.500.581.313,00	14,30
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.798.380.973.650,04	1.713.631.759.615,90	91,75
2.2.1	Belanja Pegawai	118.517.780.786,00	140.772.607.601,00	94,11
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	971.561.127.504,06	907.419.260.623,95	89,67
2.2.3	Belanja Modal	708.302.065.359,98	665.439.891.390,95	94,21

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Target Pendapatan sebesar Rp 4.106.116.585.244.95 dengan Realisasi Pendapatan Daerah (anggaran setelah perubahan) sampai dengan tanggal 1 Januari Tahun 2020 sebesar Rp 3.657.307.595.379,07 atau 89.07% dengan rincian capaian kinerja pendapatan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.122.773.786.838,07 atau 106,46% dari Target sebesar Rp. 1.054.606.448.582.08 Dengan rincian :
 - Pendapatan Pajak Daerah Target Rp.850.700.000.000 Realisasi sebesar Rp. 914.780.331.698.60 atau 107,53 %
 - Pendapatan Retribusi Daerah Target Rp. 13.167.996.775 Realisasi sebesar Rp. 14.690.106.655.58 atau 111,56%
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Target Rp. 22.380.692.073 Realisasi sebesar Rp. 21.914.954.430 atau 97.92 %
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Target Rp. 168.357.759.734,08 Realisasi sebesar Rp. 171.388.394.053,89 atau 101,80 %
- b. Dana Perimbangan Target Sebesar Rp. 3.006.594.138.193,87 Realisasi sebesar Rp. 2.494.501.944.224 atau 82,74% dengan rincian :
 - Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Target Rp. 190.400.930.611,87 Realisasi sebesar Rp. 275.921.110.604 atau 144,92%

- Dana Alokasi Umum Target Rp. 1.492.182.666.000 Realisasi sebesar Rp. 1.488.847.818.000 atau 99,78%
 - Dana Alokasi Khusus Target Rp. 1.324.010.541.582 Realisasi sebesar Rp. 729.733.015.620 atau 55,12%
- c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Target Rp. 44.915.998.469 Realisasi sebesar Rp. 40.031.864.317 atau 89,13 % dengan rincian sebagai berikut :
- Pendapatan Hibah Target Rp. 19.306.293.943 Realisasi sebesar Rp. 14.422.159.791 atau 74,70 %
 - Dana Penyesuaian Dan Otonomi Daerah Target Rp. 24.928.624.000 Realisasi sebesar Rp. 24.928.624.000 atau 100 %
 - Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemda Lainnya target Rp. 681.080.526 Realisasi sebesar Rp. 681.080.526 atau 100 %.

Dalam Struktur Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Target Belanja dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.745.034.267.890,90 atau 82,56% dari target Rp. 4.536.056.241.044,55 dengan rincian kinerja belanja sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung target Rp. 2.737.675.267.394,55 realisasi sebesar Rp. 2.031.402.508.275 atau 74,20 %
- Belanja Pegawai target Rp. 1.314.077.128.291,30 realisasi Rp. 1.207.722.955.628 atau 91,91 %
 - Belanja Hibah Target Rp. 918.079.152.823,40 realisasi Rp. 349.346.000.000 atau 38,05
 - Belanja bantuan sosial Target Rp. 1.479.500.000 realisasi Rp. 1.191.500.000 atau 80,53 %
 - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Target Rp. 443.270.948.483 realisasi Rp. 427.382.228.304 atau 96,42 %

- Belanja Bantuan Keuangan Kepala Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa Target Rp. 43.275.206.500 realisasi Rp. 43.259.243.030 atau 99,96 %
- Belanja Tidak Terduga Target Rp. 17.493.331.296,81 realisasi Rp. 2.500.581.313 atau 14,29 %
- b. Belanja Langsung Target Rp. 1.798.380.973.650,04 realisasi sebesar Rp. 1.649.989.715.376,05 atau 91,75 %
 - Belanja Pegawai target Rp. 118.517.780.786 realisasi Rp. 140.772.607.601 atau 94,11%
 - Belanja Barang dan Jasa Target Rp. 917.561.127.504,06 realisasi Rp. 907.419.260.623,95 atau 93,40%
 - Belanja Modal Target Rp. 708.302.065.359,98 realisasi Rp. 665.439.891.390,95 atau 93,95 %

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan pada paruh waktu pelaksanaan RPJMD 2016-2021, masih terdapat beberapa target indikator yang tidak dapat dicapai. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal, khususnya terkait dengan Bencana Alam yang terjadi di sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi pada permasalahan pokok dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah tersebut berdasarkan analisis evaluasi capaian indikator kinerja visi misi pembangunan daerah. Sebagai perbandingan pencapaian antara realisasi kinerja pembangunan saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk memberikan penguatan pada perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021, permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis didasarkan pada urusan pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 1
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Perubahan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM belum optimal	a. Pelayanan Publik	1. Belum semua kabupaten/kota mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik di antaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian; 2. Data kependudukan belum sepenuhnya digunakan sebagai rujukan dalam Perencanaan berbagai sektor pembangunan. 3. Belum diterapkan standar pelayanan public sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum).
		b. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	1. Penegakan disiplin Aparat Sipil Negara (ASN) melalui penerapan system <i>reward</i> dan <i>punishment</i> belum dijalankan secara tertib dan berkelanjutan; 2. Penerapan dan peningkatan teknologi informasi melalui sistem <i>e-Government</i> belum berjalan dengan baik. 3. Komitmen untuk mencapai target Visi-Misi masih belum optimal; 4. Kesejahteraan ASN melalui tunjangan tambahan kinerja daerah (TKD) belum maksimal; 5. Kelembagaan pelaksanaan urusan pemerintahan belum didukung SOP

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>dan standar pelayanan minimal (SPM);</p> <p>6. Kuantitas dan kualitas ASN belum didasarkan muatan kompetensi memadai dalam penempatannya dan jenjang karirnya (<i>tour of duty</i>);</p>
		c. Kapasitas, kapabilitas dan keahlian teknis sumberdaya ASN belum memadai	<p>1. Kualitas SDM aparatur baik kompetensi maupun kapabilitas melalui pendidikan penjenjangan dan pendidikan formal masih rendah.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN belum didukung kelembagaan Diklat yang moderen dan maju.</p>
		A. Kinerja / kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah belum optimal.	<p>1. Belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka panjang.</p> <p>2. Belum up-date kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang dinamis;</p> <p>3. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;</p> <p>4. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai <i>feed back</i> dalam proses pembangunan daerah.</p> <p>5. Data dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>belum memadai;</p> <p>6. Hasil pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan belum optimal;</p> <p>7. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan;</p> <p>8. Belum optimalnya dukungan PD (perangkat daerah) dalam penyediaan informasi dan data statistik;</p> <p>9. Masih banyak jenis data statistik yang belum tersedia yang sesuai kebutuhan daerah.</p>
		B. Pengawasan Pembangunan belum optimal	<p>1. Pemahaman ASN daerah tentang pengawasan masih rendah;</p> <p>2. Sistem pengawasan PD masih rendah;</p> <p>3. Sistem pengawasan internal belum optimal;</p> <p>4. Masih banyaknya pelanggaran administrasi;</p> <p>5. Keterbatasan SDM auditor internal Pemda;</p>
		C. Ketentraman dan ketertiban	<p>1. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi;</p> <p>2. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu;</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.
		D. Pemberdayaan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa; 2. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan; 3. Kemampuan masyarakat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahamannya terhadap kewenangan desa itu sendiri; 4. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal; 5. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 6. Masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa; 7. Ketidakberdayaan masyarakat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;</p> <p>8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal;</p> <p>9. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas;</p> <p>10. Lembaga desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal;</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>11. Tingginya angka kemiskinan di perdesaan.</p> <p>12. Bundes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa;</p> <p>13. SDM yang terlibat dalam pengelolaan BUNDes</p> <p>14. Belum Optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju nkemandirian desa;</p> <p>15. Belum Optimalnya pembangunan desa yang mencakup peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskalaproduktif dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;</p> <p>16. Menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>17. Lemahnya pengelolaan profil desa dan kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan</p>
2.	Ketimpangan infrastruktur daerah dan	a. Aksesibilitas Jalan belum memadai	1. Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah yang belum dalam kondisi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	masih terbatasnya sumber daya energy		<p>atau status jalan kondisi baik/Mantap;</p> <p>2. Terbatasnya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan dengan Panjang jalan yang merupakan kewenangan Provinsi yang harus ditangani;</p> <p>3. Masih banyak jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar wilayah kabupaten/kota kondisi belum memadai (rusak).</p>
		b. Infrastruktur Perhubungan Terbatas	<p>1. Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;</p> <p>4. Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;</p> <p>5. Keterbatasan pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pusat (terminal tipe A, bandara dan pelabuhan);</p> <p>6. Sebagian wilayah infrastruktur perhubungan strategis masih terbatas bahkan pada wilayah terdampak terjadi kerusakan sarana prasarana perhubungan;</p>
		c. Fungsional Jaringan Irigasi	1. Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi rusak;

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2. Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku; 3. Adanya potensi rawan banjir limpahan yang disebabkan daerah aliran sungai di Sulawesi Tengah yang cukup luas dengan debit yang cukup besar;
		d. Akses Air Bersih dan Sanitasi	1. Masih tingginya jumlah penduduk yang mengakses air dari sumber air terlindungi; 2. Akses pelayanan sanitasi dan air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
		e. Perumahan dan Pemukiman layak huni	1. Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (<i>Backlog</i> Rumah) yang masih tinggi; 2. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah dan penanganan rumah di wilayah Kabupaten/Kota; 3. Penyediaan Hunian sementara (HUNTARA) dan Hunian Tetap (HUNTAP) pada wilayah yang terkena dampak bencana belum optimal; 4. Perlu penanganan khusus pada wilayah yang berada di zona merah Kawasan tidak layak huni

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>pada daerah rawan bencana</p> <p>5. Perlunya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru Kabupaten/Kota;</p>
		f. Ketersediaan Energi belum memadai	<p>1. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara layak;</p> <p>2. Masih tingginya investasi energi baru terbarukan (EBT) dan harganya belum mencapai skala ekonomi, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan EBT karena energi fosil harganya lebih murah;</p> <p>3. Konflik didalam pemanfaatan Sumber daya alam bagi investasi energi baru terbarukan (EBT) masih terjadi antar tingkat pemerintahan berdasarkan kewenangan, dan antar masyarakat dan pemerintah;</p> <p>4. Masih besarnya potensi SDA bagi pemanfaatan penciptaan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang belum termanfaatkan;</p> <p>5. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah;</p> <p>6. Adanya beberapa Kuasa Pertambangan (KP) yang tumpang tindih antara kuasa pertambangan (KP) dengan kontrak karya (KK) maupun kuasa pertambangan</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>dengan Kawasan Hutan;</p> <p>7. Masih terbatasnya data yang akurat mengenai sumber daya mineral, Batu Bara, Panas Bumi, Air dan Tanah, karena masih kurangnya kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan.</p>
		<p>g. Tata Ruang diperlukan peninjauan kembali</p>	<p>1. Perlunya penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi;</p> <p>2. Masih banyaknya RTRW kabupaten/kota yang perlu direvisi terutama daerah rawan bencana menyesuaikan dengan rencana zonasi;</p> <p>3. Masih adanya kabupaten/kota belum memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar perijinan;</p> <p>4. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada RTH perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).</p>
3.	<p>Pertumbuhan Ekonomi yang belum inklusif</p>	<p>a. Kemiskinan dan Pengangguran yang masih Tinggi</p>	<p>1. Angka Kemiskinan masih sangat tinggi pada wilayah-wilayah pesisir dan kantong KAT di Kabupaten/Kota;</p> <p>2. Pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya belum optimal;</p> <p>3. Pengendalian Inflasi sulit dilakukan mengakibatkan garis kemiskinan Sulawesi Tengah tinggi;</p> <p>4. Angka kemiskinan Sulawesi Tengah mengalami kenaikan akibat dampak bencana alam yang terjadi pada sebagian besar wilayah Kabupaten/Kota;</p>
		b. Daerah Tertinggal	<p>1. Terdapat 9 (Sembilan) dari 12 (duabelas) Kabupaten diwilayah Sulawesi Tengah merupakan Kabupaten Tertinggal;</p> <p>2. Pada Kabupaten tertinggal sebagian besar disebabkan keterbatasan sapsas dasar, ekonomi masyarakat rendah, SDM rendah dan aksesibilitas;</p> <p>3. Data Kabupaten tertinggal, kecamatan dan Desa tertinggal serta sangat tertinggal di Sulawesi Tengah belum optimal digunakan sebagai focus intervensi Perangkat Daerah;</p>
		c. Perekonomian Daerah	<p>1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal;</p> <p>2. Pertumbuhan dan persebaran investasi dan ketersediaan kawasan industri belum merata;</p> <p>3. Pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan dampak dari bencana alam:</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4. Kerusakan Infrastruktur Ekonomi di wilayah bencana dan terdampak; 5. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah Kabupaten/Kota.
		d. Penanaman Modal	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang investasi di daerah; 2. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah; 3. Regulasi yang belum memihak pada para pelaku bisnis dan kepentingan daerah yang lebih spesifik; 4. Kemampuan pelaku dunia usaha belum sepenuhnya mampu memanfaatkan peluang usaha sesuai dengan potensi dan prospektif sumberdaya alam yang tersedia; 5. Posisi ruang Sulawesi Tengah yang cenderung tidak seunggul posisi ruang Provinsi lainnya di regional Sulawesi khususnya Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan;
		e. Peran Koperasi, UKM dan IKM	1. Pendampingan kelembagaan koperasi masih perlu penguatan; 2. Skala pembiayaan dan akses sumberdaya koperasi dan UMKM masih terbatas dan rendah; 3. Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal; 4. Belum optimalnya pemasaran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>produk koperasi dan UMKM</p> <p>5. Sebagian koperasi dan UMKM serta IKM mengalami kerugian pada wilayah terdampak akibat bencana Alam;</p>
		f. Perdagangan belum optimal	<p>1. Pemasaran hasil-hasil Industri belum maksimal karena rendahnya mutu dan kualitas serta harga yang belum memenuhi selera konsumen;</p> <p>2. Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah apalagi pada saat panen terlebih lagi nilai tambah dari hasil pertanian tersebut terserap oleh daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara;</p> <p>3. Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal;</p> <p>4. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memadai seperti sarana pasar/ pertokoan yang letaknya strategis ditempati oleh pengusaha golongan menengah ke atas, sedang lokasi kurang strategis ditempati pengusaha golongan ekonomi lemah;</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			5. Masih kurangnya informasi pasar luar negeri yang diterima secara cepat dan kontinyu; 6. Sarana dan prasarana perdagangan belum memadai;
		g. Industri yang belum berkembang	1. Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen; 2. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang; 3. Pemasaran hasil industri masih bersifat lokal; 4. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan; 5. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang berpengaruh terhadap harga jual produk; 6. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah;
4.	Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang	a. Pariwisata yang belum berkembang	1. Pelayanan industri pariwisata masih relatif rendah; 2. Sadar wisata masyarakat masih relatif kurang;

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	belum Optimal		<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum ada rencana studi kawasan wisata secara detail; 4. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih terbatas; 5. Masih lemahnya konsep pembangunan wisata berwawasan ekologi namun inovatif di lingkungan parawisata; 6. Desain Kampanye wisata masih belum optimal.
		b. Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke pemukiman dapat menyebabkan; 2. produksi pertanian semakin menurun; 3. diversifikasi tanaman dan menggunakan teknologi tepat guna belum optimal; 4. Pemasaran hasil produksi yang tidak didukung oleh informasi pasar, dan 5. adanya para pengijon sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani; 6. Tingkat produktivitas masih rendah sebagai akibat tingkat pengetahuan dan keterampilan petani belum memadai, disamping kurangnya modal; 7. Mutu hasil perkebunan relatif masih rendah sebagai akibat penanganan pasca panen belum baik; 8. Menurunnya produktifitas air

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>irigasi dalam mendukung hasil pertanian di wilayah bencana, rentan banjir dan lahan kering karena faktor lingkungan hidup, perubahan iklim dan Bencana alam;</p> <p>9. Mekanisme pasaran hasil perkebunan belum memberikan keuntungan bagi petani;</p> <p>10. Usaha peternakan umumnya merupakan usaha peternakan rakyat yang berskala kecil dan merupakan usaha sampingan;</p> <p>11. Aktivitas peternakan yang meliputi ternak besar, kecil dan unggas berfluktuasi dan masih dikelola secara tradisional;</p> <p>12. Pelayanan kesehatan hewan belum mampu menjangkau seluruh daerah pengembangan ternak;</p> <p>13. Konsumsi daging dan telur masih dibawah standar gizi;</p> <p>14. Tata niaga ternak masih belum optimal;</p> <p>15. Keterampilan peternak masih rendah dan belum memanfaatkan teknologi tepat guna seoptimal mungkin;</p>
		c. Pangan	<p>1. Permintaan pangan khususnya beras meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk ;</p> <p>2. Budaya makan beras yang cenderung tidak bisa tergantikan</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>oleh makanan lain;</p> <p>3. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial;</p> <p>4. Keandalan sistem irigasi semakin menurun;</p> <p>5. Intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi;</p> <p>6. Masyarakat Miskin rawan pangan masih tinggi;</p> <p>7. Keanekaragaman konsumsi pangan masih rendah;</p> <p>8. Ketidakstabilan harga pangan</p> <p>9. Perubahan iklim global akibat pemanasan global menyebabkan perilaku iklim semakin sulit diprediksi;</p> <p>10. Keberlanjutan sistem produksi padi akibat Degradasi hutan dan lahan khususnya di kawasan <i>upstream</i> (DAS Hulu) yang berdampak kepada rapuhnya fungsi hidrologi kawasan DAS;</p> <p>11. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan berpengaruh terhadap gizi;</p> <p>12. Masalah gizi buruk di masyarakat;</p>
		d. Perikanan dan Kelautan	<p>1. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku;</p> <p>2. Meningkatnya kerusakan</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>ekosistem dan ekologi akibat illegal fishing;</p> <p>3. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik antar hak adat, perseorangan dan perusahaan;</p> <p>4. Tata letak (<i>lay out</i>) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas;</p> <p>5. Masih tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional sehingga margin keuntungan pembudidaya menurun;</p> <p>6. Nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan umumnya belum mengikuti kaidah dan persyaratan mutu produk;</p> <p>7. Teknologi yang diterapkan masih sederhana sehingga produksi tingkat produktifitas cenderung rendah;</p> <p>8. Kelembagaan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang kurang optimal;</p> <p>9. Kurangnya akses terhadap permodalan, lembaga keuangan dan perbankan;</p> <p>10. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar;</p> <p>11. Terbatasnya prasarana produksi yang memadai seperti jalan produksi. Jaringan irigasi</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>tambak, sarana PPI/TPI, mekanisme nelayan kecil, rumpon;</p> <p>12. Tingginya kerusakan ekosistem Mangrove dan terumbu karang sebagai habitat vital untuk tempat pemijahan ikan laut di berbagai kawasan di Sulawesi Tengah;</p> <p>13. Lemahnya data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat.</p>
		e. Degradasi lingkungan hidup	<p>1. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumberdaya alam secara luas meningkat;</p> <p>2. Pengelolaan dan pengolahan sampah ditingkat Kabupaten/Kota belum optimal;</p> <p>3. Luas Lahan kritis meningkat;</p> <p>4. Aktivitas deforestasi (Proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan) sangat tinggi.</p> <p>5. Meningkatnya kerusakan hutan akibat illegal logging;</p> <p>6. Belum terintegrasinya keterlibatan masyarakat adat dan perempuan adat dalam pembangunan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal mengurangi emisi, degradasi dan pencapaian karbon.</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			7. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah; 8. Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan;
		f. Bencana Alam	1. Mitigasi bencana belum berjalan secara optimal; 2. Ancaman kerusakan lingkungan hidup oleh berbagai aktivitas dan alih fungsi lahan masih cukup tinggi; 3. Tipologi wilayah Sulawesi Tengah dengan struktur geologi kompleks dan jalur gempa menyebabkan wilayahnya sangat rentan bencana alam (gempa, banjir dan longsor); 4. Sebagian besar wilayah Sulawesi tengah berada di leher pulau Sulawesi yang memiliki air laut pasang yang tinggi membuat kerusakan infrastruktur lebih cepat; 5. Karakter wilayah yang berada di wilayah garis patahan khusus patahan Palu Koro sebagai salah satu sesar sangat aktif didunia mengakibatkan wilayah Sulawesi Tengah rawan bencana gempa besar;
		g. Pertambangan	1. Konflik pertambangan terkait status kepemilikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sangat tinggi; 2. Masih maraknya penambangan tanpa ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			yang benar (<i>good mining practice</i>);
5.	Kualitas Sumberdaya Manusia Yang belum Berdaya Saing	a. Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih perlunya peningkatan lulusan SMK yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja; 2. Kualitas Layanan Pendidikan SMA belum memadai; 3. Masih rendahnya angka Harapan lama sekolah (HLS) dan Angka rata-rata lama sekolah (RLS) 4. Belum meratanya kualitas layanan pendidikan; 5. Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus; 6. Daya saing Pendidikan Sulawesi Tengah masih perlu ditingkatkan.
		b. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka Kematian Bayi(AKB), serta 2. Masih adanya kasus gizi buruk dan Gizi kurang khususnya wilayah pedalaman dan daerah tertinggal; 3. Masih ditemukannya kasus <i>stunting</i> di kabupaten/kota; 4. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular; 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan;</p> <p>6. mutu pelayanan rumah sakit masih perlu ditingkatkan;</p> <p>7. Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan;</p> <p>8. Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif;</p> <p>9. Sebagian layanan fasilitas kesehatan belum terakreditasi di tingkat Kabupaten/Kota;</p>
		c. Produktivitas Tenaga Kerja	<p>1. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah;</p> <p>2. Masih terbatasnya lapangan kerja yang tercipta di tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Lapangan kerja yang tersedia sebagian tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki calon tenaga kerja;</p> <p>4. Akibat Bencana Alam telah menghilangkan sebagian lapangan kerja pada sector pertanian dan IKM-UMKM di wilayah bencana dan terdampak (PADAGIMO);</p> <p>5. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;</p> <p>6. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tripartit dan bipartit</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>di kabupaten/kota;</p> <p>7. Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja;</p>
		d. Peran Perempuan belum optimal	<p>1. Masih kurangnya kemandirian perempuan;</p> <p>2. Belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan;</p> <p>3. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan;</p> <p>4. Belum optimalnya hak anak untuk mewujudkan provinsi layak anak;</p> <p>5. Masih tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan korban paska konflik yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan;</p>
		e. Pembangunan Kependudukan	<p>1. Kuantitas Penduduk tidak diikuti daya saing SDM;</p> <p>2. Struktur Penduduk Sulawesi Tengah kurang menguntungkan dimana Jumlah Balita & Anak masih sangat besar, Jumlah penduduk remaja dan usia reproduksi besar dengan kualitas rendah, Jumlah lansia semakin meningkat;</p> <p>3. Persebaran Penduduk timpang antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dalam lingkup Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Kualitas Penduduk masih rendah dimana Indeks Pembangunan</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>Manusia Sulawesi Tengah Masih diwabah rata-rata nasional;</p> <p>5. Pencapaian Kualitas Penduduk tidak merata antar wilayah kabupaten/kota;</p>
		f. Sosial Kemasyarakatan	<p>1. Masih tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (ketelantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana alam, korban bencana sosial, kemiskinan, KAT);</p> <p>2. Masih kurangnya kepedulian masyarakat termasuk dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat yang rentan (Lansia Terlantar dan Anak Cacat);</p> <p>3. Kurangnya lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan yang fokus/peduli pada masalah kerawanan sosial;</p> <p>4. Belum terintegrasinya sistem sosial yang berwawasan gender dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan sosial;</p> <p>5. Belum Optimalnya Penanganan bencana Sosial;</p> <p>6. Masih Rendahnya Penanganan Kasus Anak, perempuan dan human <i>tracfficking</i>;</p> <p>7. Belum Optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			serta Perlindungan Jaminan Sosial; 8. Masih Rentan terhadap konflik sosial; 9. Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
		g. Kebudayaan	1. Lunturnya nilai-nilai kebudayaan daerah karena derasnya kebudayaan dari luar akibat peningkatan teknologi informasi; 2. Rendahnya apresiasi warga masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai kebudayaan daerah; 3. Kurangnya informasi tentang kebudayaan daerah; 4. Lemahnya pendokumentasian sejarah kebudayaan termasuk pelestarian berbagai peninggalan sejarah Sulawesi Tengah.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah**➤ Visi**

Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan implementasi otonomi daerah saat ini, maka diperlukan suatu model dan paradigma perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah ditempuh berbasis pada potensi dan kemampuan daerah yang ada, sebagai tindak lanjut dengan potensi dan kemampuan tersebut maka perlu dituangkan ke dalam visi pembangunan daerah periode 2016-2021.

Berdasarkan penilaian dan analisis data terkini, telah banyak kemajuan atau prestasi yang dicapai dalam lima tahun terakhir. Kemajuan tersebut antara lain pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan daya saing serta indikator-indikator keberhasilan lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan, kesempatan kerja serta kemajuan dalam sektor-sektor ekonomi lainnya.

Keberhasilan lima tahun terakhir telah membangkitkan optimisme menuju kesejajaran dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia. Pengembangan kuantitas dan kualitas SDM masyarakat Sulawesi Tengah dalam usaha mencapai daya saing daerah yang tinggi sudah *on the track*. Keberhasilan yang sudah tercapai tersebut merupakan hasil dari sinergitas dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keberhasilan pembangunan dan pemerintahan dari pasangan Drs. H. Longki Djanggola, M.Si dan H. Sudarto, SH,M.Hum menjadi penggerak energi mewujudkan provinsi yang maju, mandiri dan berdaya saing. Untuk menggerakkan energi kolektif tersebut dilakukan dengan mendorong investasi terhadap potensi sumber daya alam yang tersedia, untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah. Upaya mendorong investasi tersebut antara lain dilakukan dengan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dan Kawasan Industri Morowali-Morowali Utara. Selain itu juga mendorong berkembangnya UMKM yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi kerakyatan di Sulawesi Tengah secara berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai periode 2011-2016 mengusung visi *Mewujudkan Sulawesi Tengah Seajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia Dalam Pengembangan Agribisnis dan Kelautan Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Pada Tahun 2020*. Capaian visi pada periode tersebut merupakan modal dasar yang akan **diteruskan** dan **dituntaskan** oleh gubernur terpilih yang menerima amanah dari masyarakat Sulawesi Tengah.

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga merupakan konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (leverage) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan bersama yang dicita-citakan.

Guna menentukan arah ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interpretasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2015-2020.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMN Tahun 2015-2019 dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di provinsi Sulawesi Tengah maka visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 sebagai berikut:

“Sulawesi Tengah MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”

Visi di atas mengandung beberapa kata kunci (keywords) yang perlu dijabarkan ke dalam misi dan diterjemahkan ke dalam tujuan serta sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya, tujuan dan sasaran tersebut harus diikuti dengan strategi kebijakan, program dan kegiatan yang jelas, terarah dan terukur guna mewujudkan

visi tersebut. Kata kunci atau pokok-pokok visi yang dimaksud adalah Maju, Mandiri dan berdaya Saing. Pokok-pokok visi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<p style="text-align: center;">“SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”</p>	<p>1. MAJU</p>	<p>Secara umum Maju berarti keadaan yang baik, kondisi masyarakat dalam keadaan menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi.</p> <p>Makna kata Maju ditandai dengan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang Inklusif 2. Membaiknya pendapatan perkapita masyarakat sulteng 3. Infrastruktur yang berkembang baik 4. Kemiskinan daritahun ketahun menurun 5. Tingkat pengganguran terbuka (TPT) makin rendah 6. Nilai Tukar Petani (NTP) makin baik
	<p>2. MANDIRI</p>	<p>Kondisi masyarakat Sulteng yang mandiri dapat dijelaskan</p>

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		<p>dimana masyarakat sulteng sejahtera dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang/pihak lain dalam hal memenuhi kebutuhannya.</p> <p>Makna kata Mandiri ditandai dengan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi pangan yang meningkat hingga kondisi ketahanan pangan makin baik 2. Meningkatnya Investasi daerah 3. Meningkatnya kemandirian Desa-desa di wilayah Sulawesi Tengah
	<p>3. BERDAYA SAING</p>	<p>Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan daya saing daerah. Daya saing merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan stabilitas kemajuan daerah dari integrasi dan kecenderungan global, yang juga mengukur keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan.</p> <p>Ruang lingkup peningkatan daya saing daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas ekonomi makro

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		daerah 2. Pemerintahan yang makin bersih dan professional 3. Perencanaan pemerintah yang makin baik 4. Kondisi investasi dan tenaga kerja 5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 6. Pembangunan infrastruktur meningkat

➤ **Misi**

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021, ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, Mendukung Penegakan Supremasi Hukum dan HAM.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Mendukung Kemandirian Energi.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.
5. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.

c. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah

➤ **Prioritas dan Program Aksi Daerah**

Prioritas Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan arah dan fokus pembangunan pada lima tahun mendatang, juga menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah saat ini dan di masa mendatang sekaligus menjadi agenda utama menuju pada perwujudan **“Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**.

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari prioritas pembangunan daerah berdasarkan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dirumuskan 10 (sepuluh) Agenda prioritas daerah yang diimplementasikan dalam 35 (tigapuluh lima) Program Aksi yang akan dijabarkan ke dalam kegiatan Perangkat Daerah. Prioritas Pembangunan Daerah dijabarkan sebagai berikut:

PRIORITAS 1: Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM. Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh beberapa program aksi sebagai berikut.

Tabel 3 Program Aksi Prioritas I

NO	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
1	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Badan Kepegawaian Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
2	Penerapan Pengelolaan E-Government Dan E-Budgeting Dalam Rangka Transparansi Dan Akuntabilitas Publik	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Badan	Dinas Pendapatan daerah Biro Adm. Pembangunan

NO	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
		Perencanaan Pembangunan Daerah	dan SDA Biro Perekonomian
3	Melanjutkan Sistem Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Daerah Berbasis Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Inspektorat Daerah Biro Organisasi
4	Optimalisasi Dan Penyerasian Koordinasi, Sinergitas Dan Harmonisasi Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Dan Pusat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Badan Pendapatan daerah

PRIORITAS 2: Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan.

Tabel 4 Program Aksi Prioritas II

NO	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
1	Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Mediator Dalam Penyelesaian Konflik/Masalah Daerah	- Satuan Polisi Pamong Praja - Biro Bina Administrasi Kewilayahan - Biro Hukum	- Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan - Biro Otonomi Daerah
2	Peningkatan Harmonisasi Hubungan Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan DPRD Serta Peningkatan Peran Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (FORKOPIMDA).	- Sekertariat DPRD - Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol - Kesbangpol	- Badan Penghubung - Biro Umum - Kesbangpol
3	Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Dalam Rangka Pencegahan Tindakan Penyelewengan.	- Inspektorat Daerah	- Biro Adm. Pembangunan - Biro Organisasi
4	Penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Memperkokoh NKRI.	- Satuan Polisi Pamong Praja - Biro Hukum.	Biro Organisasi
5	Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas NAKERTRANS

NO	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
			<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Biro Hukum - Biro Kesra

PRIORITAS 3 : Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota.

Tabel 5 Program Aksi Prioritas III

NO	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
1	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Strategis Daerah Bagi Kemajuan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Bina Marga dan penataan Ruang. - Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> -Dinas Perhubungan -Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik
2	Fasilitasi Ketersediaan Akses Informasi Dan Komunikasi Khususnya Pada Daerah Terpencil Dan Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi informatika persandian dan statistik 	<ul style="list-style-type: none"> -Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. -Biro Adm. Kewilayahan. -Badan Penghubung

PRIORITAS 4 : Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan.

Tabel 6 Program Aksi Prioritas IV

N	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
1	Fasilitasi Instalasi Jaringan Listrik Dalam Daerah Dan Dukungan Penyediaan Energi Baru Terbarukan Khususnya Pada Daerah Terpencil Dan Tertinggal.	Dinas ESDM	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS 5 : Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Tabel 7 Program Aksi Prioritas V

No	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
1	Pengembangan dan Pendayagunaan Ekonomi Desa serta Penataan Lembaga dan Fasilitasi Kerjasama Desa Dengan Prinsip Revolusi Mental Berdesa.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Dinas Pariwisata - Biro Adm. Perekonomian dan Pembangunan - Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
2	Desa Membangun Dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung Dalam Rangka	Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan

No	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	- Bappeda	
3	Pengembangan Dan Pemberdayaan UKM Dan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Penciptaan Lapangan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
5	Pengentasan Kemiskinan Berbasis Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas NAKERTRANS - Bappeda - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Biro Hukum - Biro Kesra

PRIORITAS 6 : Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan *Market Friendly*.

Tabel 8 Program Aksi Prioritas VI

No.	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
1	Optimalisasi Peran Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Biro Adm. Perekonomian & Pembangunan
2	Pengembangan Kawasan Industri Dalam Rangka Mewujudkan Industri Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Penghubung	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Biro Adm. Perekonomian & Pembangunan.
3	Pemerataan Wilayah Pembangunan Berbasis Pengembangan Kawasan Strategis Daerah Dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Biro Bina Administrasi Kewilayahan

PRIORITAS 7 : Melanjutkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing.

Tabel 9 Program Aksi Prioritas VII

No	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
1	Optimalisasi Pengembangan Agribisnis Dan Pertanian (Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan)	- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura - Dinas Perkebunan dan Peternakan - Dinas Kehutanan	- Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Perindustrian
2	Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	- Dinas Koperasi dan UKM - Dinas Perindustrian
3	Optimalisasi Pengelolaan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata Daerah	Dinas Pariwisata	Badan Penghubung
4	Optimalisasi Distribusi Perdagangan Dan Meningkatkan Ekspor Produk Unggulan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. - Biro Adm. Perekonomian dan Pembangunan

No	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
5	Menjaga Ketahanan Pangan, Penanganan Kerawanan dan Keamanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan	- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. - Dinas Perkebunan & Peternakan. - Dinas Perikanan dan Kelautan

PRIORITAS 8 : Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan.

Tabel 10 Program Aksi Prioritas VIII

No	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
1	Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan, pengembangan perhutanan sosial dan perencanaan, pengendalian serta pembinaan pengawasan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	- Dinas Kehutanan - Dinas Lingkungan Hidup	Biro Adm. Perekonomian & Pembangunan.

No	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
2	Penataan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara serta revitalisasi pertambangan rakyat	Dinas ESDM	Dinas Lingkungan Hidup
3	Optimalisasi penanganan bencana dan pemulihan trauma bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana	Dinas Sosial

PRIORITAS 9 : Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 11 Program Aksi Prioritas IX

No	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
1	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia
2	Peningkatan Kerjasama Dan Jejaring Dengan Perguruan Tinggi Dan Lembaga Riset Dalam Mendorong Daya Saing Daerah	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penghubung Badan Pengembangan

No	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
			Sumber daya Manusia
3	Pelestarian Tradisi Budaya Lokal Dan Pembinaan Lembaga Adat Serta Budaya Gemar Membaca	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Pariwisata
4	Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Peningkatan Prestasi Olahraga Unggulan	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PRIORITAS 10 : Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas.

Tabel 12 Program Aksi Prioritas X

No	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
1	Optimalisasi Upaya Kesehatan, Kesehatan, Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada	Dinas Kesehatan	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Dinas Sosial

No	Program Aksi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Pendukung
	Masyarakat		
2	Optimalisasi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Dan Rehabilitasi Sosial Serta Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Biro Adm. Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan.
3	Optimalisasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

➤ **Program Percepatan Unggulan Daerah**

Program Percepatan Unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pengembangan UKM melalui penjaminan Modal Usaha Rakyat.
2. Kartu Petani Maju (antara lain: Pupuk dan Obat-Obatan Bersubsidi).
3. Kartu Nelayan Maju (antara lain: Bahan Bakar Solar Bersubsidi).
4. Kartu Buruh Maju (antara lain: pelatihan dan pendidikan gratis).
5. Memberikan Jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
6. Sekolah murah dan berkualitas untuk SMU/SMA/SMK dan MA (Di luar dana BOS).

7. Melanjutkan Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan kemandirian Desa.
8. Melanjutkan Pembangunan dan Perbaikan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan antarwilayah.
9. Fasilitasi sumber energi baru terbarukan bagi masyarakat.

➤ **Prioritas Program Lintas Bidang dan Lintas Wilayah**

Selanjutnya Program Prioritas Lintas Bidang dan Lintas Wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung
2. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan inovasi program penanggulangan kemiskinan berbasis Bedah Kampung. Program bedah kampung dilaksanakan melalui belanja tidak langsung pada pos bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
3. Program Sulteng Maju
Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program percepatan pembangunan untuk mensejajarkan diri dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia melalui program unggulan daerah untuk mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, nelayan serta buruh melalui program lintas SKPD “Program Sulteng Maju”.
4. Program Sulteng Bersaing
Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program percepatan pembangunan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja dan memiliki daya saing yang diberi nama “Program Sulteng Bersaing”.
5. Program Sulteng Sejuta Sapi
Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggagas program dalam mendukung swasembada daging nasional melalui “Program Sulteng Sejuta Sapi”.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target capaian Per Tahun	Target Pencapaian
1	Pendidikan Menengah	Jumlah anak 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Khusus	Jumlah anak usia 4-18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	Setiap tahun

Kesehatan

Berdasarkan Permendagri no, 100 tahun 2018 Capaian kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Nilai (%)	Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	2020	
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi			
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	2020	1.251.868.000

2.3 Realisasi

No	Indikator SPM	Sasaran Dalam Tahun	Capaian Dalam Tahun	%
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	17.484 penduduk	91.030 penduduk	56%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	20.720 Penduduk	20.720 Penduduk	100%

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2020 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%, dengan menghitung jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun di bagi jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang samadikali 100%.

Pencapaian indikator Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan pada tahun 2020 belum mencapai target. dimana secara provinsi capaian Kab/Kota yang membentuk PSC 119 baru mencapai 30,77%, dan tenaga sumber daya kesehatan PSC yang terlatih kegawatdaruratan (BHD,GELS,ACLS,ATLS) masih sebatas PSC Dinas Kesehatan Provinsi. Namun sebagai awal dari penerapan SPM ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) telah membuat peta

rawan bencana serta penentuan jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi bencana tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target antara lain :

- a. KIE bagi petugas kesehatan
 - 1) Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - 2) Percepatan pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota
 - 3) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
 - b. KIE bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana
 - 1) Pemantauan Potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
 - 2) Penyuluhan dan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di hunian sementara Petobo dan desa Bangga
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi
- Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB , dengan menghitung Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard bagi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB dikali 100%.
- Untuk memenuhi target kinerja tersebut dilakukan melalui kegiatan antara lain :

No	kegiatan
I	Program Surveilans APBD
a.	Pertemuan Reviu Surveilans
b.	Pengembangan Sumbermas di Kabupaten Banggai Laut dan Donggala
c.	Konsultasi Kegiatan Program ke Jakarta dan daerah Lainnya
d.	Pemantauan Surveilans Kesehatan Haji di Embarkasi Balikpapan
e.	Penyelidikan Epidemiologi/ Verifikasi Rumor KLB
f.	Pemantauan SKDR di Kab/Kota
i.	Rapat Tim Terpadu Surveilans Epidemiologi
j.	Dukungan Manajemen Surveilans
II	Program Surveilans APBN
a.	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB di Kab/Kota Surveilans PD3I
b.	Layanan Respon KLB dan Wabah
c.	Layanan Kekejarantinaan Kesehatan

2.4 Alokasi Anggaran

No	Indikator SPM	APBD	APBN
A	PROVINSI		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	600.000.000	-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	400.000.000	851.868.000

2.5 Dukungan Personil

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Pejabat structural sebanyak 4 orang
 - Dokter sebanyak 1 orang
 - Perawat sebanyak 9 orang
 - Kesehatan masyarakat sebanyak 5 orang
 - Kesehatan lingkungan sebanyak 2 orang
 - Staf administrasi sebanyak 11 orang
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi terdiri dari :
 - Personil Provinsi : 12 Orang
 - Personil Kabupaten/kota : 39 Orang

2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Koordinasi tingkat cluster kesehatan masih belum berjalan dengan baik, terutama dalam mengedukasi pengurangan resiko krisis kesehatan terhadap penduduk yang terdampak ataupun penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana.

- Pengetahuan petugas kesehatan di kabupaten/kota terutama puskesmas terkait krisis kesehatan akibat bencana masih kurang.
 - KIE pengurangan resiko krisis kesehatan akibat bencana masih merupakan tugas dan tanggungjawab pelaksana program penanggulangan krisis kesehatan dan masalah kesehatan.
 - Minimnya pembiayaan untuk penanganan krisis kesehatan.
 - Belum optimal kerjasama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Solusi

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsiterdiridari :
- Melakukan Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - Melakukan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
 - Melakukan Pertemuan Penguatan LP dan LS
 - Melakukan penyusunan peta rawan bencana di setiap kabupaten/kota dan puskesmas untuk pengurangan resiko krisis kesehatan
 - Melakukan kegiatan pemantauan potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi
- Tidak tersedianya kendaraan Operasional khusus Penyelidikan Epidemiologi KLB dalam menunjang Indikator program yaitu Penanganan < 24 Jam dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan yang menjangkau tidak hanyasampai di Kabupaten/Kota tetapi harus sampai di Kecamatan bahkan Desa-desa.

Pekerjaan umum
Perumahan dan pemukiman

No.	SPM	Target	Capaian	Alokasi Anggaran	Dukungan Personil	Permasalahan dan solusi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana	92,41 %	65,74%	Rp 2.292.603.762.453	194 orang	<p>Permasalahan : Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target SPM bidang perumahan belum mencukupi untuk penanganan 3 tahun</p> <p>Solusi : - Pemerintah daerah perlu penambahan anggaran untuk pencapaian target SPM untuk bisa memenuhi penanganan dalam 3 tahun - Penambahan anggaran APBN, CSR</p> <p>Belum dilaksanakan karena belum ada penyediaan rumah relokasi akibat program pemerintah provinsi.</p>
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	0	100%	-	-	

Social

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Anggaran	Keterangan
1	Rehabilitas social dasarpenyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitas social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti			

2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar anak terlantar		69.154.000	
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar dalam panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi social dasar lanjut usia dalam panti	50 orang	895.600.000	
4	Rehabilitasi social dasar tunas social khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi social dasar tuna social di dalam panti			
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1500 orang	222.492.500	

Atas dasar pemahaman bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan Rencana Aksi yang tepat bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah yakni terintegrasinya pencapaian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan

serta tersinerginya rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mencermati capaian penerapan SPM Bidang Sosial pada tahun 2020 ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa hal yang dapat disimpulkan yakni:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti tidak memiliki target dan capaian. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki panti rehabilitasi penyandang disabilitas.

2. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti sosial skala provinsi tidak terdapat capaian. Hal ini disebabkan karena pada triwulan II, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terjadi refocussing / realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan

Covid - 19 yang mempengaruhi target program / kegiatan.

3. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai 100% . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT PSTW Madago telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi.

4. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial terlantar di dalam panti tidak memiliki target dan capaian. Hal ini disebabkan karena UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Sulawesi Tengah belum mengalokasikan untuk pelayanan dan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis.

5. Pemberian bantuan dan perlindungan bagi korban bencana skala provinsi mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Provinsi telah melaksanakan penanganan bagi korban bencana.

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial tersebut di atas, tentunya target SPM Bidang Sosial yang sudah dicapai akan dipertahankan sedangkan yang belum tercapai dibutuhkan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait khususnya mengenai keterbatasan alokasi anggaran pada urusan sosial sehingga pada tahun depan dapat terjadi peningkatan dan dapat memperkecil deviasi capaian dari target yang sudah ditetapkan.

Trantib

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

DATA LPPD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

TABEL CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULTENG

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1 (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA TAHUN N (TAHUN 2020)	PERUBAHAN (%)
1	2		3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,50	69,55	0,07
2	Angka Kemiskinan	%	13,18	12,92	-0,26
3	Angka Pengangguran	%	3,11	3,77	0,66
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,15	4,86	-2,29
5	Pendapatan Perkapita (Harga Berlaku)	Juta Rp/Tahun	60.820	63.750	4,82
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,330	0,326	-1,21

Sumber: BPS, Tahun 2021.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan				

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan				

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan				

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Baik
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2020. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Capaian IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91 ≤	76 ≤ 90	66 ≤ 75	51 ≤ 65	≤ 50
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	62,51-81,25%	97,00 %	119,38%	√				
Capaian Rata-Rata				119,38%	√				

2.	- Opini BPK	WTP	WTP	-					
	- Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	-					
	- Indeks Reformasi Birokrasi	67	62,92	-					
Capaian Rata-Rata				-					
3.	- Persentase kemantapan jaringan jalan	61%	61,78 %	101,28%	√				
	- Persentase rumah tangga pengguna listrik.	89,79%		108,04%	√				
	- Persentase rumah tangga pengguna air bersih.	71,73%	97,01 %						
	- Persentase rumah layak huni		75,38 %	105,08%	√				
	- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	73,45%		93,46%	√	√			

		14,75%	68,65 % 13,4%	90,85%					
Capaian Rata-Rata				99%	√				
4.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	86,71-87,11%	99,92 %	86%		√			
Capaian Rata-Rata				86%		√			
5.	Indeks gini	0,31-0,35	0,326	93,14%	√				
Capaian Rata-Rata				93,14%	√				
6.	Persentase koperasi aktif	65,72%	55,50 %	84,44%		√			
Capaian Rata-Rata				84,44%	√				
7.	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10,99%	7,07 %	64,33%				√	
	- Ekspor bersih perdagangan.	1.100 Juta USD	5.095,71 Juta USD	436,25%	√				
Capaian Rata-Rata				250,29%	√				

8.	Pertumbuhan industri.	7,60-7,80%	11,08	145,79%	√				
Capaian Rata-Rata				145,79%	√				
9.	Nilai realisasi investasi								
	- PMDN			1052 %					
		5.000.000.000	5.261.315.800.00		√				
	- PMA		0	1066 %					
		15.400.000.000.000	25.617.411.570.00		√				
Capaian Rata-Rata				1059 %	√				
10.	- Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG).	68,5-69,0%	92,43 %	100%	√				
	- Peningkatan Indeks								

	Pemberdayaan Gender (IDG)	71,29- 71,45%	75,50 %	100%	√				
Capaian Rata-Rata				100%	√				
11.	- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	20.000 Orang	11.92 1 Org	59,60 %				√	
	- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3.800.000 Orang	1.812. 995 Org	47,7 %					√
Capaian Rata-Rata				53,65 %				√	
12.	- Tingkat pengangguran terbuka	3,5-3,25 %	3,77 %	116 %	√				
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,75%	69,44 %	90,47%		√			
Capaian Rata-Rata				103,23%	√				

13.	Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal.	62%	62%	100 %	√				
Capaian Rata-Rata				100 %	√				
14.	Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan	8 - 9%	607,05%	67,45%			√		
Capaian Rata-Rata				67,45%			√		
15.	- Persentase kerusakan kawasan hutan	0,15%	0,06%	40%					√
Capaian Rata-Rata				40 %					√
16.	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,5 poin	80,23 Poin	113,8%	√				
Capaian Rata-Rata				113,8 %	√				
17.	Nilai tukar petani	104,73	88,87 %	84,72 %			√		
Capaian Rata-Rata				84,72%			√		
18.	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.	28,40%	26,24 %	93,31%	√				
			Rp.	95,24%					

	- Jumlah PDRB sub sektor perkebunan.	Rp. 12.722.383	12.480.042		√				
Capaian Rata-Rata				94,27%	√				
19.	- Nilai tukar nelayan.	108,22	98,11	90,66%		√			
	- Nilai ekspor hasil perikanan (USD)	3.520.000	3.763.124,02	106,90%	√				
Capaian Rata-Rata				98,78%	√				
20.	Persentase angka melek aksara.	98,50-99,35	96,50	97,12%	√				
Capaian Rata-Rata				97,13%	√				
21.	- Angka Partisipasi Kasar (APK) : SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B	103,25-104,00%	104,00%	100 %	√				
		92,50-	92,50%	99,19%					

	SMA/MA/SMK/ Paket C	93,25%		100 %	√				
	- Angka Partisipasi Murni (APM) :	84,50- 85,25%	85,25 %						
	SD/MI/Paket A			99,20%	√				
	SMP/MTs/Pak et B		94,00 %	98,99%					
	SMA/MA/SMK/ Paket C	93,75- 94,50%	74,00 %	99,24%	√				
		74,00- 74,75%	66,00 %		√				
		65,50- 66,50%			√				
	Capaian Rata-Rata			99,43%	√				
22.	Angka usia harapan hidup	68 Tahun	67,78 Tahun	99,67	√				

	Capaian Rata-Rata				√				
23.	- Cakupan peserta KB aktif.	68 %	78,1%	89,96%		√			
	- Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.	45,05%	65,48 %	54,65%				√	
	Capaian Rata-Rata			72%			√		

Data diolah dari beberapa Perangkat Daerah Prov. dan BPS Prov. Sulteng, 2021

Tabel diatas dapat menggambarkan bahwa dari 42 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 27 IKU telah memenuhi kriteria sangat baik, 6 IKU memenuhi kriteria tinggi, 1 IKU capaiannya sedang, 3 IKU capaiannya rendah, 2 IKU capaiannya sangat rendah serta 3 IKU yaitu opini BPK realisasinya masih menunggu hasil pemeriksaan BPK, Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mayoritas IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik bahkan ada yang mencapai lebih dari 100% (11 IKU).

Pencapaian IKU tersebut diatas bila diukur dengan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pencapaian IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 diukur dengan skala nilai peringkat kinerja

No	Tingkat capaian	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	27	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	6	Tinggi
3	66 ≤ 75	1	Sedang
4	51 ≤ 65	3	Rendah
5	≤ 50	2	Sangat Rendah
6		3	Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemda dan Nilai Akuntabilitas Kinerja & Indeks RB masih menunggu hasil evaluasi Kemenpan RB.
	JUMLAH	42	

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja secara umum sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja akan diuraikan persasaran strategis.



Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini didukung oleh program :

- Program pembinaan kinerja dan pelayanan publik
- Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Data persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,21	102%	94,83%	116%	82,71%	101,80%	97,00%	119,38%	81,26-100%	97,00%

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil survey yang dilakukan selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena terealisasi diatas target yang direncanakan yaitu sebesar 83,21% dengan capaian kinerja 102%. Terjadi kenaikan sebesar 13,94% pada tahun 2018 dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 94,83% dengan capaian kinerja 116%. Selanjutnya pada tahun 2019 Indeks Kepuasan Masyarakat turun 14,65% dari tahun 2018 karena hanya terealisasi sebesar 82,71% dengan capaian kinerja 101,80%, lalu pada tahun 2020 terealisasi sebesar 97,00% dengan capaian kinerja 119,38% atau naik 17,27% dari tahun 2019. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 ini telah terealisasi sebesar 97,00%.

Survey Kepuasan Masyarakat ini ditentukan berdasarkan hasil survei responden dengan pengukuran 9 unsur pelayanan. Selain itu berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat perubahan klasifikasi angka pada pengkategorian Mutu Layanan. Pengukuran hasil survei menunjukkan IKM terhadap pelayanan perizinan sebesar **97,00**, indeks ini jika berdasarkan target dalam RPJMD berada pada kategori **Sangat Baik** yakni *range* (rentang jarak) 81,26 – 100,00. Sekaligus juga berdasarkan aturan baru pada Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut maka IKM 97,00% juga berada pada kategori **Sangat Baik** yakni *range* 88,31 – 100. Untuk lebih jelasnya, hasil survei IKM pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Survei IKM Tahun 2020

Keterangan :		No.	UNSUR PELAYANAN	NRR
- U1 s/d U9	= Unsur-Unsur Pelayanan	U1	Persyaratan	3.710
- NRR	= Nilai Rata-Rata	U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.820
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat	U3	Waktu Penyelesaian	3.750
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang	U4	Biaya/Tarif	4.000
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25	U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.890
- NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi	U6	Kompetensi Pelaksana	3.930
	Jumlah Kuesioner yang terisi	U7	Perilaku Pelaksana	4.000
NRR tertimbang	= NRR per unsur x 0.071	U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4.000
per unsur		U9	Sarana dan Prasarana	4.000
IKM UNIT PELAYANAN :				97,00
Mutu Pelayanan :				
A (Sangat Baik)	: (3,5324 - 4,00)		88,31 - 100,00	
B (Baik)	: (3,0644 - 3,532)		76,61 - 88,30	
C (Kurang Baik)	: (2,60 - 3,064)		65,00 - 76,60	
D (Tidak Baik)	: (1,00 - 0,5996)		25,00 - 64,99	

Sumber : DPMPTSP Prov.Sulteng, 2021

Beberapa faktor penunjang tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien adalah:

- Fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang merupakan kegiatan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan. Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan untuk meningkatkan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani.
- Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berbasis IT sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan perizinan dan Non Perizinan di daerah dengan hadirnya OSS (online Single Submission) sebagai bentuk aplikasi layanan perizinan satu pintu yang bersifat menyeluruh.
- Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Perizinan dan Non Perizinan ini merupakan kegiatan untuk merumuskan kebijakan dibidang Pengaduan dan Advokasi dan kebijakan laporan Layanan Perizinan dan Non perizinan.
- Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan merupakan kegiatan yang memfasilitasi layanan pengaduan dan Informasi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui beberapa media.

SASARAN
STRATEGIS 2

Meningkatnya Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis 2“Meningkatnya Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi” memiliki 3 indikator kinerja, yaitu Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Kinerja, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Rinciannya sebagai berikut :

1. Opini BPK

Data opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Opini BPK Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	-	-	WTP	-

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dengan capaian masing-masing 100%. Untuk realisasi opini BPK tahun 2020 belum ada, karena masih sementara dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, termasuk juga dengan capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek pengendalian internal berperan penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat memberikan peringatan dini terhadap potensi penyimpangan yang terjadi yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Capaian Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai akuntabilitas kinerja Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	-	-	BB	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 memperoleh nilai 66,31 dengan predikat B (capaian 100%) dan pada tahun 2018 memperoleh nilai 67,16 juga dengan predikat B (capaian 100%). Selanjutnya pada tahun 2019 nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 68,30 dengan predikat B atau capaian 100%, untuk realisasi Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 belum ada, masih menunggu hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Akuntabilitas pemerintah menunjukkan pergeseraan baru dalam relasi antara pemerintah dengan publik. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggung jawabkan mandat yang diberikan publik dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Data capaian Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks reformasi Birokrasi Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

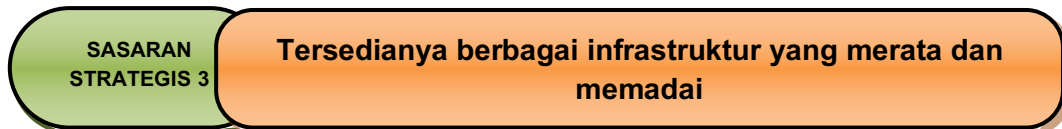
No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	61,6	99,5%	61,80	96,56%	62,92	96,8%	-	-	70	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah padatahun 2017 memperoleh nilai 61,6 dengan capaian kinerja 99,5%, lalu pada tahun 2018 memperoleh nilai 61,80 dengan capaian 96,56%. Selanjutnya pada tahun 2019 Indeks Reformasi Birokrasi memperoleh nilai 62,92 dengan capaian kinerja 96,8%. Untuk realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 belum ada, karena masih menunggu hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk juga dengan capaian tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Reformasi birokrasi diarahkan pada perubahan di delapan aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, Tata laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumberdaya Manusia, Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Pola Pikir (*mind-set*) serta Budaya Kerja (*culture-set*).Setiap tahun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang semakin membaik.Dengan meningkatnya realisasi Indeks Reformasi Birokrasi dapat didefenisikan bahwa semangat para ASN dilingkup Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya merubah pola pikir dan budaya kerja mulai mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semangat dalam melakukan Reformasi Birokrasi sangat penting mengingat peran kinerja ASN ke depan mempengaruhi kinerja Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pengawasan, akuntabilitas dan reformasi birokrasi dilakukan melalui program:

- Program pembinaan kinerja dan pelayanan publik
- Program penataan dan penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.



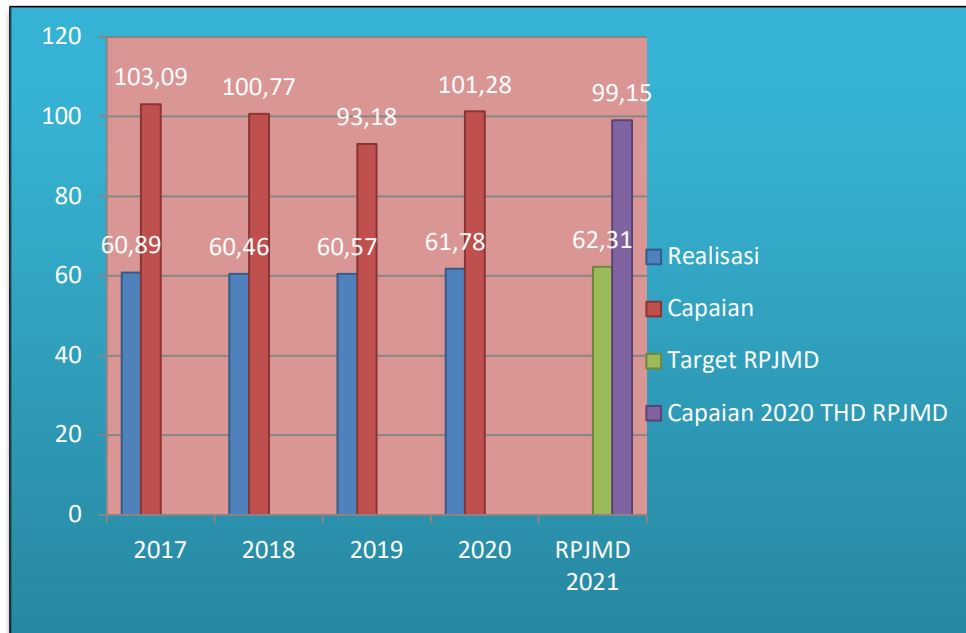
Sasaran Strategis 3 “Tersedianya berbagai infrastruktur yang merata dan memadai” memiliki 5 indikator kinerja, yaitu Persentase kemandapan jaringan jalan dalam kondisi mantap, Persentase rumah tangga pengguna listrik, Persentase rumah tangga pengguna air bersih, Persentase rumah layak huni dan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Rinciannya sebagai berikut :

1. Persentase kemandapan jaringan jalan dalam kondisi mantap

Indikator persentase kemandapan jaringan jalan dalam kondisi mantap ini didukung oleh program penyelenggaraan jalan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

Data persentase kemandapan jaringan jalan dalam kondisi mantap Sulawesi Tengah 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Jaringan jalan dalam kondisi mantap Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

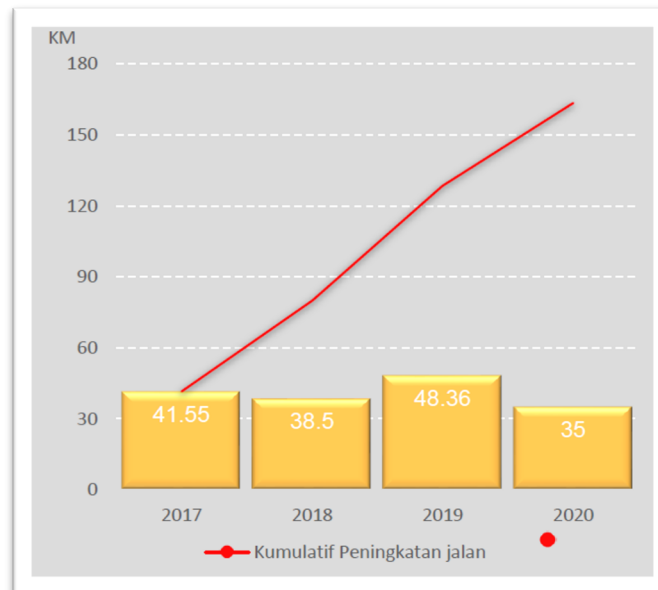


Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase jaringan Jalan dalam kondisi mantap selama 4 tahun berurut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 terealisasi sebesar 60,89% dengan capaian kinerja 103,09%. Terjadi penurunan jaringan jalan dalam kondisi mantap tahun 2018 sebesar 0,71%, dimana tahun 2018 jaringan dalam kondisi mantap tercatat sebesar 60,46% dengan capaian kinerja 100,77%. Selanjutnya tahun 2019 persentase jaringan Jalan dalam kondisi mantap tercatat sebesar 60,57% dengan capaian kinerja 93,18% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 61,78% dengan capaian kinerja 101,28% atau naik 1,99% dibanding tahun 2019. Terhadap target akhir RPJMD, persentase jaringan Jalan dalam kondisi mantap tahun 2020 telah memberikan kontribusi sebesar 99,15%.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Capaian ini dihitung berdasarkan kemantapan seluruh ruas-ruas jalan provinsi di Sulawesi Tengah, yaitu persentase seluruh ruas-ruas jalan provinsi di Sulawesi Tengah (berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 620/299/DIS.BMPR-G.ST/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi) yang berkondisi baik dan sedang terhadap panjang totalnya. Realisasi tahun 2020 adalah 61,78% terhadap

panjang total 1.643,74 km. Peningkatan jalan tahun 2017 s/d 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Akumulatif panjang peningkatan jalan tahun 2017 - 2020



Sumber : DBMPR Prov. Sulteng, 2021

Jika mencermati paket penanganan jalan tahun 2020, beberapa diantaranya adalah paket rehabilitasi bencana alam yang anggarannya pun berasal dari dana Belanja Tak Terduga. Pencapaian ini secara umum didapatkan melalui kegiatan peningkatan jalan sepanjang 35 km yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah, dan APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Selain itu jg pencapaian persentase jaringan jalan kondisi mantap adalah hasil dari kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di ruas-ruas kewenangan provinsi.

Melihat dari sebaran kemantapan jalan di tiap kabupaten yang ada, terdapat beberapa kabupaten yang membutuhkan perhatian yang lebih besar untuk penanganan jalan berupa kegiatan peningkatan jalan. Lebih jauh, bahwa kemantapan jalan tidak dapat dianggap linier dengan panjang jalan yang ditingkatkan kondisinya, sebab kondisi jalan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu penentuan kondisinya berdasarkan data hasil survei. Survei dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan dengan menggunakan metode SDI. *Surface distress index* (SDI) adalah indeks nilai perkerasan jalan yang didapat dari survey kondisi jalan yang diusulkan oleh Bina Marga. SDI membagi kondisi jalan menjadi 4, yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak

ringan dan kondisi rusak berat. Menurut RCS (*Road Condition System*) atau SKJ (*Survey Kondisi Jalan*) 2011, hanya ada 4 unsur yang dipergunakan sebagai dukungan untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu : % luas retak, rata-rata lebar retak, jumlah lubang per km, dan rata-rata kedalaman rutting bekas roda.

2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Data Realisasi dan capaian Persentase rumah tangga pengguna listrik 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase rumah tangga pengguna listrik Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	79,56%	92,8%	87,31%	99,32%	94,67%	100,7%	97,01%	108,04%	98	98,98%

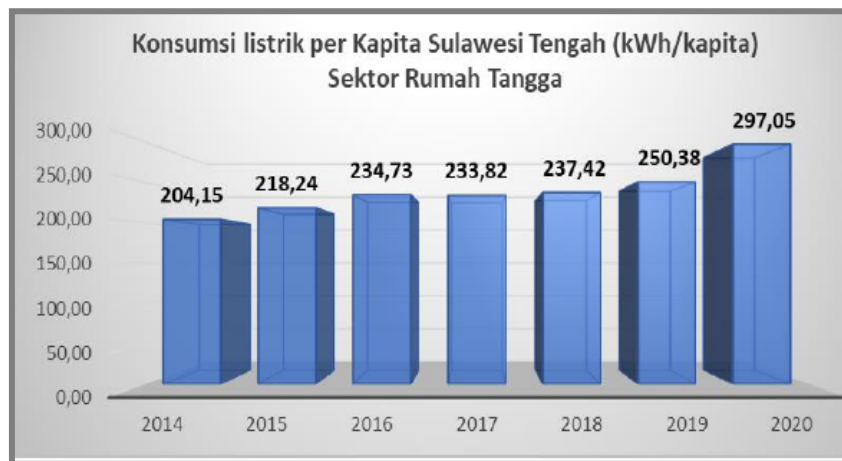
Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik mengalami kenaikan selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga pengguna listrik di Sulawesi Tengah tercatat sebesar 79,56% dengan capaian kinerja 92,8%. Terjadi peningkatan 9,74% pada tahun 2018, dimana persentase pengguna listrik menjadi 87,31% dengan capaian kinerja 99,32%. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase rumah tangga pengguna listrik naik lagi menjadi 94,67% dengan capaian kinerja mencapai 100,7% dan persentase rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2020 tercapai sebesar 97,01% dengan capaian kinerja mencapai 108,04%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 persentase rumah tangga pengguna listrik telah memberikan kontribusi sebesar 98,98%.

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian, kebutuhan energi listrik juga turut meningkat. Selain penggunaan energi fosil untuk pembangkitan tenaga listrik yang lambat laun mulai dikurangi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM mengoptimalkan pengelolaan energi daerah yang berasal dari energi baru terbarukan. Hal ini menjadi salah satu sasaran strategis dengan nilai konsumsi listrik per kapita yang

diharapkan meningkat tiap tahunnya. Nilai konsumsi listrik per kapita menjadi indikator tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah.

Nilai konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah khusus untuk sektor rumah tangga meningkat, dari yang semula 250,4 kWh/kapita di tahun 2019 meningkat menjadi 297,05 kWh/ kapita di tahun 2020. Adapun data runtun waktu konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah sektor rumah tangga dapat dilihat pada gambar berikut :

Konsumsi listrik per Kapita Sulawesi Tengah (kWh/kapita) Sektor Rumah Tangga



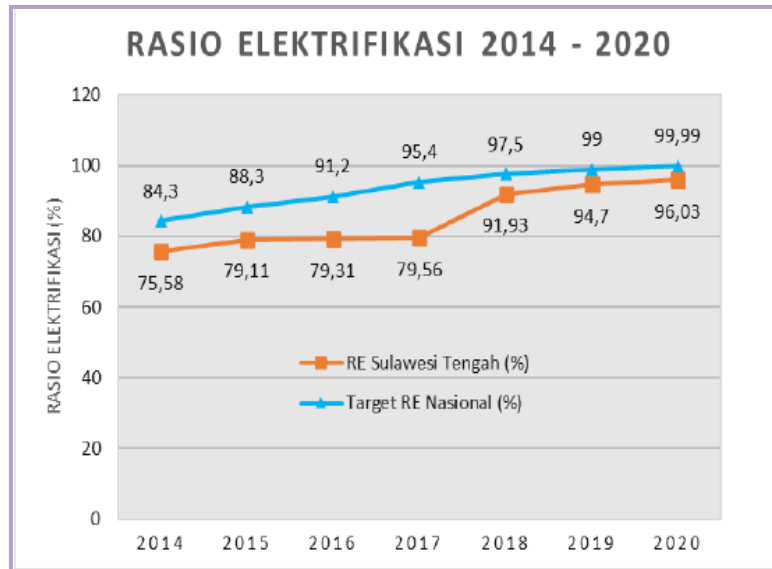
Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

Dari data yang tersaji pada grafik di atas, rata-rata pertumbuhan nilai konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah dari sector rumah tangga dari tahun 2014 sampai tahun 2020 berada di angka 7%. Jika dihitung secara keseluruhan (termasuk sektor rumah tangga, sosial, bisnis, industri, pemerintahan dan layanan khusus), konsumsi listrik per kapita Sulawesi Tengah mencapai 429 kWh/kapita. Nilai ini masih jauh di bawah angka nasional yaitu 1.142 kWh/kapita di tahun 2020. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas ESDM masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan melalui program-program pengembangan ketenagalistrikan dan pengembangan energi baru terbarukan.

Selanjutnya rasio elektrifikasi rumah tangga meningkat sebesar 1,33% menjadi 96,03% di tahun 2020 dari angka tahun sebelumnya yaitu 94,7%. Walaupun terjadi peningkatan, rasio elektrifikasi (RE) Provinsi Sulawesi Tengah masih jauh di bawah target

RE nasional yaitu sebesar 99%. Grafik berikut menunjukkan peningkatan rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah dan rasio elektrifikasi nasional selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

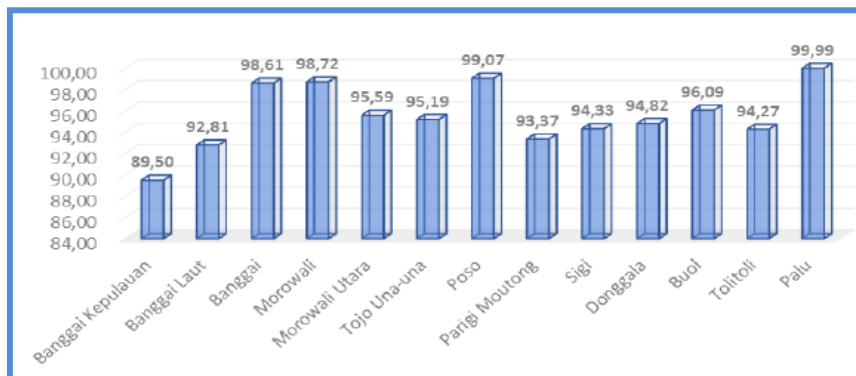
Trend Rasio Elektrifikasi Periode 2014 – 2020



Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

Rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijabarkan lagi menjadi rasio elektrifikasi tiap kabupaten/kota, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

Rasio Elektrifikasi Kab/Kota Sulawesi Tengah Tahun 2020



Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

Rasio elektrifikasi ini adalah penjumlahan rasio elektrifikasi yang dihasilkan oleh PLN dan rasio elektrifikasi yang didukung oleh sumber listrik alternatif lainnya. Dari gambar di atas terlihat bahwa Kota Palu memiliki rasio elektrifikasi terbesar yaitu 99,99%, sedangkan Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki rasio elektrifikasi terendah yaitu 89,5%. Namun, jika dilihat dari elektrifikasi yang dilaksanakan oleh PLN, Kabupaten Banggai Laut berada di posisi terendah yaitu 72,03%. Hal ini dikarenakan oleh topografi Kabupaten Banggai Laut

yang merupakan daerah kepulauan. Jaringan ketenagalistrikan PLN belum dapat menjangkau pulau-pulau kecil dan tersebar disebabkan keterbatasan akses masuk untuk pembangunan jaringan transmisi dan distribusi. Kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah juga menjadi salah satu kendala peningkatan rasio elektrifikasi. Selain itu, Dinas memiliki keterbatasan anggaran dalam hal penyambungan meteran listrik gratis bagi daerah yang telah dilalui jaringan listrik PLN dan dikhususkan untuk masyarakat yang masuk ke dalam kelompok Rumah Tangga Sasaran (RTS). Instalasi infrastruktur ketenagalistrikan oleh Dinas yang bersumber dari energi baru terbarukan seperti pemasangan Solar Home System (SHS), Lampu Tenaga Surya Hemat Listrik (LTSHE), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan lain sebagainya juga sangat terbatas tiap tahunnya. Untuk itu, anggaran untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi untuk dapat berkontribusi lebih terhadap peningkatan rasio elektrifikasi.

Salah satu faktor peningkatan jumlah rumah tangga pengguna listrik tahun 2020 adalah melalui pemasangan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga yang belum berlistrik dengan kriteria tidak mampu dengan kapasitas daya 450 VA untuk 3 titik mata lampu dan 1 titik kotak kontak yang tersebar pada beberapa wilayah di Kabupaten Parigi Moutong yaitu di Desa Pande Kecamatan Moutong, Desa Uevolo Kecamatan Siniu, Desa Marantale Kecamatan Siniu dan Desa Dusunan Kecamatan Tinombo. Adapun lokasi pengadaan instalasi dan sambungan listrik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Lokasi pemasangan instalasi dan sambungan listrik gratis
Tahun 2020**

Kabupaten	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Sambungan
Parigi Moutong	Moutong	Pande	47 SR
	Siniu	Uevolo	19 SR
		Marantale	29 SR
	Tinombo	Dusunan	23 SR
Total Sambungan			118 SR

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

Upaya pemerintah dalam pencapaian indikator persentase rumah tangga pengguna listrik didukung oleh kegiatan antara lain :

1. Inventarisasi dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan
2. Survey Pengembangan Ketenagalistrikan
3. Pengusahaan Ketenagalistrikan
4. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan

3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Realisasi dan capaian kinerja Persentase rumah tangga pengguna air bersih dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase

rumah tangga pengguna air bersih Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna air bersih	59,26%	100%	60,10%	96,28%	60,10%	97,74%	75,38%	105,08%	72	104,07%

Gambar diatas menunjukkan bahwa Persentase rumah tangga pengguna air bersih tahun 2017 terealisasi sebesar 59,26% dengan capaian kinerja mencapai 100%.Terjadi peningkatan sebesar 1,84% pada tahun 2018, dimana tahun 2018 persentase rumah tangga pengguna air bersih terealisasi 60,10% dengan capaian kinerja 96,28%. Selanjutnya tahun 2019 Persentase rumah tangga pengguna air bersih masih sama dengan kondisi tahun 2018 yaitu sebesar 60,10% dengan capaian kinerja 97,74%. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan 25,42% dibandingkan tahun 2019 dengan realisasi sebesar 75,38% dan capaian kinerja 105,08%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 telah tercapai sebesar 104,07%.

Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang terbesar di Sulawesi Tengah yaitu di kota palu, lalu di urutan kedua dan ketiga adalah Kabupten Tojo Una-Una sebesar 90,02% dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 89,74%. Adapun persentase rumah tangga pengguna air tidak bersih di Sulawesi Tengah sebesar 24,62%, dimana persentase

tertinggi adalah Kabupaten Sigi sebesar 48,13% dan Kabupaten Donggala 40,06%. Berikut data persentase rumah tangga pengguna air bersih tahun 2020.

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Sumber air minum bersih	
	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	89,74	10,26
2. Banggai	77,17	22,83
3. Morowali	81,88	18,12
4. Poso	80,86	19,14
5. Donggala	59,94	40,06
6. Toli Toli	78,01	21,99
7. Buol	80,81	19,19
8. Parigi Moutong	64,33	35,67
9. Tojo Una Una	90,02	9,98
10. Sigi	51,87	48,13
11. Banggai Laut	81,60	18,40
12. Morowali Utara	76,89	23,11
71. Palu	92,43	7,57
Sulawesi Tengah	75,38	24,62

Sumber : BPS Sulteng, 2021

4. Persentase Rumah Layak Huni

Data realisasi dan capaian kinerja Persentase rumah layak huni 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase rumah layak huni Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Layak Huni	70,02%	99,9%	74,74%	104,09%	62,86%	86,88%	68,65%	93,46%	74,55%	92,08%

Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja rumah layak huni selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 rumah layak huni tercatat sebesar 70,02% dengan capaian kinerja 99,9%. Kemudian tahun 2018 naik 4,72% hingga terealisasi sebesar 74,74% dengan capaian kinerja mencapai 104,9%. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase rumah layak huni turun sebesar 11,88% karena hanya terealisasi sebesar 62,86% dengan capaian kinerja 86,88%, lalu pada tahun 2020 terealisasi sebesar 68,65% dengan capaian kinerja 93,46% atau naik 9,21% dibanding tahun 2019. Terhadap target RPJMD tahun 2021 persentase rumah layak huni tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 92,08%.

Pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru. Pembangunan/pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 1,1% pertahun hingga tahun 2021. pada tahun 2020 jumlah total rumah meningkat lagi menjadi 692.306 unit, dengan jumlah rumah tidak layak huni sebesar 217.042 unit dan rumah layak huni sebesar 475.264 unit yang dilaksanakan dengan menggunakan alokasi dana APBD, APBD Kab/Kota, APBN dan NGO.

Data kondisi perumahan tidak layak huni dan layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Kondisi Perumahan Di Sulawesi Tengah Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	DATA		
		Jumlah Rumah (unit)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Rumah Layak Huni (Unit)
1	Kota Palu	76.088	37.470	37.054
2	Kabupaten Donggala	71.289	23.123	49.731
3	Kabupaten Parigi Moutong	109.214	24.541	84.673
4	Kabupaten Poso	57.134	5.627	51.507
5	Kabupaten Tojo Una-una	34.461	9.693	24.768
6	Kabupaten Banggai	88.366	13.705	74.661
7	Kabupaten Morowali	26.918	7.229	19.689
8	Kabupaten Toli-toli	53.086	21.485	31.601
9	Kabupaten Buol	37.968	10.426	27.542
10	Kabupaten Banggai Kepulauan	30.202	15.632	14.570
11	Kabupaten Sigi	58.967	34.718	24.258
12	Kabupaten Banggai laut	19.666	7.333	12.333
13	Kabupaten Morowali utara	28.938	6.061	22.877
	Jumlah Total	692.306	217.042	475.264

Sumber :Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulteng 2021

5. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Realisasi dan capaian kinerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	12,69%	106,9%	13,60%	112,77%	15,13%	107,5%	13,4%	90,85%	15,45%	86,73%

Dari gambar diatas terlihat bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB selama 4 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2017 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tercatat sebesar 12,69% dengan capaian kinerja 106,9% lalu pada tahun 2018 meningkat menjadi 13,60% dengan capaian kinerja 112,77%. Selanjutnya pada tahun 2019 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 15,13% dengan capaian kinerja mencapai 107,5% atau turun 10,11% dibanding tahun 2018 dan pada tahun 2020 realisasi kembali turun lagi 12,91% yaitu 13,4% dengan capaian kinerja 90,85%. Terhadap target akhir RPJMD, pencapaian tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 86,73%.

Walaupun persentasi kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun nilai rupiahnya meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai rupiah ini salah satunya dipengaruhi oleh nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Data PNBPN Sektor Pertambangan Sulawesi Tengah Tahun 2020

Periode data 02 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020			
Jenis PNBPN	Kas Negara (Rp)	Hasil Rekonsiliasi (Rp)	Ket.
Iuran Tetap	12.961.149.123	12.961.149.123	Sama
Royalti	546.755.762.245	546.755.762.245	Sama
Penjualan Hasil Tambang	0	0	Sama
Jumlah	559.716.911.368	559.716.911.368	Sama

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

PDRB sektor pertambangan dan penggalian atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebesar 26456 milyar rupiah dan harga konstan 2010 sebesar 22040 milyar rupiah. Data runtun waktu dari PDRB sektor pertambangan dan penggalian ditunjukkan pada tabel berikut :

**PDRB Sulawesi Tengah Sektor Pertambangan dan Penggalian
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010
Periode 2018 – 2020 (Milyar Rupiah)**

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pertambangan dan Penggalian	21.468	24.863	26.456	17.552	19.972	22040

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sulteng, 2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa PDRB sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Sulawesi Tengah mengalami trend naik dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Laju pertumbuhan rata-rata dari tahun 2018 hingga 2020 sebesar 15,62%. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan program pendukung pencapaian peningkatan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator kontribusi PDRB terhadap sektor pertambangan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Terdiri dari 5 kegiatan yaitu : (1) Inventarisasi Potensi Pengusahaan Mineral dan Batubara, (2) Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (3) Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara, (4) Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan, (5) Inventarisasi Lahan Terganggu dan Pertambangan Rakyat .
2. Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah
Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi air tanah yang cukup besar dengan total luas cekungan air tanah 10.713 km². Namun, pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih belum optimal. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur air bersih di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya yang bersumber dari air tanah. Rendahnya pembangunan infrastuktur air tanah juga disebabkan belum terpetakannya daerah sulit air di kawasan Sulawesi Tengah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah, (2) Inventarisasi Data Geologi dan Air Tanah, (3) Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah, (4) Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah.



Sasaran menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja persentase penduduk diatas garis kemiskinan ini didukung oleh program :

1. Program penanganan fakir miskin
2. Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
3. Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
5. Program perlindungan sosial korban bencana alam
6. Program Perlindungan sosial korban bencana sosial
7. Program Jaminan sosial keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH)

Data realisasi dan capaian kinerja persentase penduduk diatas garis kemiskinan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

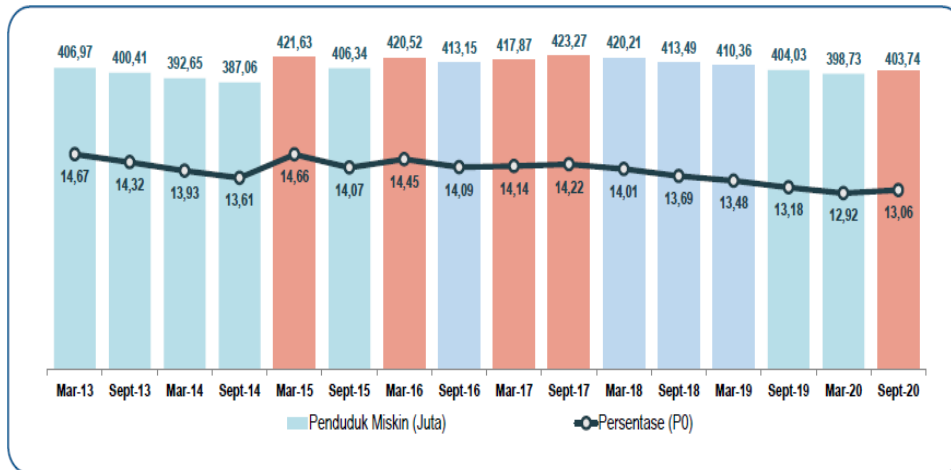
No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	85,8%	97,6%	86,2%	99,65%	86,82%	99,7%	99,92%	86%	85,91-86,31%	79%

Tabel diatas menggambarkan bahwa persentase penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah yang berada diatas garis kemiskinan pada tahun 2017 adalah sebesar 85,8% dengan capaian kinerja mencapai 97,6%. Terjadi kenaikan 0,4% pada tahun 2018 dimana persentase penduduk diatas garis kemiskinan terealisasi sebesar 86,2% dengan capaian kinerja 99,65%. Sedangkan pada tahun 2019 persentase penduduk diatas garis kemiskinan terealisasi sebesar 86,82% dengan capaian kinerja 99,7%. Selanjutnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 99,92% dengan capaian kinerja 86%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, persentase penduduk diatas garis kemiskinan pada tahu 2020 ini telah mencapai 79%.

Tahun 2020 (posisi bulan September) penduduk miskin tercatat sebesar 13,06% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 403,74 ribu orang. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 501 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2020. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebesar 670 ribu orang sedangkan daerah perdesaan turun sebesar 169 ribu orang.

Secara umum, pada periode Maret 2013-September 2019 tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2019. Setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin kembali meningkat. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2013 sampai dengan September 2020 ditunjukkan oleh gambar berikut.

Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Sulawesi Tengah Tahun 2012- 2020



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2021

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2020 tercatat sebesar 76,56 persen. Kondisi meningkat dibanding Maret 2020 yaitu sebesar 76,54 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, adalah beras, rokok kretek filter, kue basah, telur ayam ras, tongkol/tuna/cakalang, gula pasir, mie instan, cabe rawit, bawang merah, dan kopi bubuk/kopi instan (sachet). Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan yang besar pengaruhnya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Upaya-upaya pengurangan kesenjangan dengan memfokuskan pembangunan dikawasan pedesaan menjadi prioritas dengan pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir Sulawesi Tengah merupakan daerah tertinggal dan miskin. Perencanaan tata ruang juga mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan daya dukung lingkungan. Selain itu upaya peningkatan pendapatan untuk mendorong pengentasan kemiskinan juga perlu dilakukan dengan memfokuskan program penanggulangan kemiskinan di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan. Sinergi program pengentasan kemiskinan termasuk dengan pihak non pemerintah dilakukan untuk menguatkan fokus program pengentasan kemiskinan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2020-September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2020 adalah 2,58 dan pada September 2020 naik menjadi 2,78. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,77 menjadi 0,87 pada periode yang sama.

Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sulawesi Tengah menurut daerah posisi September 2019 – September 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Sulawesi Tengah menurut daerah posisi Sep 2019- Sep 2020

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)			
September 2019	1,98	3,71	3,19
Maret 2020	1,68	2,96	2,58
September 2020	1,83	3,20	2,78
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P₂)			
September 2019	0,54	1,41	1,15
Maret 2020	0,43	0,92	0,77
September 2020	0,43	1,07	0,87

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,83 sementara di daerah perdesaan jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 3,20. Sementara itu nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,43 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 1,07.

Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2020-September 2020 antara lain adalah:

1. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan September 2020 turun sebesar 2,13 persen menjadi 94,59 dari 96,72 pada Maret 2020.
2. Laju inflasi Maret 2020 – September 2020 turun sebesar 0,06 persen poin menjadi 0,92 dari 0,98 pada September 2019 – Maret 2020.
3. TPT Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,79% menjadi 3,77% dari 2,98% pada Februari 2020.
4. Beberapa komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan mengalami peningkatan harga, seperti: tongkol/tuna/cakalang, daging, susu, dan cabe.

Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para stakeholder dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah bersama instansi terkait akan mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah yang harus dibangun terus-menerus yaitu :

1. Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*);
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*);
3. Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan.



Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi dengan indikator kinerja indeks gini. Indeks gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.

Data realisasi dan capaian Indeks Gini di Sulawesi Tengah 4 tahun dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks gini Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

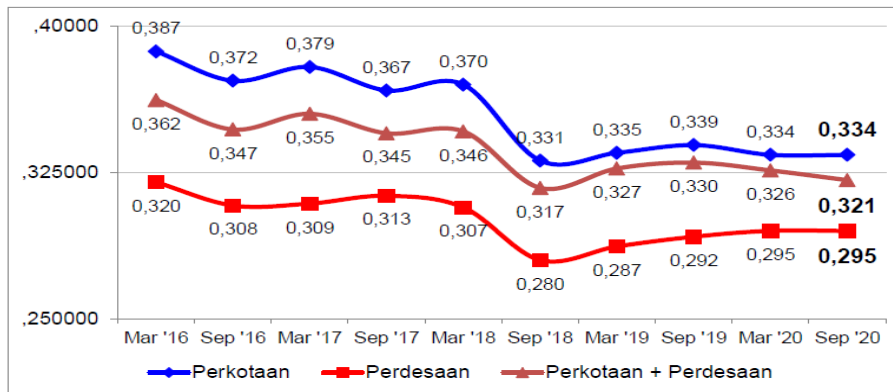
No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Indeks Gini	0,345	127,5%	0,317%	111,30%	0,330	95,9%	0,321	91,71%	0,31-0,35	91,71%

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi realisasi indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2017 indeks gini tercatat sebesar 0,345 dengan capaian kinerja sebesar 127,5%. Tahun 2018 turun menjadi 0,317 dengan capaian kinerja sebesar 111,30%, lalu pada tahun 2019 kembali terjadi kenaikan hingga mencapai 0,330 dengan capaian kinerja 95,9%. Selanjutnya pada tahun 2020 indeks gini mencapai 0,321 dengan capaian kinerja 91,71%, terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 pencapaian kinerja indeks gini sama dengan tahun 2020 yaitu sebesar 91,71%.

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,009 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,330, sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,326, angka tersebut turun sebesar 0,005 poin.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 0,334, turun dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,339, dan stagnan dibanding keadaan Maret 2020 yang juga sebesar 0,334. Di daerah perdesaan Gini Ratio pada September 2020 sebesar 0,295, stagnan dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang juga sebesar 0,295, namun naik dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,292. Gambar berikut perkembangan Gini Ratio di Sulawesi Tengah.

Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Tengah Maret 2016 – September 2020



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah selama periode Maret 2016 - September 2020 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2016 hingga September 2018 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 hingga September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2018 hingga September 2019 nilainya mengalami sedikit peningkatan, dan selanjutnya kembali menunjukkan trend penurunan hingga September 2020.

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,92 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2020 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 20,48 persen, maupun dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 20,62 persen. Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Gini Ratio, ukuran ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan, meskipun masih pada kategori rendah.

Faktor utama yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2020 adalah perubahan pengeluaran per kapita penduduk. Berdasarkan data Susenas, tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan yang lebih besar dibanding penduduk kelompok 40 persen terbawah. Pada kelompok penduduk 20 persen teratas

penurunan tersebut mencapai 3,24 persen, sedangkan pada kelompok 40 persen terbawah hanya menurun sebesar 1,16 persen.

Selama periode September 2019 - September 2020, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah merupakan yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi, baik secara total maupun menurut kategori wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada skala nasional, posisi nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah dalam setahun terakhir relatif stagnan. Pada September 2019 nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah berada pada urutan ke-11 terendah se-Indonesia, sedangkan pada Maret 2020 posisi tersebut hanya naik satu peringkat ke posisi 10, dan bertahan hingga September 2020. Gini Ratio menurut provinsi Se-Sulawesi periode Sep 2019 – Sep 2020 tersaji pada tabel berikut.

Gini Ratio Provinsi Se-Sulawesi Periode Sep 2019-Sep 2020

Kode	PROVINSI	September 2019			Maret 2020			September 2020		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)
71	Sulawesi Utara	0,375	0,346	0,376	0,371	0,344	0,370	0,367	0,346	0,368
72	Sulawesi Tengah	0,339	0,292	0,330	0,334	0,295	0,326	0,334	0,295	0,321
73	Sulawesi Selatan	0,393	0,354	0,391	0,384	0,356	0,389	0,384	0,352	0,382
74	Sulawesi Tenggara	0,402	0,353	0,393	0,404	0,347	0,389	0,403	0,348	0,388
75	Gorontalo	0,399	0,393	0,410	0,393	0,392	0,408	0,390	0,391	0,406
76	Sulawesi Barat	0,438	0,320	0,365	0,436	0,321	0,364	0,437	0,321	0,356
	INDONESIA	0,391	0,315	0,380	0,393	0,317	0,381	0,399	0,319	0,385

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2021



Indikator persentase koperasi aktif ini didukung oleh program :

1. Program Pemberdayaan Koperasi;
2. Program Pengembangan Balai Latihan Koperasi;

Data capaian persentase koperasi aktif 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase
koperasi aktif Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020
terhadap Target akhir RPJMD**

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Koperasi Aktif	64,1%	97,8%	73,44	111,93%	57%	86,8%	55,50%	84,44%	65,78	84,37%

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase koperasi aktif di Sulawesi Tengah selama empat tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 koperasi aktif tercatat sebesar 64,1% dengan persentase capaian kinerja 97,8%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018, dimana koperasi aktif tahun 2018 terealisasi sebesar 73,44% dengan capaian kinerja mencapai 111,64%. Selanjutnya pada tahun 2019 koperasi aktif mengalami penurunan sebesar 16,44% karena hanya terealisasi sebesar 57% dengan capaian kinerja 86,80%, lalu pada tahun 2020 koperasi aktif hanya terealisasi sebesar 55,50% dengan capaian kinerja 84,44% atau turun 2,70% dibanding tahun 2019. Terhadap target akhir RPJMD, capaian koperasi aktif tahun 2020 ini telah terealisasi sebesar 84,44%.

Indikator meningkatnya koperasi aktif dapat diukur dengan bertambahnya kelembagaan koperasi yang berkualitas. Koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia. Peranan koperasi dalam pembangunan perekonomian ialah menghimpun skala-skala usaha kecil dan menjadikannya lebih besar dengan segala aspeknya. Koperasi juga digunakan sebagai alat untuk memberantas para rentenir yang banyak terdapat di daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat dipedesaan belum memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk mengembangkan usahanya sendiri karena mereka memerlukan bantuan dan bimbingan dari pemerintah melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan koperasi lainnya yang dapat memberikan pelayanan kepada setiap anggotanya terutama dalam menyediakan pangan dan kebutuhan lainnya. Pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat 2.160 unit koperasi, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 1199 unit atau 55,50% dan koperasi tidak aktif sebanyak 961 unit atau 44,49%. Pada tahun 2020 jumlah koperasi bertambah sebesar 73 koperasi atau 3,38% dari jumlah koperasi tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan koperasi di beberapa daerah.

Berikut data jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir :

Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif**Tahun 2016- 2020 (dalam unit)**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi Aktif	1.526	1.469	1.576	1.189	1.199
2	Koperasi Tidak aktif	712	604	570	898	961
	Jumlah	2.238	2.073	2.146	2.087	2.160

Sumber :Dinas Koperasi UKM Prov Sulteng, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10 unit koperasi atau kenaikan0,83% dari jumlah koperasi aktif tahun 2019, sedangkan koperasi tidak aktif tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 63 unit koperasi atau7,01% dari tahun 2019. Sangat dibutuhkan peran aktif Pemerintah Daerah baik dari segi pembinaan maupun dari segi pemberdayaan. Dan yang terpenting lagi keseriusan pengurus koperasi dalam melaksanakan kewajibannya khususnya pelaksanaan RAT sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan.

Peningkatan kinerja koperasi aktif ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. jumlah koperasi aktif secara keseluruhan kabupaten Kota tahun 2020 bertambah sebesar 10 unit usaha menjadi 1.199 Unit dari tahun 2019 sebesar 1.189 Unit Usaha melalui tolok ukur Jumlah Koperasi yang RAT Tahun 2020 sebesar 30 Unit Usaha.
2. Selisih Hasil Usaha (SHU) di tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 3.180.750.000.000 menjadi 4.372.032.000.000 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 7.552.782.000.000.
3. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi berdampak pada aktifnya koperasi yang sebelumnya tidak aktif, kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian Kesehatan Koperasi berdampak pada peningkatan Unit Koperasi setelah dilakukan tahap penilaian dapat dikualifikasikan menjadi koperasi sehat, Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang berdampak pada kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan berhasil menumbuhkan koperasi baru. Akan tetapi dari dampak

pandemi Covid-19 mengakibatkan pengurangan produksi sehingga menyebabkan turunnya angka produksi.

4. Komitmen dan kerjasama yang baik oleh para pejabat maupun para staf Perangkat Daerah untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan.



Sasaran Strategis 7 “Meningkatnya daya saing, efisiensi dan produktifitas perdagangan” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan Ekspor bersih perdagangan. Rinciannya sebagai berikut :

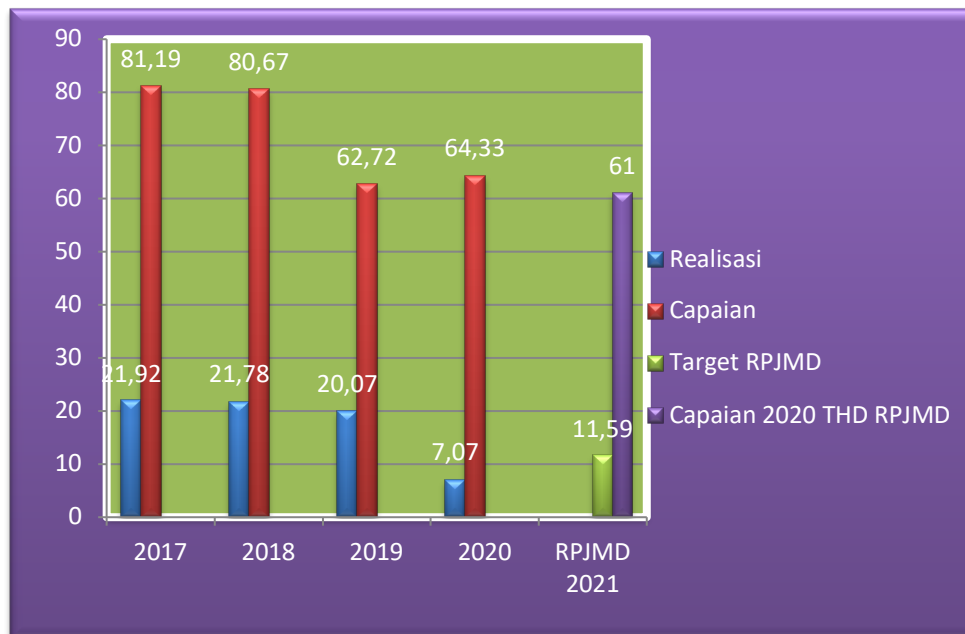
1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Indikator Kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ini didukung oleh program :

1. Program pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri.
2. Program pengembangan dan pengamanan perdagangan luar negeri.

Data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :

Perbandingan realisasidan capaian kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 21,92% dengan capaian kinerja sebesar 81,19%, lalu pada tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 21,78% dengan capaian kinerja sebesar 80,67%. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan 8,52% dimana kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tercatat sebesar 20,07% dengan capaian kinerja hanya sebesar 64,72%. Selanjutnya pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunan 18,38 dengan realisasi sebesar 7,07% dan capaian kinerja sebesar 64,33%. Terhadap target akhir RPJMD 2021, pencapaian kinerja tahun 2020 telah memberikan kontribusi sebesar 61%.

Realisasi nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun 2020 merupakan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga nilai kontribusi sektor perdagangan yang tercapai lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Ekonomi Sulawesi

Tengah tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 (*c-to-c*) tumbuh 4,86%. Pertumbuhan terjadi pada 9 dari 17 lapangan usaha. Lima lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 23,68%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,36 %; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,80%; Informasi dan Komunikasi sebesar 8,56%; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,11%. Sedangkan 8 lapangan usaha mengalami kontraksi. Tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi terbesar yaitu lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 33,12%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,05%; serta Konstruksi sebesar 8,47%.

Dilihat dari sumber pertumbuhan, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 4,86% (*c-to-c*) tersebut paling besar disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,46%, diikuti lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,62 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,30%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,17%. Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha tahun 2020 masih didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (27,61%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,76%); Pertambangan dan Penggalian (13,40%); serta Konstruksi (10,14%).

Selama tahun 2020, perekonomian di Sulawesi Tengah terus dibayang-bayangi kontraksi atau tekanan yang menyebabkan pelemahan akibat adanya pandemi COVID-19 yang telah lebih dulu meluluhlantakkan perekonomian sejumlah wilayah di Indonesia dan negara lainnya. Pandemi ini menyebabkan *supply demand* terganggu sebagai akibat adanya penerapan protokol kesehatan, dikarenakan beberapa negara pengimpor menerapkan sistem *lockdown* membuat pengiriman barang memakan waktu yang lama hingga biaya pengiriman logistik pun bertambah dan berpengaruh terhadap harga jual barang impor. Di tingkat nasional ketersediaan barang pokok seperti cabai lebih dipengaruhi oleh faktor alam/cuaca, sedangkan ikan segar dipengaruhi oleh cuaca serta waktu pasang surutnya air laut.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama tahun 2020 melakukan Pasar Murah dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah. Selain Pasar Murah dilakukan juga operasi pasar gula saat harga jual gula melonjak di tahun 2020.

Pencapaian target kinerja presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh banyak faktor pada sektor-sektor perdagangan yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada pendapatan domestik regional bruto di tiap provinsi termasuk provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi sektor perdagangan tidak hanya disumbang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda saja, namun sektor lain juga termasuk dalam perhitungan analisis kontribusi yang mempengaruhi PDRB seperti sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Sehingga kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, namun juga menjadi tanggung jawab bersama dengan Perangkat Daerah lain yang kewenangannya berkaitan langsung dengan sektor perekonomian. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah, secara teknis pelaksanaannya dilimpahkan pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen sebagai salah satu bidang teknis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi melalui Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri. Bidang Perdagangan Dalam Negeri berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang :

- a. Pengembangan sarana distribusi
- b. Pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- c. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

3. Ekspor Bersih Perdagangan

Indikator Kinerja ekspor bersih perdagangan ini didukung oleh program:

1. Program pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri.
2. Program pengembangan dan pengamanan perdagangan luar negeri.

Data ekspor bersih perdagangan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja ekspor bersih perdagangan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Ekspor bersih perdagangan	US\$1.734,23	192,69%	US\$2.288.10	254,23%	US\$2.758,55	275,86%	US\$5.095,71	463,25%	US\$5.000,00	237,53%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi ekspor bersih perdagangan selama 4 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Ekspor bersih perdagangan tahun 2017 tercatat sebesar US\$ 1.734.23 dengan capaian kinerja 192,69%, lalu pada tahun 2018 terealisasi sebesar US\$ 2.288.10 dengan capaian kinerja mencapai 254,23%. Kemudian pada tahun 2019 ekspor bersih perdagangan terealisasi sebesar US\$ 2.758.55 atau naik sebesar 20,56% dibanding tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 ekspor bersih perdagangan mengalami peningkatan yang signifikan 84,72% dibanding tahun 2019 dengan realisasi sebesar US\$5.095,71 dengan capaian kinerja 436,25%. Sehingga terhadap target akhir RPJMD, pencapaian tahun 2020 ini sebesar 237,53% melebihi target yang telah ditetapkan.

Selama Januari-Desember 2020, total nilai ekspor Sulawesi Tengah tercatat US\$ 7.480,65 juta atau meningkat US\$ 1.587,18 juta (26,93%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar US\$ 5.893,47 juta. Jika dirinci, ekspor melalui Sulawesi Tengah senilai US\$ 7.428,46 juta dan provinsi lain senilai US\$ 52,19 juta. Sementara jumlah nilai Impor selama Januari-Desember 2020, terjadi penurunan US\$ 749,98 juta atau sebesar 23,92% menjadi US\$ 2.384,94 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dilihat dari neraca perdagangan dengan seluruh negara mitra dagang, Sulawesi Tengah mengalami surplus senilai US\$ 472,28 juta selama Desember 2020 dan surplus senilai US\$ 5.095,71 juta selama Januari-Desember 2020.

Selama Januari-Desember 2020, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa eksporsenilai US\$ 6.408,39 juta atau 85,67% dari total ekspor dan bahan bakar mineral senilaiUS\$ 846,90 juta (11,32%). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditaslainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 2,00%.Peningkatan aktifitas ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2020, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan Mineral dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang. Perkembangan nilai dan volume ekspor dapat dilihat pada tabel berikut :

Ekspor berdasarkan Nilai Tahun 2013-2020 (US\$ Juta)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020**
Non Migas	276	46	283	647	1,924	3,632.92	4,771.60	6.633,75
- Hasil Industri	229	24	122	638	1,905	3,615.98	4,664.44	6.564,77
- Non Industri	46	22	161	9	19	16.94	107.16	68,98
Migas	22	35	200	623	1,098	1,476.26	1,121.87	846,9
Total Ekspor	297	81	482	1270	3,022	5,109.18	5,893.47	7.480,65

Sumber :Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2021

*(** data sementara berdasar data BPS Ekspor-Impor Sulawesi Tengah Jan-Des Tahun 2020)*

Adapun Laporan Ekspor tahun 2020 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak US\$ 3.434,44Juta, sedangkan laporan ekspor tahun 2020 BPS Sulteng berdasarkan Dokumen PEB selama Januari-Desember 2020, tercatat sebesar US\$ 7.480,65 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$ 7.428,46 juta dan provinsi lain senilai US\$ 52,19 juta dan dapat dilihat perkembangannya pada tabel Kinerja Ekspor Daerah tahun 2020 berikut :

Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2020 (US\$ Juta)

BULAN	BPS			SKA		
	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	IMPOR (JUTA US\$)	EKSPOR BERSIH (JUTA US\$)	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	FORM TERJUAL (SET)	NEGARA TUJUAN EKSPOR TERBANYAK
JANUARI	628,45	93,19	535,26	146,88	149	VIETNAM
FEBRUARI	512,90	216,99	295,91	93,92	102	RUSIA
MARET	641,28	165,16	476,12	464,53	301	VIETNAM
APRIL	563,30	111,06	452,24	664,65	272	VIETNAM
MEI	595,87	178,43	417,44	160,76	153	VIETNAM
JUNI	486,20	148,66	337,54	253,80	268	CHINA
JULI	595,33	159,54	435,79	372,64	178	VIETNAM
AGUSTUS	578,24	177,02	401,22	150,75	147	VIETNAM
SEPTEMBER	702,66	300,23	402,43	254,33	261	VIETNAM
OKTOBER	652,13	135,41	516,72	219,76	155	VIETNAM
NOPEMBER	707,48	354,71	352,77	353,37	209	VIETNAM
DESEMBER	816,82	344,54	472,28	299,05	219	VIETNAM
TOTAL	7.480,65	2.384,94	5.095,71	3.434,44	2.414	

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2021

Realisasi ekspor menurut negara tujuan berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah tahun 2020, ekspor ke negara Vietnam mendominasi transaksi tahun 2020 dengan realisasi sebesar US\$ 3.086,72 Juta atau 89,87% dari total transaksi tahun 2020. Rekapitulasi ekspor menurut negara tujuan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2020 (SKA)

No	Negara	Jenis SKA	Jumlah Form	Jumlah Perusahaan	FOB	Volume
1	BELGIUM	FOR M A	17	1	17.825.218,74	14.130,25
2	CANADA		2	1	117.453,43	62,12
3	GERMANY		9	1	3.989.153,61	1.417,10
4	ESTONIA		1	1	366.023,38	126.202,00
5	SPAIN		3	1	3.499.514,10	597,55
6	UNITED KINGDOM		3	1	534.611,24	306,84
7	ITALY		49	3	167.411.418,45	101.999,09
8	POLAND		25	2	10.992.498,30	66.940,86
9	SLOVENIA		2	1	324.132,94	161,4
10	UNITED STATES OF AMERICA		28	2	1.522.856,62	655.192,12
11	VIET NAM		54	1	14.202.521,59	8.604,18
12	UNITED ARAB EMIRATES	FOR M B	9	2	853.356,84	491,72
13	ARGENTINA		1	1	41.523,23	21
14	AUSTRALIA		1	1	37.901,16	20,38
15	BELGIUM		2	1	209.035,18	41.528,79
16	BRAZIL		148	4	31.916.349,78	40.915,88
17	ESTONIA		2	1	754.691,50	363.113,00
18	UNITED KINGDOM		1	1	38.676,00	22.490,00
19	HONG KONG		2	2	202.620,11	125,97
20	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S		8	2	3.631.531,73	2.031,57

	REPUBLIC OF					
21	REPUBLIC OF KOREA		40	3	9.761.930,68	5.684,95
22	SRI LANKA		8	1	528.822,00	439.450,00
23	RUSSIAN FEDERATION		184	3	48.066.423,16	8.488.378,04
24	SWAZILAND		2	2	450.873,28	211,44
25	TURKEY		76	4	41.561.887,60	258.576,55
26	TAIWAN		58	4	36.730.710,59	75.905,40
27	UKRAINE		1	1	92.292,43	48,64
28	VIET NAM		4	1	1.522.012,04	882,61
29	SOUTH AFRICA		2	1	99.600,00	48.980,00
30	MYANMAR	FOR M D	14	1	10.663.696,58	22.936,47
31	MALAYSIA		132	6	260.005.682,06	199.810,76
32	PHILIPPINES		46	1	59.942.307,20	1.131.972,55
33	SINGAPORE		3	1	245.964,00	70.800,80
34	THAILAND		41	4	9.321.527,17	2.906.418,51
35	VIET NAM		330	8	238.468.728,39	5.287.434,37
36	REPUBLIC OF KOREA	FOR M AK	41	2	946.429,36	517.382,08
37	CHINA	FOR M E	402	15	1.758.042.551,20	38.465.458,85
38	MALAYSIA		5	1	12.465.000,00	4.521.200,00
39	SINGAPORE		2	2	2.435.947,00	613.521,39
40	VIET NAM		2	1	218.880,00	54.720,00
41	JAPAN	FOR M IJEP A	23	2	306.844,23	233.950,24

42	BRAZIL	FOR M GSTP	1	1	49.005,00	24.632,00
43	AUSTRALIA	FOR M AANZ	27	1	1.768.800,00	899.274,00
44	INDIA	FOR M AI	15	2	75.092.003,09	521.915,04
45	MALAYSIA		5	1	3.819.000,00	1.371.600,00
46	SINGAPORE		17	2	3.601.669,71	407.741,95
47	VIET NAM		312	1	203.741.940,41	117.237,76
48	PAKISTAN	FOR M IP	17	1	5.429.219,86	6.449,81
TOTAL			2177	103	3.043.850.834,95	68.138.925,99

Sumber : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2021



Indikator Kinerja persentase pertumbuhan industri ini didukung oleh program:

1. Program penataan struktur industri
2. Program peningkatan kemampuan teknologi industri

Data persentase pertumbuhan industri 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pertumbuhan industri Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Pertumbuhan Industri	7,20%	100%	8,21%	110,95%	19,42%	255,53%	11,08%	142,05%	8,00%	138,50%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan industri di Sulawesi Tengah selama empat tahun berturut-turut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2017 pertumbuhan industri tercatat sebesar 7,20% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tahun 2018 terealisasi sebesar 8,21% dengan capaian kinerja 110,95% atau naik 1,01% dari tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2019 pertumbuhan industri terealisasi sebesar 19,42% dengan capaian kinerja mencapai 242,75% atau naik 11,21% dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 pertumbuhan industri terealisasi sebesar 11,08% dengan capaian kinerja mencapai 142,05%. Capaian pertumbuhan industri tahun 2020 ini telah melampaui target akhir RPJMD, karena telah terealisasi sebesar 138,50%.

Berikut dapat dilihat perkembangan jumlah unit usaha industri di Sulawesi Tengah tahun 2019 dan tahun 2020.

Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Kelompok Industri

No.	Kelompok Industri	Unit Usaha Industri per-Tahun					Pertumbuhan Industri per-Tahun		Rata-rata Pertumbuhan Industri	
		2016	2017	2018	2019	2020*	2019	2020*	2019	2020*
1	Kecil	5.718	6.233	7.016	8.358	8.640				
2	Menengah	42	47	55	36	19				
3	Besar		37	43	50	68				
TOTAL		5760	6317	7114	8.444	8.727	18,70	3,35	13,66	11,08

(* data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021)

Ada beberapa kabupaten yang pertumbuhan IKM nya meningkat karena adanya beberapa kawasan industri & industri besar yang dibangun seperti Kabupaten Morowali (PT. IMIP), Morut, Touna, Banggai (PT. Donggi Senoro LNG) sehingga memicu pertumbuhan disekitarnya.

Industri kecil menengah yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan adalah industri : pangan, furnitur, alat angkut, sandang, barang dari kayu, logam, kimia, mesin, kerajinan, aneka kemasan/percetakan dan elektronika.

Berikut Rekapitulasi unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2017-2020

No	Kabupaten/Kota	Unit Usaha Tahun				Pertumbuhan (%) Tahun		Rata-Rata Pertumbuhan (%) Tahun	
		2017	2018	2019	2020*	2019	2020*	2019	2020*
1	Palu	1.259	1.367	1.515	1878	10,83	23,96	9,10	12,81
2	Donggala	533	574	633	648	10,28	2,37	8,05	6,63
3	Sigi	594	710	734	350	3,38	-52,32	9,85	-5,69
4	Parimo	287	318	393	445	23,58	13,23	15,50	14,93
5	Poso	501	536	574	583	7,09	1,57	7,04	5,67
6	Tojo Una-Una	575	623	803	1040	28,89	29,51	15,38	18,91
7	Morowali	660	714	740	632	3,64	-14,59	7,64	2,08
8	Banggai	125	145	206	308	42,07	49,51	24,25	30,57
9	Banggai Kepulauan	509	549	823	858	49,91	4,25	21,95	17,52
10	Tolitoli	408	622	657	367	5,63	-44,14	29,90	11,39
11	Buol	598	646	815	530	26,16	-34,97	14,31	1,99
12	Morowali Utara	215	248	276	273	11,29	-1,09	10,51	7,61
13	Banggai Laut	53	62	275	815	343,55	196,36	127,93	145,04
Total		6.317	7.114	8.444	8.727	18,70	3,35	13,66	11,08

(* data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021)

Pada tahun 2020, terdapat peningkatan akumulasi jumlah unit usaha industri menjadi sebanyak 8.727 jika dibandingkan dengan jumlah unit industri tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 8.444. Peningkatan signifikan ini terjadi seperti pada Kabupaten Banggai Laut, disebabkan baru terbentuknya dinas perindustrian dan perdagangan pada Kabupaten Banggai Laut, sehingga telah dilakukan pendataan yang menyeluruh di wilayah tersebut menyebabkan peningkatan akumulasi jumlah unit usaha industri yang telah terdaftar pada

sistem SIINas. Selain Banggai Laut Kota Palu juga mengalami peningkatan jumlah unit usaha industri yang terdaftar pada sistem SIINas. Unit usaha industri yang mengalami peningkatan ini yaitu pada industri pengolahan pangan yang didukung dengan adanya sarana transportasi online yang memudahkan akses antara penjual dan pembeli olahan pangan.

Namun meski mengalami pertumbuhan, pada tahun 2020 hasil yang diperoleh lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Pertumbuhan industri pada tahun 2020 cenderung menurun dikarenakan banyak unit usaha yang terkena dampak adanya pandemi covid-19. Seperti pada Tabel 3.30 dapat dilihat pada beberapa kabupaten pertumbuhannya bernilai negatif atau dengan kata lain pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil capaian ini juga didukung dengan pencapaian 1 (Satu) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 yang akan menjadi acuan Penyusunan RPIK di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Perda tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permenperind Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP/RPIK bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota yang wilayah administrasinya memiliki Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian dan atau mempunyai potensi

Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) / Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). RPIP Sulteng merupakan pedoman bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menunjang pelaksanaan pembangunan industri, serta tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri dalam jangka waktu 20 tahun yang dapat ditinjau dan di evaluasi kembali setiap 5 tahun.

Keberhasilan capaian sasaran strategis terwujudnya industri yang tangguh, professional dan mandiri, juga berkaitan erat dengan kesiapan SDM Sulawesi Tengah menghadapi tantangan di era Industri 4.0, sebuah strategi Indonesia untuk mencapai 10 Besar Ekonomi Dunia di Tahun 2030.

Program Strategi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi tantangan di era Industri 4.0 :

1. Meningkatkan Skill/SDM Para Pelaku IKM yang ada di daerah
2. Memfasilitasi Para IKM berkaitan dengan Legal, Produk dan Pasar
3. Memfasilitasi Para IKM untuk masuk ke marketplace
4. Memberikan Pendampingan/Mentoring Kepada Para Pelaku IKM
5. Melakukan Workshop/Pelatihan Kewirausahaan bagi para AlumniSMK/Perguruan Tinggi/Masyarakat Umum
6. Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Informasi



Indikator Kinerja Nilai realisasi investasi PMDN & PMA ini didukung oleh program:

1. Program peningkatan kualitas perencanaan.
2. Program peningkatan daya saing penanaman modal.
3. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

Data realisasi investasi PMDN dan PMA 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja nilai realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir

RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. 000.000)	Rp1.929.657.000.000	175,42%	Rp12.689.562.560.000	1046%	Rp4.438.790.800.000	333%	Rp5.261.315.800.000	1052%	Rp6.250.000.000.000	84,18%
2	PMA (Rp. 000.000)	Rp16.335.000.000.000	110%	Rp9.010.437.440.000	55,16%	Rp27.075.580.350.000	151%	Rp25.617.411.570.000	1066%	Rp16.940.000.000.000	151,22%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja nilai investasi PMDN selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 nilai investasi PMDN tercatat sebesar Rp 1.929.657.000.000,- dengan capaian kinerja 175,42%. Kemudian tahun 2018 nilai

investasi PMDN tercatat sebesar Rp 12.689.562.560.000,- dengan capaian kinerja mencapai 1.046% atau terjadi kenaikan 557,60% dibandingkan realisasi tahun 2017. Selanjutnya nilai investasi PMDN tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 4.438.790.800.000,- dengan capaian kinerja 333%, turun 185,87% dibandingkan realisasi tahun 2018. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 5.261.315.800.000,- dengan capaian kinerja 1052%. Capaian realisasi nilai investasi PMDN tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 84,18% dari target akhir RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 6.250.000.000.000,-

Sementara untuk nilai investasi PMA selama 4 tahun berturut-turut juga mengalami fluktuasi, dimana tahun 2017 nilai investasi PMA tercatat sebesar Rp. 16.335.000.000.000,- dengan capaian kinerja 110%. Tahun 2018 nilai investasi PMA terealisasi sebesar Rp. 9.010.437.440.000,- dengan persentase capaian hanya sebesar 55,16% atau turun 81,30% dibandingkan realisasi tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 nilai investasi PMA tercatat naik hingga 200,49% dibandingkan tahun 2018, dimana nilai investasi PMA terealisasi sebesar Rp. 27.075.580.350.000,- dengan capaian kinerja mencapai 151%. Kemudian pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 25.617.411.570.000,- dengan capaian kinerja 1066%. Realisasi kinerja tahun 2020 terhadap RPJMD tahun 2021 telah mencapai 151,22% yang artinya telah melebihi target yang ditargetkan sebesar Rp. 16.940.000.000.000,-

Pemicu pencapaian nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2020 yang melebihi target tersebut adalah banyaknya jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Sulawesi Tengah. Terdapat 251 perusahaan PMDN yang baru masuk dari target 4 perusahaan dengan capaian kinerja 6.275% dan 36 perusahaan PMA yang masuk dari target 4 perusahaan dengan capaian kinerja 900%. Sedangkan jika dilihat dari dokumen perizinan yang dikeluarkan pada tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 1.197 dokumen perizinan dengan persentase capaian 239% dari target 500 dokumen. Waktu proses pembuatan proses perizinan di tahun 2020 juga telah mencapai target yaitu 100 % dengan proses perizinan khusus izin usaha dapat diselesaikan dalam waktu 1-15 hari, Izin Non Usaha dapat diselesaikan dalam waktu 1-4 hari kerja dan harapannya pada masa akhir RPJMD tahun 2021 akan mencapai target yang telah ditetapkan yakni 10 hari kerja untuk izin usaha dan 3 hari kerja untuk izin non Usaha. Kualitas pelayanan yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memenuhi target dengan kategori sangat baik.

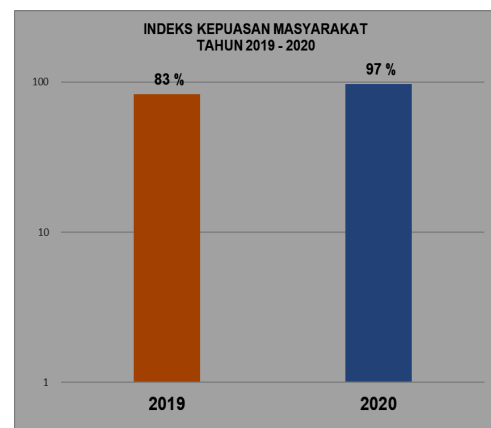
Data perbandingan realisasi investasi, jumlah perusahaan yang berinvestasi, jumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan dan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019 dan 2020 tergambar pada gambar berikut ini

Perbandingan Realisasi Investasi dan Perbandingan Perusahaan Yang Masuk

Perbandingan dokumen perizinan dan non perizinan



Perbandingan Nilai IKM (%)



Sumber: DPMPTSP Prov. Sulteng, 2021

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut :

- Perencanaan pengembangan penanaman modal yang bertujuan agar terciptanya kesamaan visi diantara instansi terkait dan *stakeholder* mengenai arah kebijakan dan strategi pengembangan penanaman modal, serta Penyusunan dan pemetaan potensi unggulan serta komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Promosi dan Investasi bertujuan untuk menginformasikan potensi dan peluang investasi 5 (lima) komoditi unggulan Sulawesi Tengah melalui kegiatan-kegiatan pameran investasi. Melalui kegiatan-kegiatan pameran ini terjalin interaksi langsung antara Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah

dengan para calon investor, pengusaha, penyedia teknologi, maupun konsumen langsung.

- Penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian masalah dan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan meningkatnya kualitas SDM aparatur akan tata kelola penanaman modal di lingkup wilayah Sulawesi Tengah. Selain itu juga melakukan evaluasi serta pembinaan tentang Pemanfaatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) baik secara manual maupun secara online dengan instansi terkait di kabupaten/kota.
- Melakukan kegiatan koordinasi dan fasilitasi kemitraan dunia usaha yang bertujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan dan kemitraan usaha daerah. Kegiatan koordinasi dan fasilitasi dunia usaha ini menitik beratkan pada membantu mitra usaha untuk dapat memasarkan hasil usahanya sekaligus menjadi potensi utama komoditi Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan dengan membentuk satu aplikasi yang bertajuk e-kaledos yang merupakan aplikasi yang memuat beberapa potensi hasil dari usaha.
- Kegiatan peningkatan kualitas strategi dan pengembangan promosi penanaman modal yang berkaitan dengan pengkajian strategi promosi yang hendak dikembangkan. Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana menganalisa keunggulan dan potensi yang akan dijadikan sebagai pencitraan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Pengolahan dan penyusunan data penanaman modal modal perizinan dan non perizinan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi penanaman modal yang bersumber dari perizinan dan non perizinan.
- Penyediaan sarana dan prasarana penanaman modal yang merupakan kegiatan dalam rangka menyediakan bahan informasi potensi penanaman modal berupa brosur, majalah, video dan multimedia lainnya dalam mendukung kualitas penyelenggaraan promosi penanaman modal. Tujuan kegiatan ini adalah menyediakan bahan promosi penanaman modal. Target kegiatan ini meningkatkan kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal. Realisasi target kinerja kegiatan penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal berupa informasi potensi penanaman modal berupa brosur, majalah, video dan multimedia.
- Kegiatan Fasilitasi Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal yaitu kegiatan pengkajian pengembangan iklim penanaman modal di daerah, termasuk peraturan-peraturan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan kajian-kajian kebijakan penanaman modal dan kemudahan berusaha di Provinsi Sulawesi Tengah.
- Penyelenggaraan Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal merupakan kegiatan guna mengetahui seberapa banyak perusahaan yang mendapat

fasilitas penanaman modal. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan.

- Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Promosi Investasi Daerah (SIPID) yang bertujuan untuk menyediakan informasi potensi investasi daerah yang akurat dan *up-date* yang ditampilkan dalam bentuk website, sebagai salah satu sarana informasi bagi investor potensial untuk memantau potensi investasi di Sulawesi Tengah.
- Pemantauan perkembangan realisasi penanaman modal merupakan kegiatan guna mengetahui kendala dan masalah yang dihadapi oleh penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menjalankan usahanya melalui rapat koordinasi penanaman modal terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- Penyusunan Analisis dan Evaluasi Data penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan yang bertujuan untuk menyediakan hasil analisa data penanaman modal serat perizinan dan Non Perizinan sebagai bahan untuk evaluasi arah investasi penanaman modal baik dari segi sektor maupun bidang investasi.
- Penyusunan peta potensi investasi daerah yang bertujuan untuk menyediakan informasi potensi yang akurat dan *up-date* yang melalui aplikasi Geografi informasi sistem (GIS). kegiatan pengembangan aplikasi GIS merupakan salah satu kegiatan utamanya untuk mengupdate kebutuhan aplikasi dalam menyediakan informasi peta potensi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada tahun 2020 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menargetkan realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah cukup besar yaitu Rp. 24,20 Triliun, yang memacu Pemerintah Daerah melalui DPMPSTSP melakukan kerja keras dalam upaya peningkatan realisasi investasi di Sulawesi Tengah walaupun dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 sehingga target pusat tersebut dapat dicapai dengan baik bahkan jauh melebihi target, dengan nilai total realisasi investasi sebesar Rp.30,80 Triliun atau 127% dari target realisasi BKPM RI.

Selanjutnya untuk Prestasi dan Penghargaan di Tingkat Nasional Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan sebagai Peringkat Pertama (Terbaik I) Tingkat Nasional pada Lomba Inovasi Daerah Dalam Penyiapan dan Rencana Pelaksanaan Tatanan Normal Baru

Produktif dan Aman Covid-19 Tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Penghargaan kepada Provinsi Sulawesi Tengah “*The Outstanding Leader In Investment*” dari CNBC Indonesia Award 2020.
3. Penghargaan kepada Provinsi Sulawesi Tengah tentang “Peningkatan Layanan Publik” Inews Indonesia Award 2020” dari iNEWS.



Sasaran Strategis 10 “Meningkatnya Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan Ekonomi” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan Peningkatan indeks pemberdayaan gender (IDG). Rinciannya sebagai berikut

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) ini didukung dengan program peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Peningkatan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,66%	100%	92,08%	100%	92,20%	100%	92,43%	100%	93,00%	99,38%

Gambar diatas menunjukkan bahwa Peningkatan Indeks Pembangunan Gender di Sulawesi Tengah terus meningkat selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017 Peningkatan Indeks Pembangunan Gender terealisasi sebesar 91,66% dengan persentase capaian 100%, lalu pada tahun 2018 terealisasi sebesar 92,08% dengan persentase capaian 100%. Selanjutnya tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender terealisasi sebesar 92,20% dengan persentase capaian 100, lalu pada tahun 2020 terealisasi sebesar 92,43%

dengan persentase capaian 100%. Sementara untuk target akhir RPJMD tahun 2021 capaian Indeks Pembangunan Gender telah mencapai 99,38%.

Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah bulan September 2020, menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga legislatif khususnya di Tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, belum mencapai 30%, yaitu berjumlah 12 orang atau 27% dan laki-laki 33 orang. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga legislatif sesuai ketentuan masih kurang 3%.

Meskipun keterlibatan perempuan di ranah politik sudah mulai kelihatan dan diakui eksistensinya, namun jika dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki memang masih belum menunjukkan kesetaraan, khususnya pada beberapa aspek pembangunan. Disamping itu juga, pada tahun 2020 masih belum bergeser eksistensi perempuan dalam bidang legislatif, hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi kinerja keuangan yang disebabkan karena dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi selama setahun, sehingga pelaksanaan program kegiatan, tidak maksimal hanya dilakukan secara daring (*Zoom Meeting*).

Upaya kedepan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di legislatif perlunya melakukan peningkatan pemahaman melalui sosialisasi politik dan pelatihan politik bagi perempuan dan penguatan politik perempuan yang berdaya saing, sehingga kuota 30% di parlemen dapat dioptimalkan dengan terwujudnya peningkatan partisipasi perempuan di Parlemen setiap tahunnya.

2. Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator kinerja peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ini didukung oleh program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan. Data capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,38%	100%	73,95%	100%	74,50%	100%	75.50%	100%	76,00-77,00 %	98,05%

Data peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dimana realisasi kinerjanya juga terus mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut. Tahun 2017 Indeks Pemberdayaan Gender tercatat sebesar 70,38% dengan persentase capaian kinerja 100%. Tahun 2018 Indeks Pemberdayaan Gender terealisasi sebesar 73,95% dengan persentase capaian 100% atau naik 5,07% dibandingkan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 terealisasi sebesar 74,50% dengan persentase capaian 100%, lalu pada tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender terealisasi sebesar 75,50% dengan persentase capaian 100%. Sementara untuk target akhir RPJMD tahun 2021, capaian Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2020 ini telah mencapai 98,05%.

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Berbagai hal telah dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan gender yang antara lain melalui kegiatan-kegiatan seperti Pengembangan forum peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP) dan pembinaan Industri Rumahan Perempuan, Fasilitasi Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan sosialisasi percepatan pemberantasan buta aksara perempuan, Bimbingan teknis manajemen usaha dan keterampilan bagi perempuan dalam mengelola usaha dan Pencegahan dampak negatif lingkungan yang responsif gender.



Indikator meningkatnya jumlah wisatawan ini didukung oleh program :

- Program pengembangan pemasaran pariwisata
- Program pengembangan destinasi pariwisata
- Program Pengembangan industri pariwisata
- Program pengembangan kelembagaan pariwisata

Data jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Jumlah kunjungan wisman dan wisnus Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	63.207 Org	341%	25.471 Org	135%	24.660 Org	126%	11.921 Org	59,60%	21.500 Org	55,44%
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	3.200.614 Org	100,02%	3.432.178 Org	99%	3.090.171 Org	86%	1.812.995 Org	47,7%	4.000.000 Org	45,32%

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi. Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 63.207 orang dengan persentase capaian 341%. Kemudian tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Tengah tercatat sebanyak 25.741 orang dengan persentase capaian 135%. Lalu pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang disebabkan adanya bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong sehingga jumlah kunjungan hanya sebanyak 24.660 orang dengan capaian kinerja 126% atau turun 7,14% dari tahun 2018.

Selanjutnya untuk tahun 2020 adalah tahun dimana sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan akibat merebak dan menyebarnya pandemi virus corona (covid-19). Kunjungan wisatawan mancanegara hanya berjumlah 11.921 orang dengan capaian kinerja 59,60% atau turun 70,44% dari tahun 2019, sangat jauh mengalami penyusutan dan ini terjadi secara global di seluruh dunia. Mobilitas masyarakat yang terbatas dengan diberlakukannya *lockdown* di mancanegara dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di dalam negeri serta penutupan berbagai tempat rekreasi dan wisata sebagai bentuk antisipasi penyebaran pandemi, berimbas besar terhadap perputaran roda ekonomi, termasuk juga pada pengurangan tenaga kerja di sektor pariwisata. Adapun terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2020 ini hanya memberikan kontribusi sebesar 55,44%.

Selanjutnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sulawesi Tengah selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara tercatat sebanyak 3.200.614 orang dan persentase capaian kinerja 100,02%. Kemudian tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan nusantara tercatat sebanyak 3.432.178 orang dan persentase capaian kinerja 99%. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan nusantara menurun menjadi 3.090.171 orang dengan capaian kinerja 86%, terjadi penurunan 11,06% dari tahun 2018. Seperti halnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan nusantara pun terimbas dengan adanya pandemi covid-19, yakni hanya sebesar 1.812.995 orang dengan capaian kinerja 47,7% atau turun 70,44% dari tahun 2019. Terhadap target RPJMD 2021, jumlah kunjungan wisatawan nusantara tahun 2020 baru mencapai 45,32%.

Perencanaan pembangunan pariwisata Sulawesi Tengah memerlukan sebuah analisis faktor lingkungan internal berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (weaknesses) dan juga perlu memperhatikan faktor lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Untuk mengembangkan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah, kedua faktor ini sangat diperlukan untuk mengetahui peluang serta kendala apa saja yang harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam tahap selanjutnya yaitu perencanaan.

1. Kekuatan (Strengths)

- Posisi geografis Sulawesi Tengah yang berada pada kawasan garis khatulistiwa.
- Posisi Sulawesi Tengah sangat strategis karena diapit oleh 2 daerah tujuan wisata yang sudah maju yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
- Potensi sumber daya alam dan budaya yang sangat beragam dan memadai untuk mengembangkan sektor kepariwisataan.
- Tersedianya obyek wisata alam dan budaya yang unik dan menarik, bervariasi, dan sebagian masih asli dan alami.
- Memiliki keragaman budaya yang tersebar di 12 etnis pada 12 Kabupaten dan 1 Kota.
- Bertambahnya jumlah usaha wisata karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk berinvestasi dibidang pariwisata.
- Adanya dukungan pemerintah daerah untuk lebih giat mengembangkan pariwisata di daerah Sulawesi Tengah.
- Adanya kerjasama yang baik bidang promosi pariwisata antara pemerintah, pemerintah daerah dan swasta yang semakin meningkat.

- Komitmen pemerintah untuk mendukung pariwisata.
- Pengembangan potensi wisata Geowisata, Geopark dan Cagar Biosfer.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Kualitas kemampuan SDM professional bidang pariwisata belum optimal.
- Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata masih terbatas meliputi aksesibilitas dana menitas.
- Database pariwisata yang tersedia belum mampu mendukung kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan sektor pariwisata.
- Belum optimalnya pengelolaan destinasi, khususnya dalam pengemasan daya tarik wisata kedalam produk wisata dan paket-paket wisata.
- Bandara Mutiara Sis Aldjufri belum menjadi Bandara Internasional dan tidak beroperasinya Bandara Tanjung Api Kab. Tojo Una-Una.
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan keragaman seni budaya berupa asset seni dan film nasional menjadi sebuah produk yang siap saji.
- Promosi dan pemasaran produk pariwisata belum terlaksana secara optimal dan terpadu diantara pihak yang terkait.
- Adanya krisis nilai budaya yang berdampak pada nilai-nilai solidaritas sosial, keramahmatan, rasa cinta tanah air dan jati diri bangsa yang cenderung menurun.

2. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya komitmen pemerintah menjadikan Sektor Pariwisata sebagai salah satu sumber utama devisa negara.
- Kondisi keamanan daerah Sulawesi Tengah semakin kondusif dan terbukanya peluang berinvestasi di sektor pariwisata.
- Meningkatnya minat masyarakat internasional untuk mengadakan perjalanan wisata.
- Adanya objek wisata unggulan yang memiliki daya tarik dan keunikan.
- Makin matangnya tingkat kehidupan berdemokrasi, sehingga membuka kesempatan besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni dan film.
- Meningkatnya jumlah lembaga/ swasta/ masyarakat luar negeri yang tertarik akan kekayaan budaya bangsa baik berupa peninggalan sejarah purbakala dan budaya bangsa maupun budaya non material (intangible).
- Kondisi pemerintahan yang semakin stabil, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan.
- Tahun 2020 merupakan tahun ujian bagi Indonesia dan dunia karena adanya Pandemi

virus covid-19. Tetapi masa pandemi juga menciptakan peluang- peluang usaha ekonomi baru mulai dari bisnis penjualan secara online, yang berdampak terhadap peningkatan penggunaan jasa kurir barang. Mobilitas masyarakat yang terbatas untuk keluar rumah menjadi peluang rezeki bagi transportasi online. Adanya tatanan kehidupan baru yang mengharuskan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan, menjadi berkah bagi usaha pembuatan masker kain dan masih banyak peluang lainnya yang dapat kita ciptakan.

3. Ancaman (*Threats*)

- Persaingan yang semakin tinggi antara Negara khususnya ASEAN dalam upaya menarik wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya.
- Masih terbatasnya sarana infrastruktur dan aksesibilitas ke lokasi objek wisata.
- Kekayaan budaya bangsa baik yang berupa benda (*tangible*) dan yang bukan benda (*intangible*) belum dikelola secara sinergis dalam rangka pembangunan nasional.
- Masih lemahnya kemampuan SDM pengelola kekayaan budaya baik di tingkat pusat, daerah dan masyarakat.
- Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa dan mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya.
- Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan masyarakat tapi juga berimbas kesemua sendi kehidupan lainnya. Penurunan kualitas kesehatan masyarakat, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan kepariwisataan, menjadi ancaman bagi masa depan bangsa.

Solusi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata khususnya dimasa pandemi Covid-19 antara lain :

- Dengan mendorong terciptanya kreasi dan kreatifitas masyarakat agar dapat meningkatkan pendapatan, dengan melaksanakan beberapa pelatihan ketrampilan usaha.
- Demikian pula untuk mendukung program Pemerintah dalam penanganan covid-19, dilaksanakan pembagian perlengkapan kebersihan dan kesehatan kepada masyarakat khususnya pada obyek-obyek wisata seperti masker kain, hand sanitizer, desinfektan, tissue basah dan suplemen vitamin.

SASARAN STRATEGIS 12

Terciptanya Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran Strategis 12 “Terciptanya Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Rinciannya sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Data dan capaian tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tingkat pengangguran terbuka Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

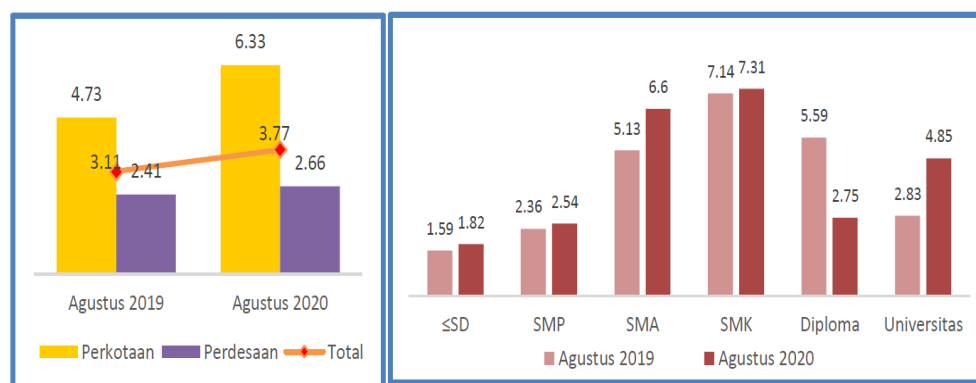


Gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Tahun 2017 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,81% dengan capaian kinerja 88,3%. Sedangkan tahun 2018 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,43% dengan capaian kinerja mencapai 99.71% (penurunan 11.07% dari tahun 2017). Sedangkan pada tahun 2019 realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,15% dengan capaian kinerja 90% atau terjadi penurunan 8,8% dari tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi tingkat pengangguran terbuka

sebesar 3,77% dengan capaian kinerja mencapai 84%. Pencapaian tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi 74,33% dari target akhir RPJMD tahun 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Gambar dibawah ini menunjukkan perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2019-2020.

Perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2019-2020



Sumber: BPS Prov. Sulteng, 2020

Dari gambar diatas terlihat bahwa TPT di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 6,33 persen, sedangkan TPT di perdesaan sebesar 2,66 persen. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka didaerah perkotaan sebesar 1,60 persen poin, begitu juga dengan TPT di perdesaan yang meningkat 0,25 persen poin.

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2020, TPT pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 7,31 persen, kemudian diikuti oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,6 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang lebih terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA.

Mereka yang berpendidikan rendah, cenderung mau menerima pekerjaan yang tersedia di pasar kerja, dapat dilihat dari TPT untuk pendidikan SD ke bawah memiliki nilai paling kecil diantara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 1,82 persen. Pada Agustus 2020 jika dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPT yang mengalami penurunan terjadi pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III, sedangkan peningkatan terjadi pada tingkat pendidikan SD kebawah, SMP, SMA, SMK, dan Universitas.

Tabel berikut menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen) periode Agustus 2019 - Agustus 2020.

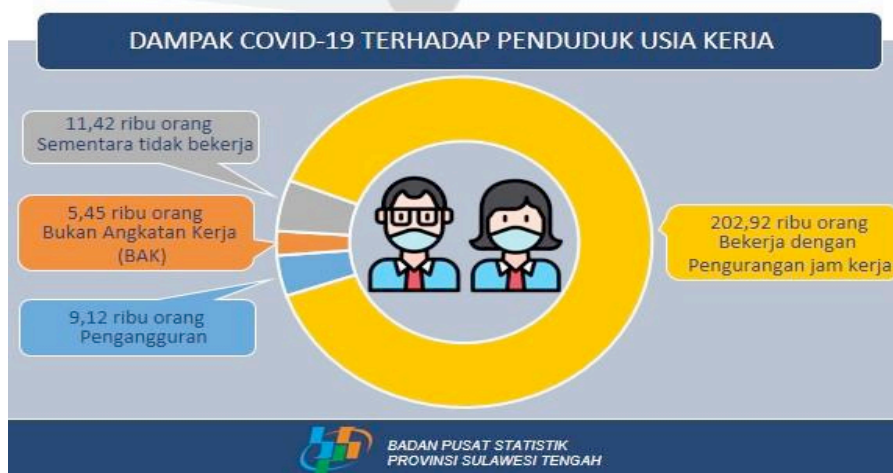
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen) periode Agustus 2019 - Agustus 2020

Kabupaten/Kota	TPAK			TPT		
	2019	2020	Perubahan	2019	2020	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7201 Banggai Kepulauan	73,66	72,97	-0,69	2,00	2,47	0,47
7202 Banggai	67,11	69,79	2,68	2,18	2,42	0,24
7203 Morowali	62,96	64,70	1,74	2,97	5,21	2,24
7204 Poso	72,6	74,78	2,18	2,18	2,39	0,21
7205 Donggala	65,69	63,93	-1,76	2,76	2,58	-0,18
7206 Toli-Toli	62,38	65,95	3,57	3,10	3,74	0,64
7207 Buol	67,14	69,75	2,61	3,01	4,36	0,35
7208 Parigi Moutong	68,30	72,50	4,20	2,36	2,70	0,34
7209 Tojo Una-Una	78,69	75,33	-3,36	2,92	2,84	-0,08
7210 Sigi	69,16	69,24	0,08	2,54	3,36	0,82
7211 Banggai Laut	65,41	67,20	1,79	3,04	3,09	0,05
7212 Morowali Utara	65,76	69,85	4,09	3,05	5,16	2,11
7271 Palu	65,63	66,46	0,83	6,32	8,38	2,06
Total	67,80	69,44	1,64	3,11	3,77	0,66

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2020

Dengan adanya pandemi covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan yang sempat terjadi pada triwulan II berdampak pada dinamika ketenagakerjaan. Namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah sudah berangsur pulih pada triwulan III. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Dampak Covid-19 Keadaan Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah Periode Agustus 2020



2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) ini didukung oleh program :

- Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas.
- Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,14%	90,12%	69,52%	92,39%	67,59%	92,52%	69,44%	90,47%	70,01%	99,18%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2017 realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sulawesi Tengah 67,14% dengan capaian kinerja 90,12%, kemudian tahun 2018 naik sebesar 2,37% sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2018

teralisasi sebesar 69,52% dengan capaian kinerja 92,39%. Pada tahun 2019 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat sebesar 67,59% dengan capaian kinerja 92,52% atau turun 1,93% dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya pada kondisi Bulan Agustus 2020 terealisasi sebesar 69,44% dengan capaian kinerja 90,47%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 99,18%.

Pada Agustus 2020 tercatat jumlah Angkatan Kerja Sulawesi Tengah sebanyak 1,58 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 62,69 ribu orang dibanding Agustus 2019. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 1,52 juta orang, meningkat sebanyak 50,31 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi meningkatnya penduduk yang bekerja adalah musim panen di berbagai daerah sehingga banyak menyerap tenaga kerja, selain itu adanya perusahaan pertambangan juga banyak menyerap tenaga kerja yang ada. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 59,38 ribu orang, mengalami peningkatan sekitar 12,39 ribu orang dibanding setahun yang lalu. Hal ini merupakan sebagian dari dampak adanya pandemi Covid-19.

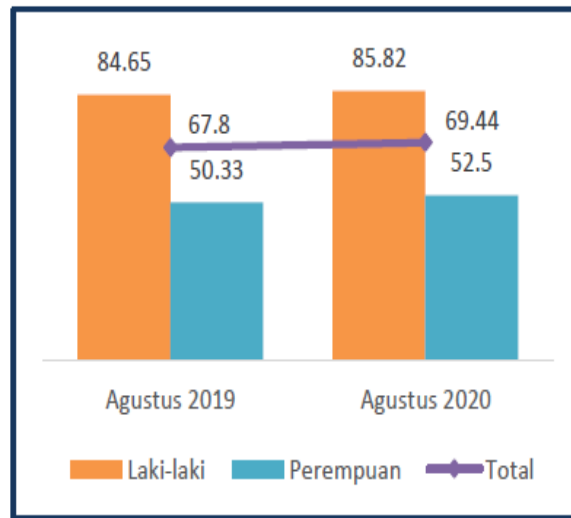
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 2019 – 2020

Status Keadaan Ketenagakerjaan	1 Tahun lalu	Saat ini	Perubahan 1 Tahunan	
	Agustus 2019 (ribu orang)	Agustus 2020 (ribu orang)	(Agust 2019- Agust 2020) (ribu orang)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja	2 231,72	2 269,14	37,43	1,68
Angkatan Kerja	1 513,04	1 575,73	62,69	4,14
Bekerja	1 466,04	1 516,35	50,31	3,43
Pengangguran	46,99	59,38	12,39	26,36
Bukan Angkatan Kerja	718,68	693,42	-25,27	-3,52
	Persen	Persen	Persen Poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,11	3,77	0,66	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,8	69,44	1,64	

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Agustus 2019. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 69,44 persen, meningkat 1,64 persen poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Berikut disajikan perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin tahun 2019-2020.

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, 2019-2020



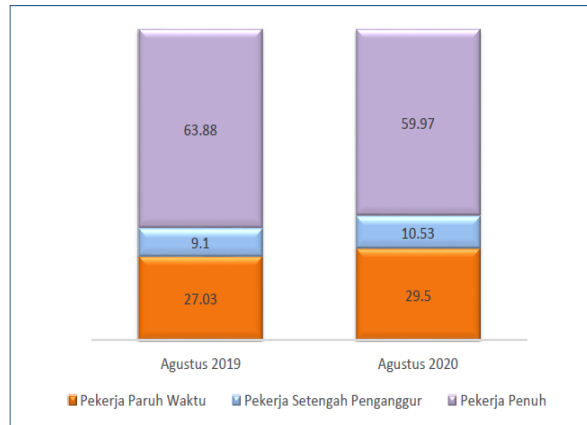
Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2020

Dari gambar diatas nampak bahwa berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2020, TPAK laki-laki sebesar 85,82 persen, sementara TPAK perempuan hanya 52,50 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki meningkat 1,17 persen poin dan TPAK Perempuan juga mengalami peningkatan sebesar 2,17 persen poin.

Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa tidak semua penduduk bekerja memiliki produktivitas yang tinggi, diindikasikan oleh perbedaan jam kerja. Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua kelompok yaitu pekerja setengah penganggur dan pekerja paruh waktu.

Persentase pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam perminggu) pada Agustus 2020 sebesar 59,97 persen mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Agustus 2019 (63,88 persen). Sedangkan persentase pekerja tidak penuh sebesar 40,03 persen meningkat sebesar 3,90 persen poin jika dibandingkan Agustus 2019 (36,13 persen). Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua yaitu pekerja paruh waktu (27,03 persen) dan pekerja setengah penganggur (9,10 persen) pada keadaan Agustus 2020.

Persentase Pekerja Penuh, Setengah Penganggur dan Paruh Waktu Sulawesi Tengah, 2019-2020



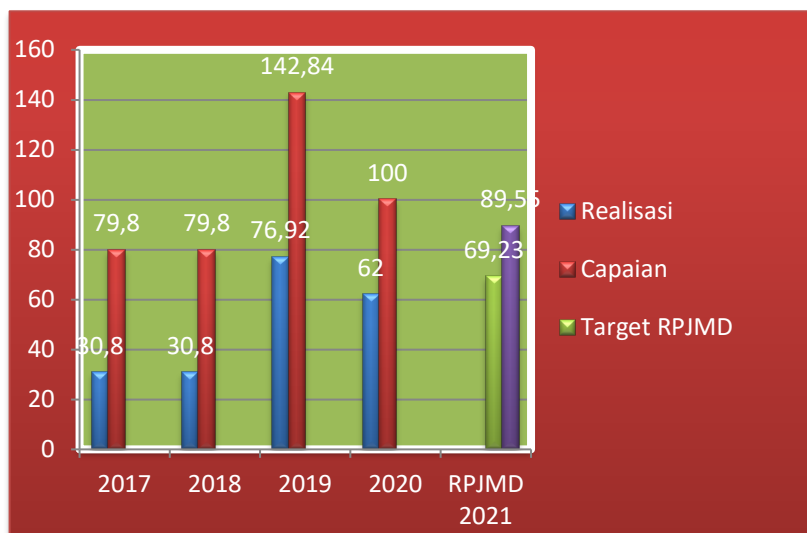
Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2020

SASARAN STRATEGIS 13 **Terbukanya Keterisolasian Daerah-daerah Terpencil**

Sasaran terbukanya keterisolasian daerah-daerah terpencil yang diukur dengan indikator Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal ini didukung oleh program pembangunan daerah tertinggal.

Data realisasi dan capaian Persentase kabupaten/kota tidak tertinggal 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota tidak tertinggal Tahun 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase kabupaten/kota tidak tertinggal tahun 2017 dan tahun 2018 realisasi dan capaian kinerjanya sama yaitu masing-masing 30,8% untuk realisasi kinerja dan 79,8% untuk capaian kinerjanya. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase kabupaten/ kota tidak tertinggal terealisasi sebesar 76,92% dengan capaian kinerja mencapai 142,84% atau naik 46,12% dibandingkan kondisi tahun 2017 dan 2018, lalu pada tahun 2020 terealisasi sebesar 62% dengan capaian kinerja mencapai 100%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, capaian persentase kabupaten/kota tidak tertinggal tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 89,11%.

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria :

- Perekonomian masyarakat;
- Sumber Daya Manusia;
- Sarana dan prasarana;
- Kemampuan keuangan daerah;
- Aksesibilitas;
- Karakteristik daerah.

Pada tahun 2020 masih terdapat beberapa daerah tertinggal belum terhentikan berada di wilayah Sulawesi tengah yang terletak di Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Melalui program pemerintah dalam upaya untuk mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kedepan perlu ada review dan evaluasi untuk lebih memfokuskan program pembangunan desa di daerah tertinggal dengan cara mengubah strategi dan memformulasikan fungsi kelembagaan. Salah satu opsinya, untuk pembangunan desa di daerah tertinggal perlu mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah khususnya pada bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Daerah Tertinggal (PKTDT) dengan alokasi dana tambahan kegiatan guna menghentikan 3 (tiga) Kabupaten yang masih berada dalam kategori tertinggal.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menuntaskan kabupaten/kota yang tertinggal di Sulawesi Tengah antara lain :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk ditingkatkan lagi fungsinya di wilayah terpencil
2. Mendorong tata kelola sumberdaya alam.
3. Mendorong peningkatan kualitas SDM, melalui kegiatan kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah berupa penyuluhan/pelatihan kepada warga.

4. Mendorong kebijakan sinergis antara pusat dan daerah.
5. Mendorong stakeholders untuk mempunyai cara pandang yang sama dan keberpihakan pada percepatan pembangunan daerah tertinggal.

SASARAN STRATEGIS 14 **Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lahan Ditingkat Tapak**

Indikator kinerja kontribusi PDRB sub sektor kehutanan ini didukung oleh program :

- Program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan.
- Program planologi dan tata lingkungan hidup
- Program pengendalian perubahan iklim
- Program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
- Program pengendalian DAS dan hutan lindung
- Program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Data kontribusi PDRB sub sektor kehutanan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi PDRB sub sektor kehutanan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan Capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Kontribusi PDRB Sub Sektor Kehutanan	3%	100%	856,82%	95,14%	1541,04%	171,21%	607,05%	67,45%	9%	67,45%

Tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi PDRB sub sektor kehutanan tahun 2017 sebesar 3% dengan persentase capaian 100%. Sedangkan tahun 2018 target penerimaan pendapatan daerah bertambah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 yaitu Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), maka mempengaruhi realisasi yang sangat tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 856,82% dengan capaian kinerja mencapai 95,14%. Kemudian pada tahun 2019 kontribusi PDRB sub sektor kehutanan mencapai 1541,04% dengan capaian kinerja 171,21%. Selanjutnya pada tahun

2020 kontribusi PDRB sub sektor kehutanan terealisasi 607.05% dengan capaian kinerja 67.45%.

Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, capaian kontribusi PDRB sub sektor kehutanan tahun 2020 telah jauh melampaui target yaitu telah mencapai 67.45%.

Pencapaian ini ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Jumlah unit yang melaksanakan atau mengakses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP) dalam rangka Pemanfaatan Hasil Hutan secara tertib selama tahun 2020 adalah 1.411 unit, yang terdiri dari IUPHHK 5 Unit (PT. Sentral Pitulempa, PT. Taman Hutan Asri, PT. Bina Balantak Raya, PT. Wana Rinda Lestari dan PT Satya Guna Sulajaya), IPK 2 unit (PT. Cipta Agro Sakti dan PT. Touna Raya Coconut) serta Pemungutan HHBK yang berasal dari 11 KPH dari skema Perjanjian Kerjasama (KPH. Kulawi, KPH. Dolago Tanggunung, KPH. Dampelas Tinombo, KPH. Sintuwu Maroso, KPH. Banawa Lalundu, KPH. Sivia Patuju, KPH. Pogogul, KPH. Gunung Dako, KPH. Balantak, KPH. Toili Baturube dan KPH. Tepe AsaMoroso). Adapun jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang menggunakan Sistem Pengendalian Bahan Baku (RPBBI) Online adalah sebanyak 62 Unit.
2. Jumlah realisasi penerimaan PNBP Tahun 2020 yang berasal dari
 - PSDH sebesar Rp. 708.769.461,- atau 93,43 % dari target penerimaan.
 - DR sebesar Rp. 3.100.046.857,- atau 129,24 % dari target penerimaan.
 - IIUPH sebesar Rp. 585.325.150,- atau 87,87% dari target penerimaan.

Realisasi penerimaan PNBP ini diperoleh dari jumlah penyetoran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan (yang terdiri dari IIUPH atau Iuran Izin usaha Pemanfaatan Hutan, PSDH atau Provisi Sumber Daya Hutan dan DR atau Dana Reboisasi dimana yang menjadi bagian provinsi sebesar 16% dari kewajiban PNBP dan telah disalurkan ke rekening kas daerah (BPKAD Prov. Sulawesi Tengah) per triwulannya dengan total sebesar Rp. 4.394.141.468,-

Pada Triwulan III Tahun 2020 terdapat penyetoran kurang bayar DBH SDA Kehutanan Tahun 2018 yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018.

3. Realisasi produksi Hasil Hutan Kayu berupa :

- Kayu Bulat sebesar 64.863,50 m³
- Kayu Gergajian sebesar 24.465,1790 m³
- Kayu hitam sebesar 137,52 m³
- Kayu veneer sebesar 605,5303 m³

Realisasi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu diperoleh dari skema perjanjian kerjasama antara pihak mitra dengan 11 unit pengelola hutan (UPTD KPH Se-Sulawesi Tengah) diperoleh dari jenis Rotan 4.748 ton, Getah Pinus 760 ton dan Damar Kopal 647 ton.

SASARAN
STRATEGIS 15

**Optimalnya Tata Kelola Hutan Untuk Pengendalian
Kerusakan DAS dan Hutan Lindung**

Indikator persentase kerusakan kawasan hutan ini didukung oleh program:

- Program pengendalian DAS dan hutan lindung.
- Program planologi dan tata lingkungan hidup.
- Program pengendalian perubahan iklim.
- Program konservasi sumberdaya alam dan ekosistem.

Data Persentase kerusakan kawasan hutan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase Kerusakan kawasan hutan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan	0,01%	5,55%	0,01%	5,9%	0,01%	6,25%	0,06%	40%	0,14%	42,85%

Dari data yang tersaji diatas nampak bahwa Persentase kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Tengah selama 4 tahun berturut-turut mengalami peningkatan namun realisasi masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tahun 2017 persentase kerusakan hutan terealisasi sebesar 0,01% dengan capaian kinerja 5,55%. Kemudian tahun 2018 persentase kerusakan hutan terealisasi sebesar 0,01% dengan capaian kinerja 5,9%.

Selanjutnya tahun 2019 terealisasi sebesar 0,01% dengan capaian kinerja 6,25%. Pada tahun 2020 persentase kerusakan hutan terealisasi sebesar 0,06% dengan capaian kinerja 40%. Sementara untuk target akhir RPJMD tahun 2021 persentase kerusakan hutan telah mencapai 42,85%.

Upaya bersama berbagai pihak Polisi kehutanan Dinas Kehutanan Prov.Sulawesi Tengah dengan Kepolisian dan GAKUM LHK Wilayah II Sulawesi serta kesadaran masyarakat yang meningkat, namun kerusakan kawasan hutan yang di akibatkan oleh Perambahan pemukiman liar dan perladangan liar yang dilaporkan masih terjadi seluas 2.501,1 Ha. Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan dilaksanakan dengan skala prioritas dan pemilihan penanganan yang memberikan dampak/efek jera bagi para pelanggar, mampu memberikan pesan yang jelas dan tegas, meskipun terdapat keterbatasan personil dan anggaran serta tingginya aktivitas ilegal di dalam kawasan hutan untuk tambang dan perambahan. Kerjasama dengan Kepolisian dan GAKUM LHK dalam penegakan hukum memberikan hasil yang baik dengan terpenuhinya capaian kegiatan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga tetap terjaga daya dukung, produktivitas serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan.

Pada tahun 2020 Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sulawesi Tengah mencapai 3.477,7 Ha. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mencakup seluruh kegiatan Pembuatan Tanaman RHL seluas 1.102 Ha, Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai seluas 1.350,7 Ha, Pola penanaman Mangrove 200 Ha, maupun Penghijauan Lingkungan seluas 825 Ha, pada Dinas Kehutanan Provinsi bersama UPT TAHURA/KPH seSulteng. Kegiatan pembuatan tanaman hutan maupun penghijauan lingkungan di berbagai wilayah penyangga UPT KPH yang berada di Kabupaten/Kota se Sulteng dengan jenis tanaman produktif yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi baik kayu maupun turunannya. Adapun kegiatan lain Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kab/Kota se Sulteng sebagai berikut :

- a. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Balantak Ha tersebar di Kec. Lobu Desa Uha-uha, Kec. Pagimana Desa Bungawon, Kec. Balantak Utara Desa Pangkalaseang, Desa Talima A, Kec. Bualemo Desa Lembah Makmur, Kec Lamala Desa Kagitakan, Desa Labotan.

- b. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Banawa Lalundu tersebar di Kec. Banawa Selatan Desa Lumbulama, dan Pembuatan Tanaman Reboisasi Kec. Banawa Selatan Desa Malino, Kec. Rio Pakava Desa Tinauka, Kec. Pinembani Desa Dangara.
- c. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Dampelas Tinombo tersebar pada Kecamatan Moutong Desa Giro, Desa Lobu, Desa Ogobagis, Desa Ambason.
- d. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Dolago Tanggunung di Kec. Sigi Biromaru Desa Oloboju, Desa Vatunonju, Kec.Sirenja Desa Ujumbou, dengan Pola Hutan Rakyat di Kecamatan Sirenja Desa Ombo dan Kec. Sigi Biromaru Desa Vatunonju.
- e. Kegiatan Rehabilitasi dengan Pengembangan Model Tanaman HHBK pada UPT KPH Gunung Dako tersebar di Kec. Galang Desa Aung, Kec. Lampasio Desa Oyom, Kec. Basidondo Desa Labonu.
- f. Kegiatan Pemulihan Hutan dan Lahan Pola Hutan Rakyat pada UPT KPH Kulawi tersebar Kec. Dolo Selatan Desa Bangga.
- g. Kegiatan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Konservasi Tanah dan Air pada UPT KPH Pogogul tersebar di Kec. Palele Barat Desa Timbulon, Kec. Biau Desa Kelurahan Leok 1, Kec.Palele Barat Desa Oyak.
- h. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Pulau Peling dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Bulagi Utara Desa Sabang, Kegiatan Pengkayaan Reboisasi Kec.Bulagi Utara Desa Ombuli, Kec. Bulagi Selatan Desa Boluni, Kec Tinangkung Desa Ambelang, Desa Koakon.
- i. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Sintuwu Maroso dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Lage Desa Pandiri, Kegiatan Pengkayaan Reboisasi Kec.Lore Peore Desa Watutau.
- j. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Sivia Patuju dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Ampana Tete Desa Wanasari,Desa Mpoa, Desa Sukamaju, Desa Girimulyo, Kec. Tojo Barat Desa Matako, Kec. Tojo Desa Pancuma, Desa Tojo, Kec. Ulubongka Desa Mire, Desa Takibangke, Desa Marowo, Desa Uekambuno, Kec. Nuhon Desa Obo Balingara.
- k. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Tepe Asa Maroso dengan Pola Hutan Rakyat di Kec. Bungku Barat Desa Ambunu, Kec. Bungku Tengah Desa Tofuti.

- I. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Tepo Asa Aroa dengan Pola Hutan Rakyat di Kec.Soyo Jaya Desa Malino.
- m. Kegiatan Rehabilitasi pada UPT KPH Toili Baturube dengan Pola Hutan Rakyat dan Pola Agroforestry di Kec. Nambo Desa Lumbe, Kegiatan Pengkayaan Tanaman Reboisasi pada Areal Penyangga KPH Di Kec.Toili Desa Uemea, Kec. Mamosalato Desa Tanasumpu, Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Kec. Luwuk Selatan Desa Bubung, Kec Nambo Desa Koyoan.

Sesuai arahan Presiden RI yang tertuang dalam “Nawa Cita” posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang mengacu pada kebijakan pembangunan kehutanan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, areal kelola masyarakat serta penyelesaian konflik tenurial. Dalam P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Hingga tahun 2020 Luas Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah mencapai 43.370,61 Ha. Sebelum penerbitan izin dari Kementerian LHK, Dinas dan KPH selaku perangkat daerah melakukan sosialisasi terhadap perangkat Desa/Dusun maupun masyarakat setempat, membantu dalam pengajuan perda serta pembuatan peta usulan penyiapan kawasan perhutanan sosial.

Kewenangan Hak kelola berada di Kementerian dan Setelah Penerbitan hak atau izin oleh Kementerian, daerah sebagai fasilitasi maupun pendamping masyarakat dalam pembuatan Rencana Kerja usaha, Pemanfaatan Potensi Usaha serta penghubung dengan pihak swasta. Peraturan Menteri dimaksudkan dapat memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di Bidang Perhutanan Sosial serta bertujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

SASARAN
STRATEGIS 16**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Indikator indeks kualitas lingkungan hidup ini didukung oleh program :

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
- Program pembinaan kajian lingkungan hidup strategis
- Program penataan dan penegakan hukum lingkungan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Program peningkatan penyuluhan dan sumber daya manusia

Data indeks kualitas lingkungan hidup 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,39 Poin	102,04%	69,50 Poin	84,75%	83 Poin	118,57%	80,23 Poin	113,8%	71 Poin	113%

Tabel diatas menggambarkan bahwa indeks kualitas lingkungan hidup di Sulawesi Tengah setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 69,39 poin dengan capaian kinerja 102,04%, kemudian tahun 2018 indeks kualitas lingkungan hidup terealisasi sebesar 69,50 poin dengan capaian kinerja 84,75%. Selanjutnya pada tahun 2019 indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 83 poin dengan capaian kinerja 118,57% atau terjadi kenaikan 19,4% dibandingkan tahun 2018. Untuk tahun 2020 realisasi indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 80,23 poin dengan capaian kinerja 113,8%. Pencapaian tahun 2020 ini telah melebihi target akhir RPJMD 2021 dengan persentase 113%.

Nilai IKLH nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh

provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas hidup seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan 7 parameter yaitu TSS, DO, BOD,COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform; (2) Kualitas udara, menggunakan metode indeks pencemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar semakin buruk kualitas airnya dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Untuk penghitungan nilai indeks kualitas air digunakan data hasil sampling di sungai lariang (Sigi dan Poso) dan untuk indeks kualitas udara menggunakan metode *passive sampler* yang dilaksanakan di 9 Kabupaten/Kota. Sehingga dengan menggunakan rumus : $IKLH_{Provinsi} = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$. Maka nilai IKLH provinsi Sulawesi Tengah adalah 80,23 Poin.



Indikator kinerja nilai tukar petani (NTP) ini didukung oleh program :

- Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan;
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan.

Data nilai tukar petani (NTP) 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai tukar petani Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Nilai Tukar Petani	96,01%	97,48%	108,68	107,30%	99,41%	94,92%	88,87%	84,72%	99,5-100,5%	88,42%

Tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi nilai tukar petani tahun 2017 sebesar 96,01% dengan capaian kinerja 97,48%. Kemudian tahun 2018 terealisasi sebesar 108,68% dengan capaian kinerja 107,30% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 99,41% dengan capaian kinerja sebesar 94,92%. Sedangkan nilai tukar petani (NTP) gabungan pada bulan Oktober Tahun 2020 mengalami penurunan 12,03% dengan realisasi sebesar 88,87% dan capaian kinerja 84,72%. Hal ini disebabkan karena indeks yang diterima petani di tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2019 begitu pula indeks yang dibayarkan petani di tahun 2020 lebih tinggi di banding tahun 2019. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 Nilai tukar petani tahun 2020 ini telah mencapai 88,42%.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu proksi indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP diatas angka 100 dapat diartikan bahwa petani mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). NTP sama dengan 100 berarti petani mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga dan NTP di bawah 100 berarti petani mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha dibawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib).

Adapun solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan indeks yang diterima petani, upaya yang dilakukan adalah bagaimana harga jual produk hasil pertanian tanaman pangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan mutu, kontrol pasokan produk di pasar produsen, distribusi produk pertanian ke pasar konsumen dan terjadinya tunda jual saat memasuki musim panen.
- (2) Stabilitas atau penurunan indeks yang dibayar petani, upaya yang dilakukan adalah menjaga stabilitas barang kunsumsi meliputi bahan makanan, makanan jadi dan

sandang, disamping itu bagaimana menekan biaya transportasi dari tingkat petani menuju pasar tingkat produsen.

- (3) Menekan biaya biaya produksi dan menekan penambahan biaya modal, upaya yang dilakukan adalah stabilitas biaya transportasi barang konsumsi dan bahan modal menuju ke pasar produsen, disamping itu terjaminnya ketersediaan benih dan bibit juga akan mengurangi naiknya indeks yang harus dibayar petani.

Selain hal tersebut diatas, solusi lain yang dilakukan adalah efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dilakukan melalui :

- (1) Peningkatan penggunaan pupuk kandang/organik sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk organik, dengan demikian volume penggunaan pupuk anorganik dapat ditekan sehingga kelangkaan pupuk ditingkat konsumen dapat dikurangi dan harga pupuk non subsidi tidak meningkat;
- (2) Penggunaan pestisida didasarkan pada hasil pengamatan perkembangan hama dan penyakit, keadaan ini akan menekan penggunaan pestisida.
- (3) Meningkatkan mekanisme dalam pertanian, hal ini akan mencegah peningkatan upah buruh ditingkat petani.
- (4) Stabilitas dan penurunan harga BBM akan berdampak pada stabilitas dan penurunan biaya transport menuju pasar produsen.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menunjang peningkatan NTP adalah dengan melakukan peningkatan indeks yang diterima petani melalui peningkatan haarga hasil produk yang dihasilkan petani, melalui pengendalian pasokan petani ke pasar produsen dengan perlunya pengembangan program yang terkait dengan Resi Gudang, Program LPDM, Program Cadangan Pangan, Pembelian Bulog. Program tersebut semuanya akan dapat mengurangi masuknya produk hasil pertanian dalam jumlah yang besar sehingga penurunan harga hasil pertanian dapat dicegah.



Sasaran Strategis 18“Meningkatnya Produksi dan Mutu Tanaman Holtikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan Jumlah PDRB sub sektor perkebunan. Rinciannya sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Lapangan Usaha) adalah merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota) dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Adapun kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan sampai dengan jasa. Data capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	28,98%	94,27%	26,14%	94,03%	24,33%	85,67%	26,24%	93,31%	28,92%	90,73%

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tahun 2017 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tercatat sebesar 28,98% dengan capaian kinerja 94,27%. Selanjutnya tahun 2018 terealisasi sebesar 26,14% dengan capaian kinerja 94,03% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 24,33% dengan capaian kinerja mencapai 85,67%. Kemudian terjadi kenaikan 8,91% pada tahun 2020, dimana kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terealisasi sebesar 26,24% dengan capaian kinerja 93,31%. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, pencapaian tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 90,73%.

Menurunnya kontribusi pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tengah tahun 2020 disebabkan karena sub sektor pertambangan dan penggalian serta sub sektor industri pengolahan mengalami peningkatan. Berdasarkan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2020

rata-rata capaian produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pencapaian produksi sesuai Angka Tetap (ATAP) pada tahun 2019, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

Adapun upaya untuk meningkatkan kontribusi pertanian terhadap PDRB Sulawesi Tengah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain sebagai berikut :

- a. Perluasan dan pengembangan sistem pertanian tanaman pangan dan peningkatan bantuan Pemerintah untuk petani berupa sarana produksi benih, pupuk, pestisida dan alat dan mesin pra dan pasca panen.
- b. Untuk menjamin status kepemilikan lahan bagi petani dalam mendukung peningkatan kesejahteraan perlu dilaksanakan sertifikasi lahan bagi petani.
- c. Penyediaan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura dapat menggerakkan para penangkar benih/bibit serta mengoptimalkan fungsi balai benih tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Penyediaan fasilitas dalam menjembatani petani ke sumber permodalan tanpa memerlukan administrasi yang berbelit-belit.
- e. Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya petani dalam penerapan teknologi pengolahan dan manajemennya melalui gabungan kelompok tani maupun kelompok tani itu sendiri.
- f. Mengubah paradigma berpikir petani terhadap budidaya usaha taninya, dimana dalam mengusahakan budidaya pertanian sebaiknya terfokus pada satu jenis komoditi tanaman.
- g. Peningkatan pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura telah didukung oleh beberapa sektor dalam mencapai target produksi yang telah ditetapkan.

2. Jumlah PDRB Sub Sektor Perkebunan

Indikator kinerja jumlah PDRB Sub Sektor Perkebunan ini didukung oleh program :

- Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan.

Data jumlah PDRB sub sektor perkebunan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Jumlah PDRB sub sektor perkebunan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Jumlah PDRB Sub Sektor Perkebunan	Rp.11.551.515	96,33%	Rp.12.009.909	97,23%	Rp.12.480.042	98,10%	Rp.12.480.042	95,24%	Rp.13.497.176	92,46%

Tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi jumlah PDRB sub sektor perkebunan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp 11.551.515 dengan capaian 96,33%. Kemudian pada tahun 2018 jumlah PDRB sub sektor perkebunan tercatat sebesar Rp. 12.009.909 dengan capaian kinerja 97,23%, tahun 2019 meningkat 3,91% dimana terealisasi sebesar Rp. 12.480.042 dengan capaian kinerja 98,10% namun pada tahun 2020 masih menggunakan data PDRB sub sektor perkebunan menurut lapangan usaha tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 12.480.042 dengan capaian kinerja mencapai 95,24%. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 jumlah PDRB sub sektor perkebunan telah memberikan kontribusi sebesar 92,46%.

Sub sektor perkebunan merupakan pemberi sumbangan terbesar terhadap PDRB Sulawesi Tengah yaitu 39,71%, lebih besar dibandingkan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,73%. Hal ini didukung oleh meningkatnya produksi beberapa komoditas unggulan perkebunan Sulawesi Tengah.

Dari 8 komoditas unggulan perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 komoditas yang telah mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu Kelapa Dalam, Pala, Lada, Kelapa Sawit, dan Karet. Sedangkan untuk komoditi Cengkeh, Kopi dan Kakao belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Bantuan bibit, peremajaan, pengendalian OPT dan bantuan pupuk untuk komoditas Kelapa Dalam, Pala, Lada, Kelapa Sawit dan Karet yang diberikan tahun 2012-2015 telah menunjukkan keberhasilan, melalui bimbingan penyuluh dan tenaga lapangan, sehingga produksi kelima komoditas tersebut dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi produksi komoditas Kelapa dalam mencapai 191.669 ton (110,43%) pada tahun 2020 dari

target sebesar 173.561 ton dan mencapai 108,23% terhadap target jangka menengah (177.092 ton). Produksi komoditas Pala mencapai realisasi sebesar 423 ton (154,95%) dari target tahun 2020 yaitu sebesar 273 ton dan mencapai 144,86 % terhadap target jangka menengah (292 ton). Produksi Lada juga mencapai realisasi sebesar 229 ton (231,31%) dari target tahun 2020 sebesar 97 ton dan mencapai 229% terhadap target jangka menengah (100 ton). Realisasi produksi komoditas Kelapa Sawit mencapai 421.526 ton (127,74%) dari target tahun 2020 sebesar 329.994 ton dan mencapai 124,02% terhadap target jangka menengah (339.893 ton). Sedangkan untuk komoditas Karet realisasi produksinya mencapai 2.978 ton (117,94%) dari target tahun 2020 yaitu sebesar 2.525 ton dan 114,54% terhadap target jangka menengah (2.600 ton).

Peningkatan produksi ke 5 komoditas unggulan tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan kesuburan tanah, adanya intensitas dan distribusi curah hujan yang cukup tinggi dan merata yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Keadaan ini sangat mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dimana tanaman mendapat cukup banyak air yang diperlukan pada proses penyerapan hara dan proses fotosintesis sehingga proses pembentukan bunga dan buah lebih maksimal.

Peningkatan produksi Kelapa diantaranya disebabkan oleh masih tingginya minat masyarakat dalam mengelola dan merawat komoditi kelapa, hal ini dapat terlihat dari penambahan luas areal sebanyak 1.372 Ha yang terdiri dari swadaya petani, bantuan yang bersumber dari dana APBD I dan APBD II. Berdasarkan data statistik, penambahan tanaman menghasilkan sebanyak 569 Ha menyebabkan terjadinya peningkatan produksi sebanyak 2.532 ton pada tahun 2019.

Peningkatan produksi Pala diantaranya disebabkan oleh tingginya minat masyarakat dalam mengelola dan merawat komoditi pala, hal ini dapat terlihat dari penambahan luas areal tanaman Pala pada tahun 2019 mencapai 1.374 Ha yang terdiri dari bantuan yang bersumber dari dana APBN sebanyak 501 Ha, APBD I sebanyak 226 Ha dan selebihnya bersumber dari APBD II, Swadaya dan Anggaran Dana Desa (ADD).

Sebaliknya komoditas Cengkeh, Kopi dan Kakao menunjukkan hal yang berbeda, dimana ketiga komoditas ini belum dapat mencapai target produksi padatahun 2020 secara maksimal. Produksi Cengkeh mencapai 99,18% atau sebesar 18.108 ton dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 18.258 ton dan apabila disandingkan dengan target Jangka menengah maka dapat diperoleh hasil produksi cengkeh mencapai 92,36% dari target jangka menengah sebesar 19.606 ton. Untuk produksi komoditas Kopi pada

tahun 2020 mencapai nilai kinerja sebesar 90,45% atau sebesar 2.548 ton dari target yang ditetapkan sebesar 2.817 ton. Capaian produksi kopi tersebut sama apabila dibandingkan dengan target Jangka menengah karena target produksi kopi yang sama pada tahun 2021. Produksi komoditi Kakao mencapai 89,63% atau capaian sebesar 128.154 ton dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 142.985 ton dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka dapat diperoleh hasil produksi kakao 89,50% atau sebesar 143.185 ton.

Capaian produksi dari komoditas Cengkeh, Kakao dan Kopi pada tahun 2020 dapat dikatakan sangat baik walaupun seluruhnya tidak mencapai target 100%. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi sehingga target produksi 3 komoditas tersebut tidak tercapai, diantaranya adalah bibit tanaman yang kurang bermutu dan tidak bersertifikat, tingginya jumlah tanaman tua dan tanaman yang kurang terawat, sulitnya petani dalam mengakses pupuk dan pestisida, masih cukup tingginya serangan hama dan penyakit tanaman, peningkatan intensitas curah hujan yang terjadi pada akhir tahun 2019 dan berlanjut pada tahun 2020 juga merupakan hal yang mempengaruhi tingkat produksi komoditi Cengkeh, Kakao dan Kopi, karena secara fisiologis tingkat curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman. Selanjutnya proses pasca panen juga akan terganggu mengingat komoditi Cengkeh, Kakao dan Kopi sangat membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak untuk proses pengeringan, yang jika hal ini tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi mutu hasil produksinya.

Khusus untuk produksi kakao secara nasional mengalami penurunan yang cukup besar dalam satu dekade terakhir. Beberapa hal spesifik selain yang dikemukakan di atas yang menyebabkan target produksi kakao belum tercapai pada tahun 2020 diantaranya disebabkan oleh terjadinya alih fungsi komoditi dari komoditi kakao ke komoditi palawija dan kelapa sawit sebanyak 4.328 Ha sehingga menyebabkan pengurangan luasan kakao. Selanjutnya hal spesifik yang menyebabkan target produksi Cengkeh belum tercapai yaitu tanaman cengkeh memiliki siklus panen raya setiap 4 tahun sekali.

**Jumlah produksi komoditas unggulan Prov. Sulteng
Tahun 2020**

No.	Komoditas	Jumlah produksi (ToN)
1.	Kelapa dalam	191.669
2.	Cengkeh	18.108
3.	Kopi	2.548
4.	Kakao	128.154
5.	Pala	423
6.	Lada	229
7.	Kelapa sawit	421.526
8.	Karet	2.978

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

**SASARAN
STRATEGIS 19**

**Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan dan
Perikanan Budidaya**

Sasaran Strategis 19 “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Nelayan dan Perikanan Budidaya” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Nilai tukar nelayan dan Nilai ekspor hasil perikanan. Rinciannya sebagai berikut :

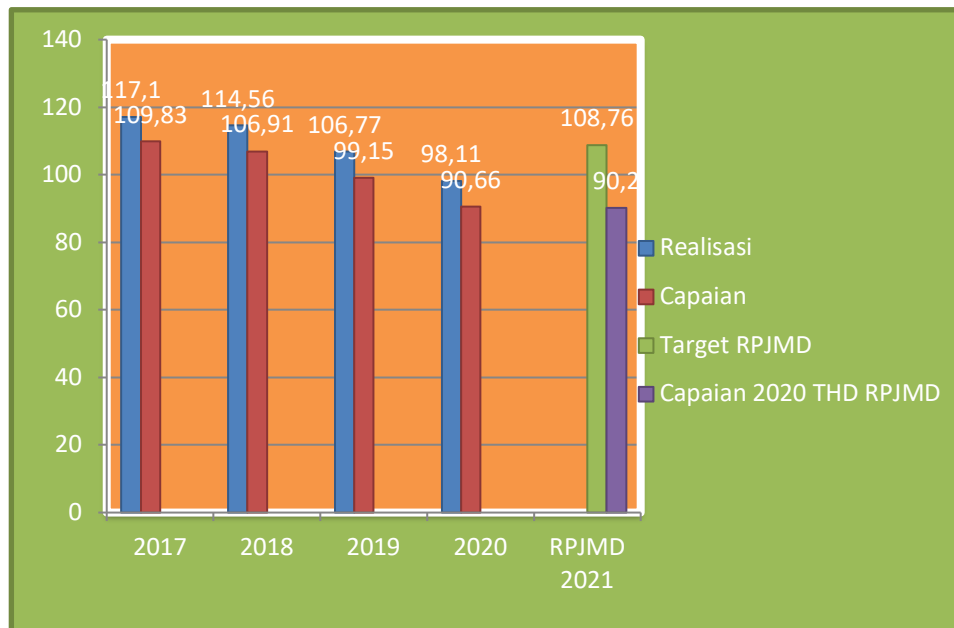
1. Nilai tukar nelayan

Indikator Nilai Tukar Nelayan ini didukung oleh Program :

- Program pengelolaan perikanan tangkap
- Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya

Data Nilai tukar nelayan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD tersaji pada gambar berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai tukar nelayan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD



Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi nilai tukar nelayan setiap tahun mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2017 nilai tukar nelayan terealisasi sebesar 117,1% dengan capaian kinerja 109,83%, lalu pada tahun 2018 realisasi nilai tukar nelayan tercatat sebesar 114,56% dengan capaian kinerja 106,91%, terjadi penurunan nilai sebesar 7,82% dimana realisasi nilai tukar nelayan tahun 2019 sebesar 106,77% dengan capaian kinerja 99,15%. Selanjutnya pada tahun 2020 realisasi nilai tukar nelayan tercatat sebesar 98,11% dengan capaian kinerja sebesar 90,66% atau turun 9,36% dari tahun 2019. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 realisasi nilai tukar nelayan tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 90,2%.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu proksi indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani/ nelayan/ pembudidaya dari waktu ke waktu. NTP di atas angka 100 dapat diartikan bahwa petani/nelayan/pembudidaya mengalami surplus (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha melebihi pertumbuhan pengeluaran rumah tangga), NTP sama dengan 100 berarti petani/ nelayan/ pembudidaya mengalami titik impas (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha sama dengan pengeluaran rumah tangga) dan NTP di bawah 100 berarti petani/nelayan/pembudidaya mengalami defisit (tingkat pertumbuhan pendapatan usaha di bawah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga). Secara sederhana angka NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang

diterima petani/nelayan/pembudidaya (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani/nelayan/pembudidaya (Ib).

Mulai Januari 2020 dilakukan perubahan tahun dasar penghitungan NTP dari tahun dasar (2012=100) menjadi tahun dasar (2018=100) baik untuk It maupun Ib.

Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi hasil pertanian/perikanan dan pola konsumsi rumah tangga pertanian/perikanan di pedesaan dan perluasan cakupan subsektor pertanian. Pada tahun dasar yang baru, terdapat peningkatan cakupan komoditas baik pada paket komoditas It maupun Ib. Penghitungan NTP juga mengalami perluasan khususnya pada sub sektor perikanan, yang kompilasinya dilakukan secara terpisah antara Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPPi) sehingga input data dimulai dari 0. Tahun 2019 target Nilai Tukar Perikanan Budidaya 85,00 dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap 107,68. Realisasi Nilai Tukar Perikanan yang dicapai oleh kedua sub sektor ini adalah untuk perikanan budidaya sebesar 87,11 (102,49%) dan perikanan tangkap sebesar 112,98 (104,93%). Berikut disajikan capaian NTN dan NTPPi selama tahun 2020:

Capaian NTN dan NTPi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Bulan	NTN	NTPi	NTNP (Nilai Tukar Petani subsektor Perikanan)
Januari	97.72	101.21	97,99
Februari	98.42	100.10	98,55
Maret	99.49	101.26	99,63
April	96.98	98.71	97,12
Mei	98.21	99.00	98,27
Juni	99.48	99.96	99,51
Juli	98.95	100.23	99,05
Agustus	98.43	99.21	98,49
September	96.84	99.48	97,04
Oktober	95.93	100.44	96,28
November	97.40	100.72	97,66
Desember	99.47	99.75	99,49

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021

Nilai tukar subsektor perikanan berfluktuasi sepanjang 2020, untuk perikanan tangkap dan budidaya mencapai titik tertinggi pada bulan Maret. Banyak hal yang diduga turut andil pada fluktuatif NTP Perikanan sepanjang 2020 dimana (1) keterbatasan ketersediaan BBM bersubsidi pada depot SPBU dan SPDN sehingga berpengaruh pada hari operasi; (2) keterbatasan aktifitas melaut bagi masyarakat nelayan terutama pada awal masa pandemi; (3) keterbatasan benih sebagai akibat pengurangan aktivitas unit-unit perbenihan dan transportasi logistik (pesawat terbang) yang mengurangi jadwal terbangnya; (4) sulitnya memasarkan hasil tangkapan dan budidaya ikan serta terbatasnya pembeli dan pedagang ikan disebabkan adanya kebijakan *lock down* pada awal masa pandemi Covid-19 yang diterapkan oleh kabupaten dan kota baik di Sulawesi Tengah maupun diluar Sulawesi Tengah. Kondisi ini pada kuartal selanjutnya mempengaruhi aktivitas perikanan karena pendapatan yang menurun tidak seimbang dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan; serta (5) Kondisi cuaca yang ekstrim yang menimpa Sulawesi Tengah berpengaruh pada usaha-usaha perikanan.

Menghadapi hal-hal diatas, kemudian dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya diantaranya dengan pembelian langsung ikan dari nelayan dan pembudidaya yang distribusikan ke unit pelayanan kesehatan dan masyarakat yang membutuhkan, penyediaan ikan murah pada kegiatan pasar murah, peningkatan dan pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan provinsi sebagai sentra nelayan, pola fasilitasi penyediaan BBM dan es balok serta pengembangan budidaya air tawar sistem bioflok dan kolam terpal.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan dan perikanan budidaya dengan indikator kinerja nilai tukar nelayan adalah sebagai berikut :

➤ Jumlah produksi perikanan budidaya.

Perikanan budidaya meliputi budidaya laut, budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya karamba dan budidaya sawah. Komoditi unggulan perikanan budidaya Sulawesi Tengah adalah rumput laut dan ikan air tawar (nila, mas dan lele). Dominasi produksi yang cukup besar terdapat pada pengembangan komoditi rumput laut, yaitu *Euchema Cottoni* yang banyak diusahakan pada budidaya laut dan *Glacillaria sp* yang diusahakan pada budidaya tambak.

Target produksi budidaya pada tahun 2020 adalah sebesar 1.110.780 ton dengan pencapaian sementara tahun 2020 adalah sebesar 588.746,45 ton atau mencapai 53,00%. Produksi ini lebih rendah dari target yang ditetapkan karena belum selesainya

proses validasi data perikanan budidaya tahun 2020. Berdasarkan data sementara produksi perikanan budidaya terbesar berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 337.424,07 ton dan disusul oleh Kabupaten Morowali sebesar 202.794,99 ton. Data produksi sementara budidaya tahun 2020 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020 Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi
1	Banggai Kepulauan	337.424,07
2	Banggai Laut	13.664,33
3	Banggai	265,00
4	Morowali	202.794,99
5	Morowali Utara	1.174,94
6	Poso	1.714,73
7	Donggala	11.488,10
8	Toli-toli	1.389,47
9	Buol	1.097,27
10	Parigi Moutong	15.044,24
11	Tojo Una Una	2.293,11
12	Kota Palu	85,18
13	Sigi	311,00
	Total	588.746,45

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulteng, 2021

- Jumlah produksi perikanan tangkap
Perikanan tangkap meliputi perikanan laut dan perairan umum daratan (PUD). Target produksi perikanan tangkap di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 adalah 239.700 ton

dan terealisasi sementara sebesar 201.101,80 ton*. Meskipun capaian tahun 2020 lebih rendah dari target tetapi capaian ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 196.519,30 ton atau sebesar 2,33%. Data produksi tangkap tahun 2020 per kabupaten kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Produksi
1	Banggai Kepulauan	12.017,50
2	Banggai	19.859,90
3	Morowali	39.351,80
4	Poso	9.824,90
5	Donggala	21.679,90
6	Toli-toli	24.601,70
7	Buol	12.449,30
8	Parigi Moutong	16.996,90
9	Tojo Una Una	13.579,70
10	Morowali Utara	1.945,70
11	Banggai Laut	27.789,50
12	Palu	998,50
13	Sigi	6,5
	Total	201.101,80

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021

Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga mengembangkan beberapa inovasi dibidang kelautan perikanan yang bertujuan untuk peningkatan dan pengelolaan produksi perikanan. Inovasi-inovasi yang dikembangkan tersebut adalah :

a. Bandeng bebas duri (BABERI)

Sebagai ikan komoditas pangan, bandeng menempati urutan pertama dalam pemenuhan omega 3 sebesar 14,20% diatas Sarden, Salmon dan Tuna. Energi yang dihasilkan Bandeng adalah sebesar 129 kkal, protein sebesar 20 gr, lemak 4,8 gr, kalsium 20 mg, fosfor 150 mg, zat besi 2 mg serta mengandung vitamin A dan B1. Bandeng bebas duri merupakan salah satu diversifikasi produk olahan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah. Produk ini cukup diminati yang dapat dilihat dari permintaan pasar yang besar terutama pada bandeng dengan ukuran 500-600 gram perekorannya. Proses pengolahan bandeng bebas duri tidak hanya dilakukan oleh karyawan dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi tengah, namun juga ditularkan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelatihan. Tahun 2020 dilakukan pelatihan cabut duri untuk bandeng bagi UMKM di Kota Palu.

b. Pengembangan Rumput Laut Sistem Kultur Jaringan

Sistem kultur jaringan merupakan salah satu solusi dalam menyediakan bibit rumput laut berkualitas. Inovasi ini telah dimulai sejak tahun 2018 melalui MoU dengan BIOTROP, pelatihan aparatur serta ujicoba pengembangan RL bibit kultur jaringan.

c. Kolam budidaya hemat air

Kolam budidaya hemat air merupakan inovasi dibidang budidaya ikan yang dikembangkan dengan menggunakan terpal. Budidaya ini diaplikasikan terutama pada daerah-daerah sulit air, misalnya Sigi dimana pasca bencana mengalami sulit air. Budidaya ini menggunakan terpal yang dapat dipadukan dengan sistem bioflok dengan komoditas ikan nila, lele dan mas.

d. Kolam Ikan Semi Intensif Teknologi Bioflok

Bioflok berasal dari kata "Bios" artinya kehidupan dan "Floc atau Flock" artinya gumpalan. Bioflok bias diartikan sebagai kumpulan dari berbagai campuran heterogen mikroba (plankton, protozoa, fungi), partikel, polimenorganik, koloid dan kaiton yang saling berinteraksi dengan sangat baik di dalam air yang tergabung dalam gumpalan (flok). Teknologi bioflok adalah teknik manajemen kualitas air yang didasarkan padapertumbuhan dan pengendalian bakteri Heterotrof di dalam sistem budidaya dengan *zero water exchange* (sistem pemeliharaan tanpa adanya pergantian air).

Penerapan sistem bioflok dalam budidaya ikan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan budidaya ikan sistem konvensional diantaranya: (1) Mengurangi beban limbah yang berada padamedia budidaya, (2) Hemat air (Efisiensi penggunaan

Air), (3) Padat tebar tinggi hingga 250 ekor/m³ pada Ikan Nila, (4) Produktivitas tinggi, (5) Meningkatkan efisiensi pakan/ Food Conversion Ratio (FCR) hingga 0.7–0.9, (6) Pemanfaatan lahan lebih efisien (pemanfaatan lahan sempit), (7) Produksi dan hasil limbah yang lebih sedikit dan (8) Ramah lingkungan.

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan ini didukung oleh program :

- Program pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
- Program pengelolaan daya saing produk kelautan dan perikanan
- Program pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Data nilai ekspor hasil perikanan 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Nilai ekspor hasil perikanan Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US\$ 3.227.836	68,31%	US\$ 4.961.250	100,2%	US\$ 3.763.124,02	117,60%	US\$ 3.763.124,02	106,90%	US\$ 3.784.000	99,45

Tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2017 terealisasi sebesar US\$ 3.227.836 dengan capaian 68,31%, lalu pada tahun 2018 terealisasi terealisasi US\$ 4.961.250 dengan capaian 100,2% sedangkan pada tahun 2019 terealisasi US\$ 3.763.124,02 dengan capaian 117,60% atau terjadi peningkatan sebesar 17,36% dibandingkan tahun 2018. Namun pada tahun 2020 Nilai ekspor hasil perikanan mengalami penurunan sebesar 10% karena hanya terealisasi sebesar US\$ 3.763.124,02 dengan capaian kinerja 106,90%, akan tetapi nilai ini masih angka sementara karena data penerbitan *Health Certificate* (HC) yang merupakan data yang digunakan untuk menghitung nilai ekspor perikanan masih dalam proses validasi sehingga nilai ini masih akan berubah nantinya. Tingginya capaian kinerja ini disebabkan karena adanya revisi target Nilai ekspor hasil perikanan dalam RPJMD. Pencapaian tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 99,45% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Jenis komoditi perikanan yang diekspor dari Sulawesi Tengah selama Tahun 2020 antara lain: Gurita beku, fillet ikan beku dan sotong beku, dengan negara tujuan Perancis, China, Malta, USA, Vietnam, Slovenia dan Reunion. Komoditas dan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2020

No	Komoditas	Volume (kg)	Nilai Ekspor (US\$)
1	Gurita beku	514.069,78	2.917.790,67
2	Fillet ikan beku	68.996,06	381.180,16
3	Sotong beku	99.735.000	464.153,02
	TOTAL	682.800,04	3.763.124,02

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng, 2021

SASARAN STRATEGIS 20

Tuntasnya Angka Melek Aksara

Angka Melek Aksara adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, Angka Melek Aksara digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah.

Data persentase angka melek aksara di Sulawesi Tengah 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel bawah ini :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase angka melek aksara Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Angka Melek Aksara	96,1%	98,11%	96,50%	98,65%	96,53%	97,75%	96,50%	97,13%	99,25-100%	96,50%

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase angka melek aksara di Sulawesi Tengah selama 4 tahun berturut-turut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 persentase angka melek aksara terealisasi sebesar 96,1% dengan capaian kinerja sebesar 98,11%. Terjadi kenaikan 0,41% pada tahun 2018, dimana persentase angka melek aksara tahun 2018 terealisasi sebesar 96,50% dengan persentase capaian 98,65%. Kemudian pada tahun 2019 persentase angka melek aksara tercatat sebesar 96,53% atau naik sebesar 0,03% dari tahun 2018, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,03% dimana persentase angka melek aksara terealisasi sebesar 96,50% dengan persentase capaian 97,13%. Terhadap target RPJMD tahun 2021, pencapaian persentase angka melek aksara ini telah memberikan kontribusi sebesar 96,50%.

Target penuntasan melek aksara merupakan bagian dari fokus pembangunan di Sulawesi Tengah, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan seperti pembangunan pemerataan ekonomi dan sosial.

Strategi yang digunakan dalam rangka mengurangi melek aksara di Sulawesi Tengah adalah melalui program Keaksaraan Fungsional (KF) Dasar berdasarkan data by name by address. Dalam pemberantasan buta aksara harus jelas sasarannya, siapa orangnya dan dimana tempat tinggalnya. Program ini akan fokus dilaksanakan di wilayah-wilayah khusus atau wilayah yang sulit dijangkau, karena sebagian besar penduduk buta aksara pada umumnya tinggal di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau seperti pada beberapa daerah di Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Tojo Una-una. Kendala yang menjadi tantangan dalam program ini selain wilayahnya yang terpencil, juga adalah faktor kemauan warga belajar, karena itu perlu pendekatan khusus yang menggunakan bahasa lokal (daerah) dari para tutor untuk bagaimana memotivasi warga sasaran untuk mau menjadi warga belajar.



Sasaran Strategis 21 “Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Untuk Menuntaskan Pendidikan Dasar dan Pengembangan Pendidikan Menengah” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Rinciannya sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usia pada jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/MA/SMK/Paket C di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel bawah ini

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	104,00%	97,7%	103%	98,10%	104,30%	105,62%	104,00%	100%	102,75-103,75%	100,24%
2	SMP/MTs/Paket B	91,50%	99,6%	92%	99,66%	92,30%	99,66%	92,50%	99,19%	93,00-93,75%	98,66%
3	SMA/MA/SMK/Paket C	83,50%	99,6%	83,75%	99,41%	84,75%	99,88%	85,25%	100%	85,00-85,75%	99,41%

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 APK SD/MI/Paket A terealisasi 104,00% dengan capaian kinerja 97,7%, sementara tahun 2018 turun menjadi 103% dengan capaian kinerja 98,10%. Sedangkan tahun 2019 APK SD/MI/Paket A tercatat sebesar 104,30% dengan capaian kinerja 105,62% atau naik 1,26% dibanding tahun 2018. APK SD/MI/Paket A Pada tahun 2020 terealisasi sebesar 104,00% dengan capaian kinerja 100%. Pencapaian APK SD/MI tahun 2020 ini terhadap akhir RPJMD tahun 2021 sebesar 100,24% dan telah melebihi target yang ditentukan.

Selanjutnya APK SMP/MTs/Paket B tahun 2017 terealisasi sebesar 91,50% dengan capaian kinerja 99,6%, lalu terjadi peningkatan 0,55% di tahun 2018 dimana APK SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 92% dengan capaian kinerja 99,66%. Kemudian pada tahun 2019 terealisasi sebesar 92,30% dengan capaian kinerja sebesar 99,66% dan pada tahun 2020 APK SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 92,50% dengan capaian kinerja

99,19%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021 telah memberikan kontribusi sebesar 98,66%.

Sedangkan APK SMA/MA/SMK/Paket C selama 4 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Tahun 2017 terealisasi sebesar 83,50% dengan capaian kinerja 99,6%, lalu pada tahun 2018 terealisasi sebesar 83,75% dengan capaian kinerja 99,41% atau naik 0,29% dibanding tahun 2017. Kemudian tahun 2019 APK SMA/MA/SMK/Paket C terealisasi sebesar 84,75% dengan capaian kinerja 99,88% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 85,25% dengan capaian kinerja 100%. Terhadap target RPJMD tahun 2021 APK SMA/MA/SMK/Paket C telah memberikan kontribusi sebesar 98,41%.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Pencapaian APM SD/ MI/ Paket A, SMP/ MTs/ Paket B dan SMA/ MA/ SMK/ Paket C di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	92,50%	99,7%	103%	99,00%	94,00%	99,47%	94,00%	99,20%	94,5-96,25%	97,66%
2	SMP/MTs/Paket B	72,00%	99,4%	73,00%	99,32%	74,00%	99,66%	74,00%	98,99%	74,50-75,25%	98,33%
3	SMA/MA/SMK/Paket C	64,50%	99,36%	64,75%	98,85%	65,75%	99,62%	66,00%	99,24%	66,00-70,00%	94,28%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2017 APM SD/MI/Paket A terealisasi 92,50% dengan capaian kinerja 99,7%, sementara tahun 2018 naik menjadi 103% dengan capaian kinerja 93,00%. Kemudian pada tahun 2019 APM SD/MI/Paket A kembali turun karena hanya terealisasi sebesar 94,00% dengan capaian kinerja 99,47% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 94,00% dengan capaian kinerja 99,20%. Pencapaian APM SD/MI tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 97,66% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Selanjutnya APM SMP/MTs/Paket B tahun 2017 terealisasi sebesar 72,00% dengan capaian kinerja 99,4%, terjadi peningkatan 1,39% di tahun 2018 dimana APM SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 73% dengan capaian kinerja 99,32%. Kemudian pada tahun 2019 APM SMP/MTs/Paket B terealisasi sebesar 74,00% dengan capaian kinerja 99,66% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 74,00% dengan capaian kinerja 98,99%. Pencapaian APM SMP/MTs/Paket B tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 98,33% terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

Sedangkan APM SMA/MA/SMK/Paket C tahun 2017 terealisasi sebesar 64,50% dengan capaian kinerja 99,36% dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 64,75% dengan capaian kinerja 98,85%. Kemudian tahun 2019 APM SMA/MA/SMK/Paket C terealisasi sebesar 65,75% dengan capaian kinerja 99,62% atau naik 1,54% dibanding tahun 2018, dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 66,00% dengan capaian kinerja 99,24%. Terhadap target RPJMD tahun 2021, pencapaian tahun 2020 telah memberikan kontribusi sebesar 94,28%.

Pencapaian sasaran meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memasukan kurikulum muatan lokal agar selaras dengan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat meningkatkan akses keterampilan hidup bagi peserta didik. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan dan pencapaian pelaksanaan pendidikan ditingkat sekolah terutama dalam rangka mengatasi pengaruh krisis ekonomi di era globalisasi.

Dalam rangka perluasan akses pendidikan, upaya yang dilakukan adalah menambah ketersediaan sekolah yakni ketersediaan sarana pendidikan yang memadai. Selain keberadaan gedung sekolah yang memadai, ketersediaan guru terhadap murid akan berkorelasi terhadap peningkatan mutu dan pemenuhan hak warga atas pendidikan. Pada

Tahun 2020, rasio guru terhadap murid (SD/MI) perkelas rata-rata 27 siswa/guru, rasio guru terhadap murid pada tingkat SMP/MTs perkelas rata-rata 27 siswa/guru dan rasio guru terhadap murid pada tingkat SMA/MA/SMK perkelas rata-rata juga mencapai 27 siswa/guru.

Capaian yang telah diuraikan diatas berkaitan dengan 2 sasaran strategis yaitu tuntasnya angka melek aksara dan meningkatnya akses dan mutu pendidikan untuk meningkatkan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah telah dilakukan melalui program-program berikut ini:

- Program fasilitasi tugas pembantuan kependidikan.
- Program pembinaan pendidikan menengah atas.
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- Program pendidikan menengah kejuruan.
- Program BOS di Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.



Sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan indikator kinerja Angka Usia Harapan Hidup ini didukung oleh Program:

1. Program manajemen pembangunan kesehatan.
2. Program upaya kesehatan masyarakat.
3. Program upaya perbaikan gizi masyarakat.
4. Program upaya kesehatan lingkungan.
5. Program upaya pengendalian penyakit menular dan imunisasi.
6. Program upaya pengendalian penyakit tidak menular.
7. Program upaya kesehatan perorangan.
8. Program upaya pembiayaan jaminan kesehatan.
9. Program upaya pelayanan kesehatan primer.
10. Program upaya penyediaan SDM kesehatan.

Data usia harapan hidup di Sulawesi Tengah 4 tahun dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Angka Usia Harapan Hidup	67,35 Thn	101%	67,32 Thn	99,96%	67,78 Thn	99,5%	67,78 Thn	99,67%	68 Thn	99,67%

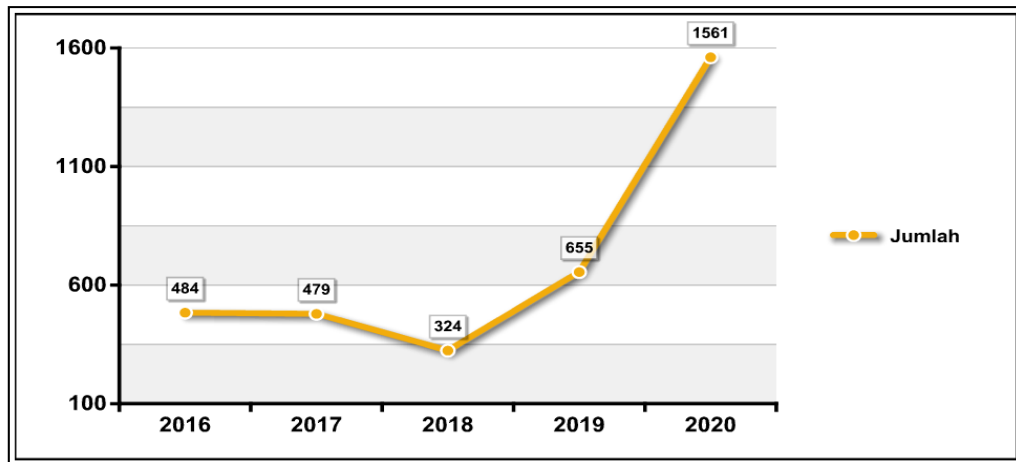
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Usia Harapan Hidup di Sulawesi Tengah tahun 2017 sebesar 67,35 tahun dengan capaian kinerja 101%, namun pada tahun 2018 turun 0,04% menjadi 67,32 tahun dengan capaian kinerja 99,96%. Selanjutnya pada tahun 2019 angka usia harapan hidup di Sulawesi Tengah tercatat 67,78 tahun dengan capaian kinerja 99,5% atau naik 0,68% dibandingkan tahun 2018, dan pada tahun 2020 realisasi angka usia harapan hidup sama dengan tahun 2019 yaitu 67,78 tahun dengan capaian kinerja 99,67%. Pencapaian angka usia harapan hidup tahun 2020 ini telah memenuhi 99,67% dari target akhir RPJMD tahun 2021.

Indikator angka usia harapan hidup ini merupakan keberhasilan program bidang kesehatan, yang mana bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam pencapaiannya melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama antara unsure pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat secara keseluruhannya.

Beberapa trend juga menunjukkan dinamika dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah, sebagai contoh adalah trend tentang prevelensi balita gizi buruk. Tahun 2019 jumlah kasus balita gizi buruk di Sulawesi Tengah meningkat menjadi 1.561 orang melebihi target yaitu 430 kasus dan target akhir RPJMD tahun 2021 yaitu 400 kasus. Kasus gizi buruk ini ditangani secara rawat jalan maupun rawat inap dengan penanganan sesuai prosedur Tatalaksana Gizi Buruk. Penanganan kasus gizi buruk juga dilakukan di Therapic Feeding Centre (TFC), Community Feeding Centre (CFC), Puskesmas Perawatan maupun RumahSakit.

Trend Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Sulawesi Tengah

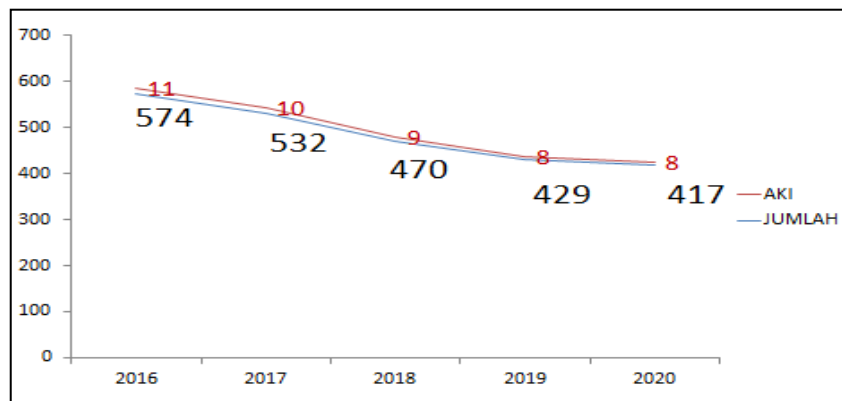
Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa kasus gizi buruk dari tahun 2016 - 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah kasus gizi buruk. Selain gizi buruk, angka kematian bayi ini juga merupakan salah satu indikator yang sangat sensitif untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat disuatu wilayah. Trend jumlah dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sulawesi Tengah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Trend Jumlah dan Angka Kematian Bayi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sulteng, 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dari 5 tahun terakhir jumlah dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Sulawesi Tengah sudah mengalami penurunan meskipun belum signifikan. Jumlah kematian tahun 2016 sebanyak 574 turun menjadi 532 pada tahun

2017 dan turun menjadi 429 tahun 2019 dan tahun 2020 juga mengalami penurunan yaitu sebanyak 417. Dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan diharapkan jumlah kematian bayi (neonates dan post neonatus) diharapkan akan terus mengalami penurunan. Intervensi-intervensi yang dapat mendukung kelangsungan hidup anak ditujukan untuk dapat menurunkan AKB menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2024.

Pencapaian kinerja AKB ini di dukung dengan beberapa kegiatan antara lain:

- Program SALAMA INA (Selamatkan Ibu dan Anak) bertujuan mendekatkan akses pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan. Adapun bentuk kegiatannya meliputi antenatal care (pemeriksaan kehamilan), Pertolongan persalinan dan nifas, Pelayanan Komplikasi, Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi serta pelayanan bayi baru lahir sesuai standar.
- Mengoptimalkan pelaksanaan kelas ibu hamil yang bertujuan untuk mempersiapkan ibu agar dapat melalui proses persalinan dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat.

Adapun Hambatan dalam pencapaian angka usia harapan ini antara lain :

1. Masih tingginya kasus-kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular
2. Distribusi tenaga kesehatan yang berkompeten dalam penanganan kasus penyakit belum terdistribusi di fasilitas kesehatan
3. Pengetahuan di masyarakat masih kurang mengenai upaya-upaya preventif dan promotif dibidang kesehatan
4. Jumlah kematian bayi baru lahir diatas target

Strategi dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator angka usia harapan hidup ini antara lain :

1. Melakukan pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
2. Advokasi dengan Pemerintah Daerah tentang kebutuhan tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan wilayah kerja.
3. Penguatan kemitraan dengan kelompok masyarakat dalam hal pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan.

**SASARAN
STRATEGIS 23**

**Suksesnya Keluarga Berencana dan Terciptanya
Keluarga Berkualitas**

Sasaran Strategis 23 “Suksesnya Keluarga Berencana dan Terciptanya Keluarga Berkualitas” memiliki 2 indikator kinerja, yaitu Cakupan Peserta KB Aktif dan Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Rinciannya sebagai berikut :

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Data Realisasi dan capaian kinerja peserta KB aktif 4 tahun terakhir dan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perbandinganrealisasi kinerja dan capaian kinerja Cakupan peserta KB aktif Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Cakupan Peserta KB Aktif	78%	90,2%	77%	88,74%	78%	89,85%	78,1%	89,96%	87,01%	89,75%

Data yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa cakupan peserta KB aktif tahun 2017 sebesar 78% dengan capaian kinerja 90,2%. Terjadi penurunan 1% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yaitu sebesar 77% dengan capaian kinerja 88,74%. Selanjutnya pada tahun 2019 cakupan peserta KB aktif terealisasi sebesar 78% dengan capaian kinerja 89,85%, dan pada tahun 2020 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Sulawesi Tengah sebesar 554.709 dengan cakupan peserta KB aktif sebesar 433.304 atau sebesar 78,1% dengan capaian kinerja sebesar 89,96%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, cakupan peserta KB aktif tahun 2020 ini telah memberikan kontribusi sebesar 89,75%.

Peserta KB Aktif Menurut Alat Kontrasepsi Tahun 2020

NO.	KABUPATEN/ KOTA	IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	SUNTIK	PIL	TOTAL PA	JUMLAH PUS	% PA TDDP JUMLAH PUS	PPM	PA/PPM
1.	BANGGAI	4.172	1.096	99	405	8.539	23.125	16.425	53.861	65.961	81,7	47.085	114,4
2.	POSO	3.050	1.528	163	112	2.940	12.466	8.739	28.998	44.082	65,8	34.365	84,4
3.	DONGGALA	1.438	803	254	500	6.922	22.585	17.713	50.215	59.883	83,9	37.268	134,7
4.	TOLI TOLI	1.383	551	80	187	5.140	12.405	8.508	28.249	40.094	70,5	24.777	114,0
5.	BUOL	896	708	97	165	2.422	8.825	6.753	19.866	24.797	80,1	18.546	107,1
6.	MOROWALI	8.480	777	14	211	2.940	10.377	3.735	26.534	31.182	85,1	16.484	161,0
7.	BANGGAI KEPULAUAN	536	212	5	63	1.839	7.123	6.013	15.791	21.488	73,5	11.243	140,5
8.	PARIGI MOUTONG	3.483	2.963	195	901	8.611	34.633	22.823	73.609	93.624	78,6	66.380	110,9
9.	TOJO UNAUNA	1.211	730	6	276	2.960	10.531	6.898	22.612	29.519	76,6	24.375	92,8
10.	SIGI	3.439	1.087	116	354	5.285	18.834	14.069	43.184	51.675	83,6	38.850	111,2
11.	BANGGAI LAUT	311	122	12	82	1.497	3.225	2.768	8.017	11.467	69,9	7.294	109,9
12.	MOROWALI UTARA	1.221	724	15	63	3.928	6.694	3.828	16.473	20.705	79,6	12.040	136,8
13.	KOTA PALU	5.794	2.412	61	1.794	4.592	17.937	13.305	45.895	60.232	76,2	45.835	100,1
	SULAWESI TENGAH	35.414	13.713	1.117	5.113	57.615	188.760	131.572	433.304	554.709	78,1	384.542	112,7

Sumber : BKKBN Perwakilan Sulteng, 2021

Kendala/permasalahan ketidakefektifan capaian indikator kinerja ini juga disebabkan adanya faktor lain seperti :

1. Kegiatan pembinaan dan koordinasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi belum maksimal
2. Pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB baru selain dilayani pada klinik KB dan tenaga kesehatan, mereka juga adalah peserta KB mandiri yang secara mandiri membeli pil KB, kondom pada apotik sehingga tidak tercatat sebagai peserta KB baru.
3. Meningkatnya pasangan usia subur yang menggunakan KB alami seperti pantang berkala maupun unmednet, dimana mereka tidak terlayani oleh pelayanan KB karena berada di wilayah kepulauan dan perbatasan;
4. Jumlah penyuluh KB (PLKB) yang terbatas disebabkan karena terjadinya alih tugas dan fungsi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural;
5. Terbatasnya tenaga penyuluh yang ada dilapangan sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi tentang KB dan kesehatan reproduksi;
6. Belum optimalnya penyuluhan para pelayanan kontrasepsi yang dilakukan tenaga kesehatan dan PLBK sehingga pasangan usia subur belum mendapatkan informasi yang akurat tentang jenis dan alat kontrasepsi yang sesuai untuk mereka.

Keberhasilan program Keluarga Berencana akan sangat berkorelasi dengan Laju Pertumbuhan Penduduk. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana yang didukung oleh perbaikan ekonomi secara umum. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk yang akan mempengaruhi kualitas dan kesejahteraan penduduk itu sendiri. Program KB dirancang untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma

keluarga kecil yang bahagia sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

Sasaran Strategis suksesnya keluarga berencana dan terciptanya keluarga berkualitas dengan indikator persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I ini didukung oleh program :

- Program pelayanan kontrasepsi
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam KB
- Program Keluarga Berencana.

Data realisasi capaian persentase keluarga dan pra sejahtera I dengan capaian akhir RPJMD dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan capaian Tahun 2020 terhadap Target akhir RPJMD

No	IKU	2017		2018		2019		2020		Target RPJMD 2021	Capaian 2020 THD RPJMD
		realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian	realisasi	Capaian		
1	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	68,4%	50,4%	68,13%	45,41%	65,48%	60,77%	65,48%	54,65%	35%	12,91%

Gambar diatas menunjukkan bahwa persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I tahun 2017 sebesar 68,4% dengan capaian kinerja 50,4%, terjadi kenaikan 0,39% pada tahun 2018, dimana tahun 2018 persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I terealisasi sebesar 68,13% dengan capaian kinerja hanya sebesar 45,41%. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi kinerja persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I adalah sebesar 65,48% dengan capaian kinerja sebesar 60,77% dan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 65,48% dengan capaian kinerja sebesar 54,65%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I tahun 2020 sebesar 12,91%.

**Rekapitulasi Tahapan Keluarga Sejahtera
Sulawesi Tengah Tahun 2020**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELUARGA	TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA		
			PRA SEJAHTERA	SEJAHTERA 1	SEJAHTERA 2
(1)	(2)	(3)	(27)	(28)	(29)
1.	Banggai	96.523	16.990	49.911	29.622
2.	Poso	56.546	8.527	25.803	22.216
3.	Donggala	71.979	8.976	42.324	20.679
4.	Toli-Toli	54.182	3.833	30.615	19.735
5.	Buol	34.138	4.573	17.470	12.095
6.	Morowali	29.156	2.700	14.964	11.492
7.	Banggai Kepulauan	33.106	7.682	17.050	8.374
8.	Parigi Mautong	112.638	19.259	52.009	41.370
9.	Tojo Una-Una	36.408	5.932	17.190	13.286
10.	Sigi	62.698	11.951	29.921	20.826
11.	Banggai Laut	17.455	2.539	8.702	6.214
12.	Morowali Utara	28.488	4.618	13.838	10.032
13.	Kota Palu	76.181	9.691	37.515	28.975
JUMLAH		709.498	107.271	357.312	244.916

Sumber : BKKBN Sulteng, 2021

Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 709.498 keluarga. Dari jumlah tersebut sebanyak 107.271 keluarga yang masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera dan 357.312 keluarga yang masuk dalam kategori keluarga sejahtera I. Sehingga jika dipersentasekan, terdapat 65,48% keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan; sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan akses dalam kredit barang/peralatan dan lokasi tempat tinggal. Sementara itu, unsur manajemen sumber daya keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah perencanaan, pembagian tugas dan pengontrolan kegiatan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBN Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten /Kota.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan bagi daerah dan desa. Oleh sebab itu pengelolaan anggaran yang pelimpahan sebagian urusan pemerintah dalam pelaksanaan penugasan tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab taat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa kepatutan dalam menyampaikan laporan dari setiap pelaksanaan kegiatan.

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Gubernur selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melakukan penetapan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang akan melengkapi mekanisme dan instrumen tata hubungan pembangunan antara pemerintah Pusat dan Daerah.

Tugas Pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan dan sanksi. Pendanaan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan fisik, yang

pelaporannya dilakukan secara berjenjang dari Perangkat Daerah pengelola Dana Tugas Pembantuan kepada Bappeda Provinsi setiap triwulan. Adapun Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148).

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI

Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga memberikan Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan segala urusan Pemerintahan. Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan untuk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 sejumlah **Rp. 121.525.123.000,-** dengan penyerapan anggaran sejumlah **Rp. 121.072.566.562,-** atau **99,63** persen,- sedangkan realisasi fisik sebesar **99,99** persen, dengan demikian sisa anggaran Tugas Pembantuan pada lingkup Provinsi sejumlah **Rp. 452.556.438,-** , alokasi anggaran tersebut tersebar pada 8 program dan 29 kegiatan.

Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, telah mengatur tentang hal-hal terkait dengan pola dan mekanisme pendanaan Tugas Pembantuan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara kegiatan Tugas Pembantuan. Adapun Pendanaan Tugas Pembantuan yang dialokasikan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 melalui Kementerian sebagai berikut :

1. Kementerian Pertanian terdiri dari 2 (dua) PD yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kementerian Sosial yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun Anggaran 2020 pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, telah terlaksana secara maksimal dengan capaian pelaksanaan kegiatan secara umum mencapai 100,00 persen, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2020 Menurut Perangkat Daerah

NO.	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI			SISA DANA	KET
			KEUANGAN		FISIK		
			(Rp.)	(%)			
1	2	3	4	5	6	6	7
1.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	72,707,594,000	72,427,571,287	99.61	100.00	280,022,713	
2.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	22,551,541,000	22,402,487,555	99.33	99.94	149,053,445	
3.	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	960,664,000	958,014,000	99.72	100.00	2,650,000	
4.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	6,410,284,000	6,408,318,290	99.97	100.00	1,965,710	
5.	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	18,895,040,000	18,876,175,430	99.90	100.00	18,864,570	
JUMLAH TOTAL		121,525,123,000	121,072,566,562	99.63	99.99	452,556,438	

Tabel III.2
Matriks Pelaksanaan Tugas Pembantuan Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2020

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	OPD/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				KET
						KEUANGAN		CAPAIAN KEGIATAN		
						(Rp.)	(%)	(NARASI)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Permen Pertanian RI No. 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman - Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman - Kawasan Kedelai - Kawasan Ubi Kayu - Kawasan Kacang Tanah - Kawasan Kacang Hijau - Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah) - Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia - Kawasan Padi - Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi (Daerah) - Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan - Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat - Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah) - Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan - Sarana Pascapanen Tanaman Pangan - Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan - Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan - Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan - Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat) 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian - Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian - Jaringan Irigasi Tersier - Irigasi Perpompaan - Embung Pertanian - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Layanan Dukungan Manajemen Satker		72,707,594,000	72,427,571,287	99.61		100.00	
					56,706,554,000	56,441,088,337	99.53		100.00	
					11,119,919,000	10,886,044,100	97.90	- Meningkatkan Produksi Kedelai	100.00	
					6,952,055,000	6,950,016,250	99.97	- Terpuhinya Kebutuhan Komoditas aneka kacang dan Umbi Tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor	100.00	
					28,850,400,000	28,837,256,365	99.95	- Meningkatkan Produksi Padi dan Jagung	100.00	
					1,478,840,000	1,469,490,132	99.37	- Terpuhinya Kebutuhan Perbenihan Tanaman Pangan untuk Produksi Pangan Strategis Tanaman Pangan - Terpuhinya Kebutuhan Perbenihan Tanaman Pangan untuk Komoditas Ekspor dan Pengendali Impor	100.00	
					8,305,340,000	8,298,281,490	99.92	- Terwujudnya Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Ditjen Tanaman Pangan - Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel di Lingkungan Ditjen Tanaman Pangan - Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan	100.00	
					16,001,040,000	15,986,482,950	99.91	- Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor - Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan	100.00	
					9,720,000,000	9,720,000,000	100.00	- Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air keseluruh lahan pertanian	100.00	
					2,207,820,000	2,206,904,050	99.96	- Terlaksananya Birokrasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif dan Efisien	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida <ul style="list-style-type: none"> - e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pestisida - Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian 		3,118,300,000	3,106,458,900	99.62	- <i>Optimalnya Distribusi pupuk dan pestisida meningkatkan pertanian nasional</i>	100.00	
					954,920,000	953,120,000	99.81	- <i>Meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian</i>	100.00	
2.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Permen Pertanian RI No. 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV. SULTENG		22,551,541,000	22,402,487,555	99.34		99.94	
			1) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan		13,298,665,000	13,244,803,305	99.59		99.90	
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Kopi - Kawasan Kakao - Kawasan Kelapa - Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan - Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Dukungan Manajemen Satker - Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan - Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan - Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan - Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan - Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 	12 Kabupaen dan Kota	2,133,374,000	2,125,830,300	99.65	- <i>Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar</i>	99.97	Terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak mencapai target 100 persen realisasi fisik, karena diakibatkan beberapa OP Perjalanan Dinas tidak terlaksana karena penyebaran Covid 19
				12 Kabupaen dan Kota	446,591,000	446,496,800	99.98	- <i>Terkendalnya OPT dan tertangannya gangguan usaha dan DPI terhadap luas tanaman Perkebunan</i>	100.00	
				12 Kabupaen dan Kota	3,375,582,000	3,357,776,000	99.47	- <i>Terwujudnya akuntabilitas kerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan</i>	99.92	
				12 Kabupaen dan Kota	269,200,000	265,957,925	98.80	- <i>Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk komoditas ekspor</i>	99.14	
								- <i>Tersedianya infrastruktur pertanian perkebunan pasca panen</i>		
				12 Kabupaen dan Kota	7,073,918,000	7,048,742,280	99.64	- <i>Terpenuhinya kebutuhan perbenihan perkebunan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor</i>	99.81	
								- <i>Jumlah kelembagaan produksi dan pengawasan benih</i>		
								- <i>Jumlah varietas unggul komoditas perkebunan yang dilepas</i>		
			2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		4,833,020,000	4,830,615,700	99.95		100.00	
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Irigasi Perpompaan (<i>Base Line</i>) - Embung Pertanian (<i>Base Line</i>) - Irigasi Perpipaian 	12 Kabupaen dan Kota	2,850,000,000	2,849,880,000	100.00	- <i>Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian</i>	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Kabupaen dan Kota	1,958,020,000	1,955,735,700	99.88		100.00	
			- Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian	12 Kabupaen dan Kota	25,000,000	25,000,000	100.00	- Meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	100.00	
			3) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat		4,419,856,000	4,327,068,550	97.90		100.00	
			- Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak - Hijauan Pakan Ternak	12 Kabupaen dan Kota	21,000,000	21,000,000	100.00	- Tersedianya pakan hewan untuk produksi dalam mendukung ekspor maupun substitusi impor produk pangan hewani asal ternak - Tersedianya pakan hewan untuk mendukung produksi pangan strategis nasional	100.00	
			- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan - Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	12 Kabupaen dan Kota	570,500,000	570,294,900	99.96	- Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional - Terpenuhi kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional - Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	100.00	
			- Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak - Optimalisasi Reproduksi - Pengembangan unggas dan aneka ternak	12 Kabupaen dan Kota	3,141,100,000	3,050,974,350	97.13	- Meningkatnya Volume Ekspor untuk Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak - Menurunnya Volume Impor untuk Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak - Terpenuhi Kebutuhan Daging Sapi dan Kerbau Nasional	100.00	
			- Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) - Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH - Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk - Pengendalian Pematangan Betina produktif	12 Kabupaen dan Kota	102,000,000	101,554,100	99.56	- Meningkatnya kualitas ekspor pangan dan non pangan asal ternak serta kesejahteraan ternak - Terpenuhi kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional - Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan - Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia - Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan - Layanan Dukungan Manajemen Satker 	12 Kabupaen dan Kota	462,900,000	461,464,900	99.69	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan - Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan - Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 	100.00		
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Kelembagaan dan Usaha Peternakan 	12 Kabupaen dan Kota	122,356,000	121,780,300	99.53	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak Nasional - Meningkatnya Efektivitas Pengolahan Pangan dan Non Pangan Hewani Asal Ternak 	100.00		
3.	KEMENTERIAN SOSIAL	Permen Sosial RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Rengasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH		960,664,000	958,014,000	99.72		100.00		
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Sosial - Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat - Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan - Layanan Dukungan Manajemen Satker 	Kabupaten Sigi Desa Bangga Kec. Dolo Selatan dan Kabupaten Parigi Moutong Desa Patingke Kec. Tinombo	960,664,000	958,014,000	99.72		100.00		
					960,664,000	958,014,000	99.72		100.00		
4.	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI		DINAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. SULTENG		6,410,284,000	6,408,318,290	99.97		100.00		
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - Kegiatan Pengembangan Usaha Transmigrasi - Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonominya - Kegiatan Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi - Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya - Kegiatan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi - Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran - Kasus tanah transmigrasi yang diselesaikan 		6,410,284,000	6,408,318,290	99.97		100.00		
					166,284,000	166,279,600	100.00	- Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	100.00		
					1,834,620,000	1,833,885,000	99.96	- Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agrobisnis dan Agroindustri	100.00		
					3,898,730,000	3,898,503,690	99.99	- Jumlah Kawasan Transmigrasi / UPT yang Dikembangkan Layanan Sosial Budayanya	100.00		
					510,650,000	509,650,000	99.80	- Jumlah Bidang Tanah yang difasilitasi Penerbitan Hak Milik atas Tanah Transmigran	100.00		
								- Jumlah Kasus Pertanahan Transmigrasi Yang Diselesaikan			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Permen PUPR No. 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROV. SULTENG - Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA - Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara - Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara - Layanan Dukungan Manajemen Satker	Kab. Sigi (Kec. Gumbasa, Kec. Tanambulava) Kota Palu (Kec. Palu Selatan) Kab. Parigi Moutong (Kec. Balinggi, Kec. Torue, Kec. Sausu, Kec. Bolano, Lambunu, Kec. Bolano) Kab. Banggai (Kec. Toili, Kec. Toili Barat, Kec. Batu, Kec. Batu Selatan) Kab. Tolitoli (Kec. Lampaso, Kec. Ogodeidi) Kab. Poso (Kec. Pamona Timur, Kec. Pamona Tenggara) Kab. Morowali Utara (Kec. Mori Atas) Kota Palu	18,895,040,000 18,895,040,000 18,895,040,000	18,876,175,430 18,876,175,430 18,876,175,430	99.90 99.90 99.90		100.00 100.00 100.00	
JUMLAH TOTAL					121,525,123,000	121,072,566,562	99.63		99.99	

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

❖ Kementerian Pertanian

a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran Tugas Pembantuan pada 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan, sebesar Rp. 72.707.594.000,- penyerapan anggaran sebesar Rp. 72.427.573.287,- atau 99,61 persen, realisasi fisk mencapai 100 persen, sementara sisa anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp. 280.020.713,- atau 0,39 persen, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

- Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :
 - Meningkatnya Produksi Kedelai;
 - Terpenuhinya Kebutuhan Komoditas aneka kacang dan Umbi Tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor;
- Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal; Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Meningkatnya Produksi Padi dan Jagung

- Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :
 - Terpenuhinya Kebutuhan Perbenihan Tanaman Pangan untuk Produksi Pangan Strategis Tanaman Pangan;
 - Terpenuhinya Kebutuhan Perbenihan Tanaman Pangan untuk Komoditas Ekspor dan Pengendali Impor;
 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan;
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :
 - Terwujudnya Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Dirjen Tanaman Pangan;
 - Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel di Lingkungan Dirjen Tanaman Pangan;
 - Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Dirjen Tanaman Pangan;
 - Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :
 - Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor;
 - Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :
 - Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor;
 - Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan;
 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :
 - Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor;
 - Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan;

- Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida;
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :
 - Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor;
 - Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan;
- Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian;
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian.

Tabel III.3

**Matriks Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan dan
Pternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020**

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	OPD/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				KET
						KEUANGAN		CAPAIAN KEGIATAN		
						(Rp.)	(%)	(NARASI)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Permen Pertanian RI No. 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SULTENG 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman - Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman - Kawasan Kedelai - Kawasan Ubi Kayu - Kawasan Kacang Tanah - Kawasan Kacang Hijau - Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah) - Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia - Kawasan Padi - Koordinasi, Bimbingan Teknis, monitoring dan evaluasi (Daerah) - Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan - Areal yang diberikan Bantuan Benih Padi Bersertifikat - Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Daerah) - Areal yang diberikan Bantuan Benih Jagung Bersertifikat - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dikjen Tanaman Pangan - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		72,707,594,000 56,706,554,000 11,119,919,000 6,952,055,000 28,850,400,000 1,478,840,000	72,427,571,287 56,441,088,337 10,886,044,100 6,950,016,250 28,837,256,365 1,469,490,132	99.61 99.53 97.90 99.97 99.95 99.37	- Meningkatnya Produksi Kedelai - Terpenuhiya Kebutuhan Komoditas aneka kacang dan Umbi Tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor - Meningkatnya Produksi Padi dan Jagung - Terpenuhiya Kebutuhan Perbenihan Tanaman Pangan untuk Produksi Pangan Strategis Tanaman Pangan - Terpenuhiya Kebutuhan Perbenihan Tanaman Pangan untuk Komoditas Ekspor dan Pengendali Impor - Terwujudnya Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Dikjen Tanaman Pangan - Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel di Lingkungan Dikjen Tanaman Pangan - Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Dirjen Tanaman Pangan	100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan - Sarana Pascapanen Tanaman Pangan - Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan - Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan - Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan - Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pusat) 		8,305,340,000	8,298,281,490	99.92	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendalian impor - Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan 	100.00	
			<ul style="list-style-type: none"> 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian - Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian - Jaringan Irigasi Tersier - Irigasi Perpompaan - Embung Pertanian - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Layanan Dukungan Manajemen Satker - Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida - e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pestisida - Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian 		16,001,040,000	15,986,482,950	99.91		100.00	
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian - Jaringan Irigasi Tersier - Irigasi Perpompaan - Embung Pertanian 		9,720,000,000	9,720,000,000	100.00	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Efektifitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air keseluruh lahan pertanian 	100.00	
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Layanan Dukungan Manajemen Satker 		2,207,820,000	2,206,904,050	99.96	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Birokrasi Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang efektif dan Efisien 	100.00	
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida - e-RDKK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pestisida 		3,118,300,000	3,106,458,900	99.62	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalnya Distribusi pupuk dan pestisida meningkatkan pertanian nasional 	100.00	
			<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian 		954,920,000	953,120,000	99.81	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian 	100.00	

b. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, alokasi anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 22.551.541.000,- penyerapan anggaran sebesar Rp. 22.402.487.555,- atau 99,33 persen dan realisasi fisik 99,94 persen yang terdapat pada 3 (tiga) program dan 14 (empat belas) kegiatan, dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 149.053.445,- atau 0,66 persen, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

- Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar
- Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan;
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan DPI terhadap luas tanaman Perkebunan;
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan;

Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan;

- Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :

- Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk komoditas ekspor;
- Tersedianya infrastruktur pertanian perkebunan pasca panen;

- Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan;

Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :

- Terpenuhinya kebutuhan perbenihan perkebunan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor;
- Jumlah kelembagaan produksi dan pengawasan benih;
- Jumlah varietas unggul komoditas perkebunan yang dilepas.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

- Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian;

Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian.

- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;

- Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian;

Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian

3. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

- Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak;

Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :

- Tersedianya pakan hewan untuk produksi dalam mendukung ekspor maupun substitusi impor produk pangan hewani asal ternak'
- Tersedianya pakan hewan untuk mendukung produksi pangan strategis nasional

- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;

Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :

- Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional;
 - Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional;
 - Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis.
- Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak;

Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :

- Meningkatnya Volume Ekspor untuk Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak;
 - Menurunnya Volume Impor untuk Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak;
 - Terpenuhinya Kebutuhan Daging Sapi dan Kerbau Nasional.
- Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);

Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :

- Meningkatnya kualitas ekspor pangan dan non pangan asal ternak serta kesejahteraan ternak;
 - Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional;
 - Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan;
 - Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional.
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan;

Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :

- Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan.
- Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak;
- Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :
- Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak Nasional;

- Meningkatnya Efektivitas Pengolahan Pangan dan Non Pangan Hewan Asal Ternak;

Tabel 3.5.2
Matriks Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2020

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	OPD/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				KET
						KEUANGAN		CAPAIAN KEGIATAN		
						(Rp.)	(%)	(NARASI)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Permen Pertanian RI No. 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV. SULTENG		22.551.541,000	22.400.487.555	99.33		99.94	
			1) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan		13.298.665,000	13.242.803,305	99.58		99.90	
			- Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	12 Kabupaten dan Kota	2.133.374,000	2.125.830,300	99.65	- Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas Tanaman Tahunan dan Penyegar	99.97	Beberapa keg. tidak mencapai 100 persen realisasi fisik, karena beberapa OP Perjalanan Dinas tidak terlaksana karena penyebaran Covid 19
			- Kawasan Kopi							
			- Kawasan Kakao							
			- Kawasan Kelapa							
			- Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan	12 Kabupaten dan Kota	446.591,000	446.496,800	99.98	- Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan DPI terhadap luas tanaman Perkebunan	100.00	
			- Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman							
			- Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun							
			- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	12 Kabupaten dan Kota	3.375.582,000	3.357.776,000	99.47	- Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan	99.92	
			- Layanan Dukungan Manajemen Satker							
			- Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	12 Kabupaten dan Kota	269.200,000	265.957,925	98.80	- Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk komoditas ekspor	99.14	
			- Sarana dan Prasarana Pasca panen tanaman perkebunan							
			- Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan							
			- Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan							
			- Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	12 Kabupaten dan Kota	7.073.918,000	7.046.742,280	99.62	- Terpenuhinya kebutuhan perbenihan perkebunan untuk komoditas ekspor dan pengendali impor	99.81	
			- Kebun Sumber Benih Bahan Tanam Komoditi Perkebunan							
			- Rekomendasi Benih Tanaman Perkebunan							
			- Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Perkebunan							
			- Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan							
			- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian		4.833.020,000	4.830.615,700	99.95		100.00	
			- Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	12 Kabupaten dan Kota	2.850.000,000	2.849.880,000	100.00	- Meningkatnya efektivitas dan efisiensi irigasi pertanian dalam mendistribusikan air ke seluruh lahan pertanian	100.00	
			- Irigasi Perpompaan (Base Line)							
			- Embung Pertanian (Base Line)							
			- Irigasi Perpipaian							
			- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	12 Kabupaten dan Kota	1.958.020,000	1.955.735,700	99.88		100.00	
			- Layanan Dukungan Manajemen Satker							
			- Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian	12 Kabupaten dan Kota	25.000,000	25.000,000	100.00	- Meningkatnya akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	100.00	
			- Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat		4,419,856,000	4,327,068,550	97.90		100.00	
			- Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak - Hijauan Pakan Ternak	12 Kabupaten dan Kota	21,000,000	21,000,000	100.00	- Tersedianya pakan hewan untuk produksi dalam mendukung ekspor maupun substitusi impor produk pangan hewani asal ternak - Tersedianya pakan hewan untuk mendukung produksi pangan strategis nasional	100.00	
			- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan - Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	12 Kabupaten dan Kota	570,500,000	570,294,900	99.96	- Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional - Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional - Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	100.00	
			- Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak - Optimalisasi Reproduksi - Pengembangan unggas dan aneka ternak	12 Kabupaten dan Kota	3,141,100,000	3,050,974,350	97.13	- Meningkatnya Volume Ekspor untuk Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak - Menurunnya Volume Impor untuk Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak - Terpenuhinya Kebutuhan Daging Sapi dan Kerbau Nasional	100.00	
			- Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) - Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH - Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk - Pengendalian Pematangan Betina produktif	12 Kabupaten dan Kota	102,000,000	101,554,100	99.56	- Meningkatnya kualitas ekspor pangan dan non pangan asal ternak serta kesejahteraan ternak - Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional - Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan - Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia - Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional	100.00	
			- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan - Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Kabupaten dan Kota	462,900,000	461,464,900	99.69	- Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan - Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan - Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	100.00	
			- Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Kelembagaan dan Usaha Peternakan	12 Kabupaten dan Kota	122,356,000	121,780,300	99.53	- Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak Nasional - Meningkatnya Efektivitas Pengolahan Pangan dan Non Pangan Hewani Asal Ternak	100.00	
			JUMLAH TOTAL KEMENTERIAN PERTANIAN		95,259,135,000	94,828,058,842	99.55		99.99	

❖ **Kementerian Sosial**

Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Sosial dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat pada 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, dengan pagu sejumlah Rp. 960.664.000,- penyerapan anggaran sejumlah Rp. 958.014.000,- atau 99,72 persen, realisasi fisk mencapai 100 persen, sementara sisa anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp. 2.650.000,- atau 0,28 persen, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

- Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan.

Tabel III.
Matriks Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2020

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	OPD/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				KET	
						KEUANGAN		CAPAIAN KEGIATAN			
						(Rp.)	(%)	(NARASI)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-	KEMENTERIAN SOSIAL	Permen Sosial RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH - Program Pemberdayaan Sosial - Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat - Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Yang Memperoleh Pemberdayaan - Layanan Dukungan Manajemen Satker	<i>Kabupaten Sigi Desa Bangga Kec. Dolo Selatan dan Kabupaten Parigi Moutong Desa Patingke Kec. Tnombo</i>	960,664,000 960,664,000	958,014,000 958,014,000	99.72 99.72			100.00 100.00	
JUMLAH TOTAL KEMENTERIAN SOSIAL					960,664,000	958,014,000	99.72			100.00	

❖ **Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi**

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Alokasi Tugas Pembantuan dari Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terdapat pada 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan, dengan pagu sejumlah Rp. 6.410.284.000,- penyerapan anggaran sejumlah Rp. 6.408.318.290,- atau 99,97 persen, realisasi fisk mencapai 100 persen, sementara sisa anggaran yang tidak terserap sejumlah Rp. 1.965.710,- atau 0,03 persen, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Tingkat Layanan Dukungan Manajemen
 - Kegiatan Pengembangan Usaha Transmigrasi
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agrobisnis dan Agroindustri
 - Kegiatan Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah Jumlah Kawasan Transmigrasi / UPT yang Dikembangkan Layanan Sosial Budayanya
 - Kegiatan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
Capaian Sasaran atau target kegiatan adalah :
 - Jumlah Bidang Tanah yang difasilitasi Penerbitan Hak Milik atas Tanah Transmigran;
 - Jumlah Kasus Pertanahan Transmigrasi Yang Diselesaikan.

Tabel III.
Matriks Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2020

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	OPD/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				KET	
						KEUANGAN		CAPAIAN KEGIATAN			
						(Rp.)	(%)	(NARASI)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
-	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI		DINAS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. SULTENG								
			- Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		6,410,284,000	6,408,318,290	99.97		100.00		
			- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi		166,284,000	166,279,600	100.00	- Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	100.00		
			- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I								
			- Kegiatan Pengembangan Usaha Transmigrasi		1,834,620,000	1,833,885,000	99.96	- Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Ditingkatkan Produktivitas Lahannya dan Dikembangkan Agrobisnis dan Agroindustri	100.00		
			- Kawasan Transmigrasi Prioritas yang Dikembangkan Ekonomies								
			- Kegiatan Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi		3,898,730,000	3,898,503,690	99.99	- Jumlah Kawasan Transmigrasi / UPT yang Dikembangkan Layanan Sosial Budayanya	100.00		
			- Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya								
			- Kegiatan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi		510,650,000	509,650,000	99.80	- Jumlah Bidang Tanah yang difasilitasi Penerbitan Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	100.00		
			- Bidang Tanah yang Difasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi								
			- Kasus tanah transmigrasi yang diselesaikan					- Jumlah Kasus Pertanahan Transmigrasi Yang Diselesaikan			
JUMLAH TOTAL KEMENTERIAN PERTANIAN					6,410,284,000	6,408,318,290	99.97		100.00		

3.2 Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Tugas Pembantuan, secara umum terkait dengan mekanisme pelaporan sesuai peraturan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Laporan kegiatan yang disampaikan oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) belum sesuai dengan Format C (C1, C2, C3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, sehingga dapat menyulitkan melakukan analisis terhadap pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Masih lemahnya penegakan sanksi terhadap Perangkat Daerah (PD) pengelola Dana Tugas Pembantuan yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan berupa penundaan pencarian Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya atau penghentian Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bab XII Pasal 75.

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, perlu dilakukan berbagai upaya dan langkah-langkah antar lain:

1. Perlunya penguatan peran Provinsi dalam pembinaan, pengawasan, supervisi dan monitoring terhadap Perangkat Daerah (PD) yang mengelola Dana Tugas Pembantuan;
2. Perlunya konsistensi penegakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bab XII Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dapat dikenakan sanksi berupa :
 - Penundaan Pencairan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Triwulan berikutnya;
 - Penghentian Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Tahun Anggaran berikutnya.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- A. Pendidikan Menengah
- B. Pendidikan Khusus
- C. Pendidikan Anak Usia Dini
- D. Pendidikan Dasar
- E. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Indikator dan Nilai SPM serta batas waktu pencapaian SPM secara Nasional

No.	Indikator SPM	Target Capaian per tahun	Target Pencapaian
1.	Jumlah anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	100%	Setiap Tahun
2.	Jumlah anak usia 4-18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	100%	Setiap Tahun
3.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan anak usia dini (PAUD) / Pendidikan pra sekolah	100%	Setiap Tahun
4.	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, dan SMO/MTs, atau sederajat)	100%	Setiap Tahun
5.	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang menyelesaikan Pendidikan formalnya yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)	100%	Setiap Tahun

4.1.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

RINCIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
BELANJA LANGSUNG	394.915.148.959,98	348.925.017.468,00	(45.990.131.491,98)	88,35
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.173.689.075,50	4.071.628.390,00	(102.060.685,50)	97,55
<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah</i>	669.235.800,50	653.241.180,00	(15.994.620,50)	97,61
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran</i>	3.504.453.275,00	3.418.387.210,00	(86.066.065,00)	97,54
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.360.035.637,00	4.968.176.806,00	(391.858.831,00)	92,69
<i>Pengadaan Mebeleur</i>	784.923.000,00	722.318.000,00	(62.605.000,00)	92,02
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	956.581.488,00	940.081.660,00	(16.499.828,00)	98,28
<i>Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur</i>	3.618.531.149,00	3.305.777.146,00	(312.754.003,00)	91,36
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	442.315.000,00	435.757.500,00	(6.557.500,00)	98,52
<i>Peningkatan Kemampuan Teknis Kelembagaan</i>	85.820.000,00	80.787.500,00	(5.032.500,00)	94,14
<i>Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	356.495.000,00	354.970.000,00	(1.525.000,00)	99,57
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.920.048.540,00	1.879.407.243,00	(40.641.297,00)	97,88

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.920.048.540,00	1.879.407.243,00	(40.641.297,00)	97,88
	Program Fasilitas Tugas Pembantuan Kependidikan	4.166.145.633,00	3.786.606.439,00	(379.539.194,00)	90,89
	Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus	1.084.419.225,00	1.076.172.931,00	(8.246.294,00)	99,24
	Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pada Tugas Pembantuan	3.081.726.408,00	2.710.433.508,00	(371.292.900,00)	87,95
	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Atas	67.709.605.439,50	66.951.196.643,00	(758.408.796,50)	98,88
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA	3.263.800.310,70	3.195.694.750,00	(68.105.560,70)	97,91
	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA	5.275.939.454,00	5.215.279.051,00	(60.660.403,00)	98,85
	Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMA	3.716.630.790,00	3.683.073.000,00	(33.557.790,00)	99,10
	DAK SMA	53.454.233.000,00	52.907.016.842,00	(547.216.158,00)	98,98
	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Atas	1.678.181.658,85	1.668.937.050,00	(9.244.608,85)	99,45
	Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan SMA	320.820.225,95	281.195.950,00	(39.624.275,95)	87,65
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.740.596.166,00	5.688.338.561,00	(52.257.605,00)	99,09
	Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMA	763.213.590,00	746.538.000,00	(16.675.590,00)	97,82
	Peningkatan dan Pengembangan Mutu	2.813.758.845,00	2.813.052.216,00	(706.629,00)	99,97

	PTK DIKMEN SMK				
	Peningkatan Kualifikasi PTK DIKMEN Kejuruan	459.975.500,00	452.450.400,00	(7.525.100,00)	98,36
	Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	1.498.060.731,00	1.481.731.145,00	(16.329.586,00)	98,91
	Pengelolaan Manajemen Tunjangan Sertifikasi Guru	205.587.500,00	194.566.800,00	(11.020.700,00)	94,64
	Program Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan	97.787.214.793,00	89.715.558.494,00	(8.071.656.299,00)	91,75
	Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	542.526.646,00	488.744.552,00	(53.782.094,00)	90,09
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK	1.140.062.800,00	1.111.476.700,00	(28.586.100,00)	97,49
	Pelayanan administrasi dan pemeliharaan sekolah SMK	1.443.975.900,00	1.378.277.600,00	(65.698.300,00)	95,45
	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK	2.378.000.000,00	2.121.378.229,00	(256.621.771,00)	89,21
	Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMK	5.637.500.000,00	5.064.140.832,00	(573.359.168,00)	89,83
	Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan SMK	2.858.437.200,00	2.802.646.219,00	(55.790.981,00)	98,05
	DAK Reguler SMK	83.236.482.247,00	76.213.600.762,00	(7.022.881.485,00)	91,56
	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan	550.230.000,00	535.293.600,00	(14.936.400,00)	97,29
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.279.624.017,00	3.160.514.429,00	(119.109.588,00)	96,37
	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen	250.892.847,00	236.882.161,00	(14.010.686,00)	94,42

	Pendidikan				
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	635.671.168,00	588.152.300,00	(47.518.868,00)	92,52
	Rapat Koordinasi Pendidikan Se Sulawesi Tengah	305.523.752,00	298.001.000,00	(7.522.752,00)	97,54
	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Sehat	445.316.188,00	429.535.350,00	(15.780.838,00)	96,46
	Pengembangan Manajemen Pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah	136.767.741,00	136.758.688,00	(9.053,00)	99,99
	Pengembangan Perencanaan dan sosialisasi Program Pendidikan serta Kerjasama lintas sektor/lembaga	558.071.236,00	528.131.700,00	(29.939.536,00)	94,64
	Pengelolaan Manajemen BOS semua Jenjang Pendidikan	253.490.400,00	251.312.345,00	(2.178.055,00)	99,14
	Pengelolaan Manajemen UN	693.890.685,00	691.740.885,00	(2.149.800,00)	99,69
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	14.853.257.605,00	14.347.806.912,00	(505.450.693,00)	96,60
	Pembinaan Minat, bakat dan Kreativitas Siswa PLB	5.108.529.195,00	5.042.031.850,00	(66.497.345,00)	98,70
	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PK-PLK	1.281.002.100,00	1.238.980.851,00	(42.021.249,00)	96,72
	Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Khusus (PLB)	562.750.000,00	560.645.000,00	(2.105.000,00)	99,63
	Pengembangan dan Pembinaan Mutu PK-PLK	1.392.617.835,00	1.352.092.600,00	(40.525.235,00)	97,09
	Pengembangan dan Peningkatan Mutu Manajemen SKO	6.508.358.475,00	6.154.056.611,00	(354.301.864,00)	94,56
	Program Kebudayaan	4.361.903.190,00	4.313.306.051,00	(48.597.139,00)	98,89

	Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan Purbakala dan Permuseuman	666.852.050,00	651.702.050,00	(15.150.000,00)	97,73
	Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya	1.539.515.140,00	1.512.643.019,00	(26.872.121,00)	98,25
	Pembinaan Kepercayaan kepada TYME dan Tradisi	397.365.900,00	394.594.932,00	(2.770.968,00)	99,30
	Pembinaan Kesenian	402.190.850,00	401.579.050,00	(611.800,00)	99,85
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	1.355.979.250,00	1.352.787.000,00	(3.192.250,00)	99,76
	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	185.120.713.863,98	149.606.720.000,00	(35.513.993.863,98)	80,82
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	180.006.400.000,00	149.606.720.000,00	(30.399.680.000,00)	83,11
	Kegiatan Pelaksanaan Sisa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	5.114.313.863,98	0,00	(5.114.313.863,98)	0,00

4.1.4 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

KABU PATEN /KOTA	ST AT US SE KO LA H	JEN JAN G PEN DIDI KAN	JUMLAH																	
			GURU PNS			GURU TETAP YAYASAN (GTY)			GURU TIDAK TETAP (GTT)			GURU BANTU (GB)			GURU HONORER (GH)			TOTAL GURU		
			L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L
Kab. Banggai			287	308	595	20	36	56	31	39	70	0	0	0	191	286	477	529	669	1198
	Negeri		276	285	561	0	2	2	30	38	68	0	0	0	161	232	393	467	557	1024
		SLB	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	15	4	23	27
		SMA	172	187	359	0	0	0	26	29	55	0	0	0	107	153	260	305	369	674
		SMK	101	89	190	0	2	2	4	9	13	0	0	0	53	65	118	158	165	323
	Swasta		11	23	34	20	34	54	1	1	2	0	0	0	30	54	84	62	112	174
		SLB	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	1	8	9

KABU PATEN /KOTA	ST AT US SE KO LA H	JEN JAN G PEN DIDI KAN	JUMLAH																	
			GURU PNS			GURU TETAP YAYASAN (GTY)			GURU TIDAK TETAP (GTT)			GURU BANTU (GB)			GURU HONORER (GH)			TOTAL GURU		
			L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L
		SMA	6	8	14	4	7	11	0	0	0	0	0	0	8	5	13	18	20	38
		SMK	5	14	19	15	26	41	1	1	2	0	0	0	20	40	60	41	81	122
		SMP TK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	2	3
		SMT K	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Kab. Banggai Kepula uan			69	78	147	19	10	29	8	5	13	0	0	0	147	150	297	243	243	486
	Negeri		68	73	141	0	0	0	8	5	13	0	0	0	137	139	276	213	217	430
		SLB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	1	4
		SMA	50	55	105	0	0	0	8	5	13	0	0	0	78	86	164	136	146	282
		SMK	18	18	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	52	108	74	70	144
	Swasta		1	5	6	19	10	29	0	0	0	0	0	0	10	11	21	30	26	56
		SMK	1	4	5	19	10	29	0	0	0	0	0	0	6	9	15	26	23	49
		SMT K	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	4	3	7
Kab. Banggai Laut			52	47	99	2	3	5	9	9	18	0	0	0	45	62	107	108	121	229
	Negeri		47	44	91	0	0	0	9	9	18	0	0	0	44	57	101	100	110	210
		SDL B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	4	6
		SMA	36	36	72	0	0	0	9	8	17	0	0	0	20	23	43	65	67	132
		SMK	11	8	19	0	0	0	0	1	1	0	0	0	22	30	52	33	39	72
	Swasta		5	3	8	2	3	5	0	0	0	0	0	0	1	5	6	8	11	19
		SMK	5	3	8	2	3	5	0	0	0	0	0	0	1	5	6	8	11	19
Kab. Buol			137	145	282	8	5	13	13	21	34	0	0	0	57	83	140	215	254	469
	Negeri		133	144	277	0	1	1	12	21	33	0	0	0	51	77	128	196	243	439
		SDL B	2	4	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	6	8
		SLB	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
		SMA	61	70	131	0	0	0	8	16	24	0	0	0	39	49	88	108	135	243
		SMK	69	69	138	0	1	1	4	4	8	0	0	0	12	27	39	85	101	186
		SMP LB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Swasta		4	1	5	8	4	12	1	0	1	0	0	0	6	6	12	19	11	30
		SMA	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	4
		SMK	4	1	5	7	3	10	1	0	1	0	0	0	4	6	10	16	10	26

KABU PATEN /KOTA	ST AT US SE KO LA H	JEN JAN G PEN DIDI KAN	JUMLAH																	
			GURU PNS			GURU TETAP YAYASAN (GTY)			GURU TIDAK TETAP (GTT)			GURU BANTU (GB)			GURU HONORER (GH)			TOTAL GURU		
			L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L
Kab. Donggala			114	155	269	8	10	18	27	56	83	0	0	0	128	201	329	277	422	699
	Negeri		113	154	267	0	0	0	27	53	80	0	0	0	123	198	321	263	405	668
		SLB	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8	4	5	9
		SMA	64	99	163	0	0	0	13	19	32	0	0	0	83	141	224	160	259	419
		SMK	49	54	103	0	0	0	14	34	48	0	0	0	36	53	89	99	141	240
	Swasta		1	1	2	8	10	18	0	3	3	0	0	0	5	3	8	14	17	31
		SMA	0	0	0	4	6	10	0	0	0	0	0	0	2	2	4	6	8	14
		SMK	1	1	2	4	4	8	0	3	3	0	0	0	3	1	4	8	9	17
Kab. Morowali			63	90	153	4	16	20	29	43	72	0	0	0	53	82	135	149	231	380
	Negeri		63	83	146	1	1	2	27	42	69	0	0	0	47	76	123	138	202	340
		SLB	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	1	0	1	1	6	7
		SMA	39	50	89	0	0	0	19	18	37	0	0	0	21	46	67	79	114	193
		SMK	24	33	57	1	1	2	8	18	26	0	0	0	25	30	55	58	82	140
	Swasta		0	7	7	3	15	18	2	1	3	0	0	0	6	6	12	11	29	40
		SMA	0	6	6	1	11	12	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	17	19
		SMK	0	1	1	2	4	6	2	1	3	0	0	0	5	6	11	9	12	21
Kab. Morowali Utara			62	85	147	8	13	21	21	24	45	0	0	0	32	79	111	123	201	324
	Negeri		57	69	126	0	0	0	21	24	45	0	0	0	30	76	106	108	169	277
		SLB	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	7	7	2	7	9
		SMA	40	49	89	0	0	0	12	16	28	0	0	0	14	42	56	66	107	173
		SMK	16	20	36	0	0	0	8	8	16	0	0	0	16	27	43	40	55	95
	Swasta		5	16	21	8	13	21	0	0	0	0	0	0	2	3	5	15	32	47
		SMA	2	3	5	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	12
		SMK	3	13	16	6	9	15	0	0	0	0	0	0	2	2	4	11	24	35
Kab. Parigi Moutong			175	158	333	30	34	64	73	108	181	0	0	0	145	218	363	423	518	941
	Negeri		166	148	314	1	0	1	73	106	179	0	0	0	124	182	306	364	436	800
		SLB	2	4	6	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	6	8
		SMA	126	107	233	1	0	1	52	72	124	0	0	0	90	135	225	269	314	583

KABU PATEN /KOTA	ST AT US SE KO LA H	JEN JAN G PEN DIDI KAN	JUMLAH																		
			GURU PNS			GURU TETAP YAYASAN (GTY)			GURU TIDAK TETAP (GTT)			GURU BANTU (GB)			GURU HONORER (GH)			TOTAL GURU			
			L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	
		SMK	38	37	75	0	0	0	2	3	53	0	0	0	34	47	81	93	11	6	209
	Sw ast a		9	10	19	2	3	63	0	2	2	0	0	0	21	36	57	59	82	141	
		SMA	7	6	13	2	7	9	0	1	1	0	0	0	8	5	13	17	19	36	
		SMK	2	4	6	2	2	54	0	1	1	0	0	0	13	31	44	42	63	105	
Kab. Poso			19	28	483	1	3	52	1	1	34	0	0	0	89	17	265	31	51	834	
	Neg eri		17	24	419	0	0	0	1	1	32	0	0	0	55	12	184	24	39	635	
		SLB	5	9	14	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	10	15	
		SMA	97	14	244	0	0	0	8	6	14	0	0	0	29	73	102	13	22	360	
		SMK	69	92	161	0	0	0	7	1	17	0	0	0	26	56	82	10	15	260	
	Sw ast a		28	36	64	1	3	52	0	2	2	0	0	0	34	47	81	76	12	199	
		SLB	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	5	7	2	10	12	
		SMA	10	21	31	2	3	5	0	2	2	0	0	0	12	21	33	24	47	71	
		SMK	18	13	31	1	3	44	0	0	0	0	0	0	20	21	41	50	66	116	
Kab. Sigi			12	20	327	1	2	42	1	2	34	0	0	0	74	12	194	23	36	597	
	Neg eri		10	16	273	0	0	0	1	2	34	0	0	0	52	88	140	17	27	447	
		SLB	2	17	19	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	5	5	3	23	26	
		SMA	79	10	180	0	0	0	9	1	28	0	0	0	34	56	90	12	17	298	
		SMK	26	48	74	0	0	0	3	1	4	0	0	0	18	27	45	47	76	123	
	Sw ast a		19	35	54	1	2	42	0	0	0	0	0	0	22	32	54	58	92	150	
		SLB	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	3	3	6	
		SMA	13	19	32	8	1	24	0	0	0	0	0	0	8	19	27	29	54	83	
		SMK	6	15	21	9	9	18	0	0	0	0	0	0	11	11	22	26	35	61	
Kab. Tojo Una- Una			90	14	231	1	7	8	5	2	26	0	0	0	52	99	151	14	26	416	
	Neg eri		86	12	210	0	0	0	5	2	26	0	0	0	47	89	136	13	23	372	
		SLB	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	8	10	
		SMA	41	55	96	0	0	0	3	1	22	0	0	0	31	64	95	75	13	213	
		SMK	43	64	107	0	0	0	2	2	4	0	0	0	16	22	38	61	88	149	
	Sw ast a		4	17	21	1	7	8	0	0	0	0	0	0	5	10	15	10	34	44	
		SMA	1	3	4	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6	3	13	16	
		SMK	3	14	17	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	5	9	7	21	28	

KABU PATEN /KOTA	ST AT US SE KO LA H	JEN JAN G PEN DIDI KAN	JUMLAH																	
			GURU PNS			GURU TETAP YAYASAN (GTY)			GURU TIDAK TETAP (GTT)			GURU BANTU (GB)			GURU HONORER (GH)			TOTAL GURU		
			L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L	L	P	TO TA L
Kab. Tolitoli			110	160	270	24	31	55	20	20	40	0	0	0	82	123	205	236	334	570
	Negeri		102	148	250	0	0	0	20	17	37	0	0	0	71	103	174	193	268	461
		SLB	0	7	7	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	2	3	3	10	13
		SMA	57	71	128	0	0	0	11	8	19	0	0	0	38	50	88	106	129	235
		SMK	45	70	115	0	0	0	7	8	15	0	0	0	32	51	83	84	129	213
	Swasta		8	12	20	24	31	55	0	3	3	0	0	0	11	20	31	43	66	109
		SMA	4	4	8	8	12	20	0	0	0	0	0	0	5	13	18	17	29	46
		SMK	4	8	12	16	19	35	0	3	3	0	0	0	6	7	13	26	37	63
Kota Palu			380	652	1032	91	143	234	21	43	64	0	0	0	160	150	310	652	988	1640
	Negeri		333	528	861	0	1	1	20	42	62	0	0	0	92	86	178	445	657	1102
		SLB	3	14	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	9	6	20	26
		SMA	177	286	463	0	0	0	11	24	35	0	0	0	54	50	104	242	360	602
		SMK	153	228	381	0	1	1	9	18	27	0	0	0	35	30	65	197	277	474
	Swasta		47	124	171	91	42	233	1	1	2	0	0	0	68	64	132	207	331	538
		SLB	2	9	11	9	4	23	0	0	0	0	0	0	3	7	10	14	30	44
		SMA	28	52	80	41	48	89	0	0	0	0	0	0	26	31	57	95	131	226
		SMK	17	63	80	41	80	121	1	1	2	0	0	0	39	26	65	98	170	268
Grand Total			1864	2504	4368	246	371	617	285	49	714	0	0	0	1255	1829	3084	3650	5133	8783

4.1.5 Permasalahan dan solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

A. ASPEK REGULASI

Belum adanya Peraturan Khusus di daerah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan. Peraturan ini diharapkan merupakan :

1. Dasar pelaksanaan Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah,
2. Dasar bagi Kabupaten dan Kota dalam pelaksanaan Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan.
3. Dasar aturan dalam pengalokasian anggaran khususnya dalam pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan.

B. ASPEK ANGGARAN

Masih minimnya sekali pengalokasian anggaran untuk 2 tahapan dari 4 tahapan Penerapan SPM, dalam hal :

1. Pendataan dan verifikasi data anak putus sekolah (ATS) Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup 13 Kabupaten / Kota untuk Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Pendidikan Khusus.
2. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar :
 - a. Pemenuhan Perlengkapan Dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
 - b. Pemenuhan Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan

kinerja di masa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta anggaran dengan mengacu pada ketentuan.
2. Lebih meningkatkan koordinasi antara Bidang dan Bagian dalam pelaksanaan program-program pendidikan dan Kebudayaan
3. Lebih meningkatkan peran Kelompok Masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
4. Lebih meningkatkan koordinasi dan sinergitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

4.2 Urusan Kesehatan

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar;
- (iii) pen]rusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan
- (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi.

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten Kota jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut sebagai berikut :

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar daerah Provinsi

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- 2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Berdasarkan Permendagri no, 100 tahun 2018 Capaian kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Nilai (%)	Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pemb iaya an (Rp)
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	2020	
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi			

	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	2020	1.251.868.000
--	---	-----	------	----------------------

4.2.3 Realisasi

No	Indikator SPM	Sasaran Dalam Tahun	Capaian Dalam Tahun	%
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	17.484 penduduk	91.030 penduduk	56%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	20.720 Penduduk	20.720 Penduduk	100%

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2020 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%, dengan menghitung Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah penduduk

terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang samadikali 100%.

Pencapaian indikator Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan pada tahun 2020 belum mencapai target. dimana secara provinsi capaian Kab/Kota yang membentuk PSC 119 baru mencapai 30,77%, dan tenaga sumber daya kesehatan PSC yang terlatih kegawatdaruratan (BHD,GELS,ACLS,ATLS) masih sebatas PSC Dinas Kesehatan Provinsi. Namun sebagai awal dari penerapan SPM ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Pusat Pelayanan KeselamatanTerpadu (P2KT) telah membuat peta rawan bencana serta penentuan jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi bencana tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target antara lain :

- a. KIE bagi petugas kesehatan
 - 1) Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - 2) Percepatan pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota
 - 3) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
 - b. KIE bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana
 - 1) Pemantauan Potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
 - 2) Penyuluhan dan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di hunian sementara Petobo dan desa Bangga
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB , dengan menghitung Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB dikali 100%.

Untuk memenuhi target kinerja tersebut dilakukan melalui kegiatan antara lain

:

No	kegiatan
I	Program Surveilans APBD
a.	Pertemuan Reviu Surveilans
b.	Pengembangan Sumbermas di Kabupaten Banggai Laut dan Donggala
c.	Konsultasi Kegiatan Program ke Jakarta dan daerah Lainnya
d.	Pemantauan Surveilans Kesehatan Haji di Embarkasi Balikpapan
e.	Penyelidikan Epidemiologi/ Verifikasi Rumor KLB
f.	Pemantauan SKDR di Kab/Kota
i.	Rapat Tim Terpadu Surveilans Epidemiologi
j.	Dukungan Manajemen Surveilans
II	Program Surveilans APBN
a.	Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB di Kab/Kota Surveilans PD3I
b.	Layanan Respon KLB dan Wabah
c.	Layanan Kekarantinaan Kesehatan

4.2.4 Alokasi Anggaran

No	Indikator SPM	APBD	APBN
A	PROVINSI		
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	600.000.000	-
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	400.000.000	851.868.000

4.2.5 Dukungan Personil

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Pejabat structural sebanyak 4 orang
 - Dokter sebanyak 1 orang
 - Perawat sebanyak 9 orang

- Kesehatan masyarakat sebanyak 5 orang
 - Kesehatan lingkungan sebanyak 2 orang
 - Staf administrasi sebanyak 11 orang
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi terdiri dari :
- Personil Provinsi : 12 Orang
 - Personil Kabupaten/kota : 39 Orang

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Koordinasi tingkat cluster kesehatan masih belum berjalan dengan baik, terutama dalam mengedukasi pengurangan resiko krisis kesehatan terhadap penduduk yang terdampak ataupun penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana.
 - Pengetahuan petugas kesehatan di kabupaten/kota terutama puskesmas terkait krisis kesehatan akibat bencana masih kurang.
 - KIE pengurangan resiko krisis kesehatan akibat bencana masih merupakan tugas dan tanggungjawab pelaksana program penanggulangan krisis kesehatan dan masalah kesehatan.
 - Minimnya pembiayaan untuk penanganan krisis kesehatan.
 - Belum optimal kerjasama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Solusi

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Melakukan Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - Melakukan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
 - Melakukan Pertemuan Penguatan LP dan LS

- Melakukan penyusunan peta rawan bencana di setiap kabupaten/kota dan puskesmas untuk pengurangan resiko krisis kesehatan
 - Melakukan kegiatan pemantauan potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi
- Tidak tersedianya kendaraan Operasional khusus Penyelidikan Epidemiologi KLB dalam menunjang Indikator program yaitu Penanganan < 24 Jam dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan yang menjangkau tidak hanya sampai di Kabupaten/Kota tetapi arusnya sampai di Kecamatan bahkan Desa-desa.

4.3 Urusan Pekerjaan Umum/Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

4.3.1 Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota

4.3.2 TARGET DAN ALOKASI ANGGARAN PENCAPAIAN SPM OLEH DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	ANGARAN (RP)	KETERANGAN
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air	50%	1.775.288.230	(APBD)

		minum curah lintas kabupaten/kota			
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	0 Rumah Tangga	170.367.00 0	(APBD)

4.3.3 Realisasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	ANGARAN (RP)	KETERANGAN
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	50%	5 0 %	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan	0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	100 %

	regional lintas kabupaten/kota	pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota			
--	--------------------------------	---	--	--	--

4.3.4 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat proses penerapan dan pencapaian SPM :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH PERSONIL
1	2	3	4
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah	31 orang
2.	penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas	8 orang

4.3.5 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

a. **Air minum curah regional**

a.1. **SPAM Regional Terbangun**

Dalam upaya pemenuhan SPM air minum curah di kawasan regional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2013 – 2016 bekerja sama dengan Kementerian PUPR rencananya akan membangun SPAM Regional Pasigala dengan kapasitas produksi air minum curah 2 x 300 liter/detik yang akan melayani sebagian Kota Palu, sebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala.

Untuk tahap pertama telah dibangun Intake, Jaringan Pipa Transmisi, Instalasi Pengolah Air (IPA) kapasitas 300 liter/detik, Reservoir dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) serta Reservoir Offtake dan telah berfungsi untuk melayani Sambungan Rumah (SR) di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Namun akibat adanya bencana alam (gempa bumi, lukuifaksi dan tsunami) pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala menyebabkan rusaknya infrastruktur pada SPAM Regional Pasigala. Akibat kerusakan infrastruktur tersebut SPAM Regional Pasigala tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kerusakan infrastruktur SPAM Regional Pasigala meliputi kerusakan pada

- Intake

- Jaringan Pipa Transmisi AirBaku

- Instalasi Pengolahan Air(IPA)

- Jaringan Pipa Distrubusi Utama(JDU)

- Reservoir Offtake

- Jaringan Pipa Distribusi Pembagi(JDB)

Masalah Internal yang dihadapi :

- Kekurangan dana untuk pembiayaan operasional dan perbaikan infrastruktur

- Keterbatasan SDM dalam pengoperasionalan SPAM Pasigala baik dalam segi kualitas dankuantitas

- Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan perawatan dan pemeliharaan SPAMPasigala

Masalah eksternal yang dihadapi:

Perlunya regulasi yang secara hukum mengikat masing-masing pihak pemerintah kabupaten kota dalam hal ini pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala dalam hal penarikan retribusi yang menguntungkan masing- masing pihak sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang baik dalam pemanfaatan dan pemeliharaan SPAM Pasigala secararegional.

Belum rampungnya Desain New SPAM Pasigala yang dibuat oleh pihak Balai Wilayah Sungai III dalam rangka perbaikan Struktur dan Infrastruktur SPAMPasigala.

Potensi SPAMRegional

Selain SPAM Regional Pasigala, berdasarkan hasil identifikasi SPAM Regional terdapat beberapa kawasan regional (prioritas) yang berpotensi dibangun SPAM Regional lainnya, antara lain :

- Kawasan perbatasan antara Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli
- Kawasan perbatasan antara Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso

Dari kedua potensi SPAM Regional ini, untuk SPAM regional Kab. Donggala dan Kab. Tolitoli belum disusun Feasibility Study (Studi Kelayakan) dan Design Engineer Estimate (DED), sehingga sangat perlu dukungan dari semua pihak. Sedangkan potensi SPAM regional Kab. Parigi Moutong, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah menyusun Design Engineer Estimate (DED) untuk SPAM Regional. Namun demikian pemerintah provinsi Sulawesi Tengah tetap sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak terutama Kementerian PUPR baik pendampingan maupun dalam pelaksanaan konstruksi.

Air limbah domestic regional

Saat ini pemerintah provinsi Sulawesi tengah belum memiliki infrastruktur untuk pengolahan air limbah (SPAL) domestic regional. Namun demikian terdapat kawasan regional yang berpotensi dibangun SPAL Regional yaitu antara Kab. Sigi dan KotaPalu. Masalah Internal yang dihadapi :

- ▢ Belum ada regulasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota tentang SPAL Regional
- ▢ Belum dilakukan identifikasi dan studi kelayakan pembangunan SPAL regional walaupun SPAL Regional masuk dalam RTRW Prov.Sulteng
- ▢ Minimnya alokasi anggaran untuk SPAL Regional Kurangnya sosialisasi dan kampanye public tentang sanitasilayak

Masalah Eksternal yang dihadapi :

- ▢ Secara geografis jarak antara daerah Kab/Kota di Sulawesi Tengah berjauhan sehingga sangat sedikit potensi pembangunan SPALRegional
- ▢ Perlunya penajakan dan kemauan kuat antara Pemda Kab/Kota untuk bekerja sama secara regional
- ▢ Perlunya pendanaan dari Pemerintah Pusat

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

No	SPM	Target	Capaian	Alokasi anggaran	Dukungan Personil	Maslah dan solusi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana	92,4%	65,74%	Rp. 2.292.603.762.453	194 orang	Permasalahn : Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target SPM bidang perumahan belum mencakupi untuk penanganan 3 tahun Solusi : 1.Pemerintah daerah perlu penambahan anggaran untuk pencapaian target SPM untuk bias memenuhi penanganan dalam 3 tahun 2. penambahan anggaran APBN CSR
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	0	100%	-		Belum dilaksanakan karena belum ada penyediaan rumah relokasi akibat program pemerintah provinsi.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.I Pelayanan Dasar

	Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi
	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Koordinasi dan Sinergitas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibumtranmas)		
		Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		
	Pembinaan dan Penegakkan Peraturan Daerah	Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah		

		Kerjasama antar lembaga dalam Penegakan Perda/Perkada		
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat		
		Tersedianya Data Anggota Satlinmas		
	Pembinaan Masyarakat	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat		
		Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat		
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sehingga dapat memenuhi tingkat waktu tanggap		
		Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		

Tabel SPM Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah	Jenis SPM
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	Bidang Penegakkan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2. Pembinaan dan Penegakkan Peraturan Daerah 3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 4. Pembinaan Masyarakat 5. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Sasaran/Lokasi Kegiatan/Sebutan Lain	Unit/Bidang Pengelola Kegiatan
1	<p>➤ Program : Pemeliharaan Kam-trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>❖ Kegiatan :</p> <p>✓ <i>Monitoring dan Evaluasi penyelesaian pelaksanaan Tibumtranmas</i></p> <p>✓ <i>Pembinaan Kam-trantibmas</i></p>	<p><i>Monev data Tibumtranmas lintas kab/ kota</i></p> <p><i>Patroli Pencegahan Covid-19</i></p> <p><i>Pengamanan tempat-tempat penting</i></p> <p><i>Pengawasan pejabat VIP/VVIP (Gubernur/ Sekretaris Daerah/lainnya) kegiatan pencegahan covid-19 di daerah perbatasan</i></p>	<p>2 x (2 daerah kabupaten)</p> <p>48 x (Efektif penerapan SPM 3 X patroli dalam se hari)</p> <p>12 Bulan</p> <p>12 Bulan</p>	<p>- Kab. Parigi - Kab. Donggala</p> <p>Wilayah Kota Palu</p> <p>Berdasarkan tempat dan bentuk kegiatan</p> <p>Berdasarkan kegiatan pejabat daerah/VIP/VVIP/ lainnya</p>	<p>Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman</p>

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Sasaran/Lokasi Kegiatan/ Sebutan Lain	Unit/Bidang Pengelola Kegiatan
	<p>➤ Program : Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah</p> <p>❖ Kegiatan :</p> <p>✓ <i>Penegakan Peraturan Daerah</i></p>	<p><i>Penegakan perda nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu lintas kab/kota</i></p> <p><i>Tim Satgas Penanganan Covid-19 Prv.Sulteng Penegakan Pergub Nomor 32 Tahun 2020</i></p> <p><i>Tim Penyusunan Rancangan Perda</i></p>	<p>5 x (5 daerah kabupaten/kota)</p> <p>3 Bulan</p> <p>-</p>	<p>- Kab. Banggai Laut - Kab. Tolitoli - Kab. Donggala - Kab. Morowali - Kota Palu</p> <p>Wilayah Kota Palu</p> <p>-</p>	<p>Bidang Penegakan Perda</p>
	<p>➤ Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>❖ Kegiatan :</p> <p>✓ <i>Kesiapsiagaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat dam meningkatkan</i></p>	<p><i>Pemantauan penerapan disiplin protokol kesehatan covid-19 anggota satlinmas pada pelaksanaan</i></p>	<p>Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah</p>	<p>Seluruh Daerah Kab/Kota se-Sulawesi Tengah</p>	<p>Bidang perlindungan Masyarakat</p>

	<p><i>keamanan dan kenyamanan lingkungan</i></p> <p>✓ <i>Monitoring dan Evaluasi Potensi Masyarakat</i></p>	<p><i>Pilkada tahun 2020 se Sulawesi Tengah</i></p> <p><i>Monitoring dan identifikasi kesiapan satlinmas dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan pencegahan covid-19 pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020</i></p>	<p>4 x (4 daerah kabupaten/kota)</p>	<p>- Kab. Poso - Kab. Morowali - Kab. Banggai - Kab. Banggai Kepulauan</p>	
	<p>➤ Program : Pembinaan Masyarakat</p> <p>❖ Kegiatan : ✓ <i>Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat</i></p> <p>✓ <i>Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat</i></p>	<p><i>Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan deteksi dini</i></p> <p><i>Bimbingan dan penyuluhan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</i></p>	<p>6 x (6 daerah kabupaten/kota)</p> <p>1 x</p>	<p>-</p> <p>- Kota Palu</p>	<p>Bidang Pembinaan Masyarakat</p>

	<p>➤ Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>❖ Kegiatan : ✓ Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran</p> <p>✓ Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</p>	<p><i>Diklat Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</i></p> <p><i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</i></p>	<p>42 Orang Anggota / Personil Damkar</p> <p>Masyarakat, Anggota / Personil Damkar</p>	<p>Anggota/Personil Damkar Satpol PP Prov Sulteng</p> <p>Masyarakat, Anggota / Personil Damkar</p>	<p>Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p>
--	--	--	--	--	--

4.5.3 Realisasi

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Sasaran/Lokasi Kegiatan/Sebutan Lain	Realisasi
1.	<p>➤ Program : Pemeliharaan Kam-trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>❖ Kegiatan : ✓ <i>Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Tibumtranmas</i></p>	<p><i>Monev data Tibumtranmas lintas kab/ kota</i></p>	<p>2 x (2 daerah kabupaten)</p>	<p>- Kab. Parigi - Kab. Donggala</p>	<p>95 %</p>
	<p>✓ <i>Pembinaan Kam-trantibmas</i></p>	<p><i>Patroli Pencegahan Covid-19</i></p>	<p>48 x (Efektif penerapan SPM 3 X patroli dalam se hari)</p>	<p>Wilayah Kota Palu</p>	<p>48 kali 95 %</p>

		✓				
		✓				
			<i>Pengamanan tempat-tempat penting</i>	12 Bulan	Berdasarkan tempat dan bentuk kegiatan	
			<i>Pengawalan pejabat VIP/VVIP (Gubernur/ Sekretaris Daerah/lainnya) kegiatan pencegahan covid-19 di daerah perbatasan</i>	12 Bulan	Berdasarkan kegiatan pejabat daerah/VIP/VVIP/ lainnya	

No	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Sasaran/Lokasi Kegiatan/Sebutan Lain	Realisasi
	<p>➤ Program : Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah</p> <p>❖ Kegiatan : ✓ <i>Penegakan Peraturan Daerah</i></p>	<p><i>Penegakan perda nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha</i> <i>Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu lintas kab/kota</i></p> <p><i>Tim Satgas Penanganan Covid-19 Prv.Sulteng</i> <i>Penegakan Pergub Nomor 32 Tahun 2020</i></p>	<p>5 x <i>(5 daerah kabupaten/kota)</i></p> <p>3 Bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kab. Banggai Laut - Kab. Tolitoli - Kab. Donggala - Kab. Morowali - Kota Palu 	Perda/Perk ada 95%

<p>✓ <i>Peningkatan Hubungan Kerjasama</i></p>	<p><i>Tim Penyusunan Rancangan Perda</i></p>	<p>-</p>	<p>Wilayah Kota Palu</p> <p>-</p>	<p>Alokasi keuangan anggaran belum dapat mengako modir</p>
<p>➤ Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>❖ Kegiatan : ✓ <i>Kesiapsiagaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan</i></p> <p>✓ <i>Monitoring dan Evaluasi Potensi Masyarakat</i></p>	<p><i>Pemantauan penerapan disiplin ptotokol kesehatan covid-19 anggota satlinmas pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 se Sulawesi Tengah</i></p> <p><i>Monitoring dan identifikasi kesiapan satlinmas dalam rangka penerapan disiplin protokol kesehatan pencegahan covid-19 pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020</i></p>	<p>Kabupaten/ Kota se Sulawesi Tengah</p> <p>4 x (4 daerah kabupaten/kota)</p>	<p>Seluruh Daerah Kab/Kota se-Sulawesi Tengah</p> <p>- Kab. Poso - Kab. Morowali - Kab. Banggai - Kab. Banggai Kepulauan</p>	<p>95 %</p> <p>95 %</p>

<p>➤ Program : Pembinaan Masyarakat</p> <p>❖ Kegiatan : ✓ <i>Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat</i></p> <p>✓ <i>Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat</i></p>	<p><i>Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan deteksi dini</i></p> <p><i>Bimbingan dan penyuluhan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</i></p>	<p>6 x <i>(6 daerah kabupaten/kota</i></p> <p>1 x</p>	<p>-</p> <p>- Kota Palu</p>	<p>Alokasi keuangan anggaran belum dapat mengakomodir</p> <p>60 orang 95%</p>
<p>➤ Program : Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>❖ Kegiatan : ✓ <i>Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran</i></p> <p>✓ <i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</i></p>	<p><i>Diklat Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran</i></p> <p><i>Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran</i></p>	<p>42 Orang Anggota / Personil Damkar</p> <p>Masyarakat, Anggota / Personil Damkar</p>	<p>Anggota/Personil Damkar Satpol PP Prov Sulteng</p> <p>Masyarakat, Anggota / Personil Damkar</p>	<p>97 %</p> <p>95%</p>

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Satuan Polisi pamong Praja Provinsin Sulawesi Tengah Tahun 2020 berasal dari APBD sebesar
Rp.3.788.360.381,50

4.5.5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 193 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil = 104 orang
 - Tenaga Kontrak = 89 orang
- Jumlah = 193 orang

4.5.5 Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelaksanaan standar minimal ini adalah :

- a. Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tidak sebanding dengan permasalahan di lapangan dengan luas jangkauan wilayah kerja
- b. Tidak sebanding antara sarana dan prasarana yang tersedia dengan beban kerja
- c. Kegiatan hanya berfokus pada pada beberapa jumlah Perda yang ditegakan dan berapa kali patrol dalam sehari
- d. Ketersediaan anggaran yang masih terbatas

2) Solusi

- a. Perlu dilaksanakan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, selain pembinaan rutin yang dikemas dengan pembekalan pengetahuan dengan peningkatan keterampilan sehingga kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dapat diandalkan

- b. Peningkatan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana dengan optimalisasi fungsi sarana yang ada
- c. Masyarakat penerima pelanggaran dasar adalah pihak yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagai akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran perda harus lebih diperhatikan.
- d. Perlu adanya dukungan anggaran dari Pemerintah

4.6. Urusan Sosial

4.6.1 Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yakni pada pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial yaitu program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kelima pelayanan dasar dimaksud meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti.
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

2. Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	-	-	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	69.154.000,-	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	50 Orang	895.600.000,-	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti	Jumlah warga Negara / gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-	-	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1500 Orang	222.492.500,-	

3. Realisasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	-	-	-
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	-
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	50 Orang	50 Orang	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	Jumlah warga Negara / gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	-
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	1500 Orang	1500 Orang	100 %

Atas dasar pemahaman bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan Rencana Aksi yang tepat bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah yakni terintegrasinya pencapaian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan serta tersinerginya rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mencermati capaian penerapan SPM Bidang Sosial pada tahun 2020 ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa hal yang dapat disimpulkan yakni:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti tidak memiliki target dan capaian. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki panti rehabilitasi penyandang disabilitas.
2. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti sosial skala provinsi tidak terdapat capaian. Hal ini disebabkan karena pada triwulan II, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah terjadi refocussing / realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanggulangan Covid - 19 yang mempengaruhi target program / kegiatan.

3. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai 100% . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT PSTW Madago telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi.
4. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial terlantar di dalam panti tidak memiliki target dan capaian. Hal ini disebabkan karena UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Sulawesi Tengah belum mengalokasikan untuk pelayanan dan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis.
5. Pemberian bantuan dan perlindungan bagi korban bencana skala provinsi mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Provinsi telah melaksanakan penanganan bagi korban bencana.

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial tersebut di atas, tentunya target SPM Bidang Sosial yang sudah dicapai akan dipertahankan sedangkan yang belum tercapai dibutuhkan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait khususnya mengenai keterbatasan alokasi anggaran pada urusan sosial sehingga pada tahun depan dapat terjadi peningkatan dan dapat memperkecil deviasi capaian dari target yang sudah ditetapkan.

Tabel Realisasi Program / Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Sumber Dana APBD dan APBN

No	Program/Kegiatan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
A.	APBD				
1	Meningkatnya harmonisasi pelaksanaan program bidang	OutPut :Terlaksanayt Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah Outcome: Meningkatnya harmonisasi pelaksanaan program bidang	90.630.000	90.274.947	99.61
2	Terlaksananya administrasi perkantoran yang prima	Out Put : Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Outcome: Terlaksananya administrasi perkantoran yang prima	831.320.000	776.456.910	93.40
3	Meningkatnya kinerja aparatur, terwujudnya suasana kerja yang nyaman	Out Put : Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur Out Come : meningkatnya kinerja aparatur, terwujudnya suasana kerja yang nyaman	399.550.100	389.492.000	97.48
4	Terpeliharanya dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Out Put :Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Out Come : terpelihara dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur	230.490.000	208.621.217	90.51
5	Meningkatnya kinerja PNS	Out Put : Jumlah Pegawai Dinas Sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sosialisasi dan supervise di kab/kota Out Come : meningkatnya kapasitas aparatur yang mendukung penyelenggaraan kesos	25.095.000	24.480.000	97.55
6	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset secara baik, efisien dan efektif	Out Put : Tersusunnya laporan keuangan dan asset serta capaian kinerja SKPD. Outcome: meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset secara baik, efisien dan efektif	75.227.500	74.757.500	99.38
7	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan Kesos antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat	Out Put :Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan kesos, rakor resos, rakor dayasos, rakor linjamsos Outcome: meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan kesos di sulteng serta antara provinsi dan pemerintah pusat	155.095.000	154.736.198	99.77

8	Meningkatnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan program kesos dan tercapainya kinerja SKPD	Out Put : Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja program/kegiatan SKPD dan pemetaan PMKS/PSKS Outcome: Meningkatnya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan program kesos di sulteng	50.000.000	49.352.400	98.70
9	Meningkatnya taraf hidup masyarakat perdesaan	Out Put :Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perdesaan Out Come :Meningkatnya tarif hidup masyarakat miskin perdesaan	662.258.000	594.330.763	89.74
10	Meningkatnya taraf hidup masyarakat perkotaan	Out Put :Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin perkotaan Out Come :Meningkatnya tarif hidup masyarakat miskin perdesaan	363.609.000	357.459.000	98.31
11	Meningkatnya taraf hidup masyarakat pesisir dan pulau – pulau	Out Put :Terlaksananya pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin pesisir dan pulau - pulau Out Come :Meningkatnya tarif hidup masyarakat miskin pesisir dan pulau – pulau	57.003.000	56.903.000	99.82
12	Meningkatnya pelayanan social dan pemberian bantuan	Out Put : Terlaksananya pelayanan social dan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas Out Come : meningkatnya pelayanan social dan pemberian bantuan	105.781.000	104.408.900	98.70
13	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza dan meningkatnya	Out Put : Terlaksananya penyuluhan bagi Eks. Napza, ODHA serta tersalurinya bantuan bagi sosial , WTS dan Eks Napi Out Come : Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan Napza dan meningkatnya keterampilan waria, WTS dan Eks Napi	43.744.000	37.760.000	86.32
14	Meningkatnya jumlah badan usaha/dunia usaha yang melaksanakan CSR Kesos	Output : jumlah kegiatan seminar edukasi dan dunia usaha yang diselenggarakan Outcome : Meningkatnya jumlah badan usaha/dunia usaha yang melaksanakan CSR Kesos	0	0	0
15	Meningkatnya kinerja PSM	Out Put :terlaksananya bimbingan PSM . Out Come : Meningkatnya kinerja SPM	42.135.000	42.035.000	99.76

16	Meningkatnya kapasitas SDM Orsos dalam penyelenggaraan kesos	Out Put : Terlaksananya bimbingan manajemen orsos dan dan pemberian bantuan UEP Orsos Out Come : Meningkatnya kapasitas SDM Orsos dalam penyelenggaraan kesos	4.690.000	4.190.000	89.34
17	Meningkatnya kapasitas SDM Karang Taruna	Out Put : Terlaksananya pembinaan KT dan pemberian bantuan karang taruna Out Come : Meningkatnya kapasitas SDM Karang Taruna	232.250.000	229.062.900	98.63
18	Meningkatnya kapasitas TKSK	Out Put : Terlaksananya pertemuan jaringan kerja dan bhakti sosial TKSK Out Come : Meningkatnya kapasitas TKSK	19.790.000	19.200.000	97.02
19	Meningkatnya pengawasan terhadap sumbangan sosial dan undian	Out Put : Terselenggarana tolksow untuk UGB dan PUB di Sulteng Out Come : Meningkatnya pengawasan terhadap sumbangan sosial dan undian	10.235.000	9.900.000	96.73
20	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kejuangan dan kepahlawan	Out Put : Terlaksananya kegiatan peringatan hari besar nasional dan kepahlawanan Out Come : Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kejuangan dan kepahlawan	134.775.000	133.563.000	99.10
21	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial peran keluarga	Out Put : Terbentuknya satu family care unit Out Come : Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial peran keluarga .	0	0	0
22	Meningkatnya pemberdayaan KAT	Output : Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan KAT Outcome : Meningkatnya pemberdayaan KAT	25.623.000	24.951.000	97.38
23	Meningkatnya derajat kesos lanjut usia luar panti	Out Put : Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar Out Come : Meningkatnya derajat kesos lanjut usia luar panti	767.590.000	767.311.450	99.96

24	Meningkatnya derajat kesos anak terlantar	Out Put : Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar dalam panti dan seragam sekolah anak terlantar Out Come : Meningkatnya derajat kesos anak terlantar	29.135.000	28.845.000	99.00
25	Menurunnya jumlah korban tindak kekerasan dan perdagangan orang bermasalah sosial	Out Put : Terlaksananya sosialisasi dan pelayanan sosial bagi KTK dan perdagangan orang Out Come : Menurunnya jumlah korban tindak kekerasan dan perdagangan orang bermasalah sosial	53.342.000	53.162.000	99.66
26	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan sosial	Out Put : Terlaksananya sosialisasi PMKS serta penyuluhan sosial masal Out Come : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan sosial	32.025.000	32.025.000	100
27	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Peksos	Out Put : Tersedianya calon pekerja sosial Out Come : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Peksos	0	0	0
28	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Out Put : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Out Come : Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi	188.197.400	183.682.400	97.60
29	Meningkatnya validasi data PBI dan PMKS/PSKS	Out Put : Tersedianya data peserta PBI dan PMKS/PSKS Out Come : Meningkatnya validasi data PBI dan PMKS/PSKS	73.360.000	71.910.000	98.02
30	Meningkatnya penanganan korban bencana	Out Put : Tersedianya bantuan bencana Out Come : Meningkatnya penanganan korban bencana	222.492.500	221.601.500	99.60
31	Meningkatnya jaringan kerja antar instansi terkait dalam penanganan korban bencana sosial	Out Put : Tersusunnya rencana aksi daerah pencegahan konflik sosial di satu kabupaten dan pemulangan orang terlantar Outcome: Meningkatnya jaringan kerja antar instansi terkait dalam penanganan korban bencana sosial	100.000.000	99.983.000	99.98
32	Meningkatnya pelayanan dan koordinasi dengan instansi terkait	Out Put : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan PKH dan tersusunnya study assesment resertifikasi peserta PKH Out Come : Meningkatnya pelayanan dan	50.912.300	49.743.000	97.70

		koordinasi dengan instans terkait			
33	Meningkatnya pelayanan dan koordinasi dengan instansi terkait	Out Put : Terlaksananya jasa pelayanan (UPT PSA) Outcome: meningkatnya tertib administrasi perkantoran	200.000.000	177.992.255	89.00
34	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	Out Put : Jumlah anak terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial (UPT PSA) Out Come : Meningkatnya keterampilan anak terlantar	69.154.000	69.154.000	100
35	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	Out Put : Terlatih dan tersedianya anak terlantar dalam panti yang terampil (UPT PSRTS) Out Come : Berdayanya anak terlantar	99.842.500	76.127.134	76.25
36	Pengembangan bakat dan keterampilan Tuna Sosial	Out Put : Jumlah tuna sosial dalam panti yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial (UPT PSRTS) Out Come : Meningkatnya keterampilan Tuna Sosial	83.399.875	82.605.375	99.05
37	Meningkatnya pelayanan dan koordinasi dengan instansi terkait	Out Put : Terlaksananya jasa pelayanan (UPT PSTW Tentena) Outcome: meningkatnya tertib administrasi perkantoran	129.586.000	127.167.644	98.13
38	Pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar dalam panti	Out Put : Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial (UPT PSTW Tentena) Out Come : Meningkatnya derajat pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar dalam panti	895.600.000	894.172.100	99.84

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
B	APBN				
1.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		210.504.000	210.504.000	100
-	Dokumen Perencanaan Anggaran Kementerian Sosial yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran Kementerian Sosial yang ditindaklanjuti			
-	Masyarakat yang mendapatkan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial khususnya di daerah daerah rawan sosial perkotaan dan perdesaan			
2.	REHABILITASI SOSIALKORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA		255.549.000	247.907.700	97.01
-	SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang rehabilitasi dan perlindungan social korban penyalahgunaan NAPza	Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang rehabilitasi dan perlindungan social korban penyalahgunaan NAPza			
-	Lembaga rehabilitasi dan perlindungan korban penyalagunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	Jumlah Lembaga rehabilitasi dan perlindungan korban penyalahgunaan napza yang telah dikembangkan/ dibantu			
-	Rehabilitasi dan Perlindungan social korban penyalahgunaan NAPza di dalam dan luar panti	Jumlah rehabilitasi dan Perlindungan social korban penyalahgunaan NAPza di dalam dan luar panti			
-	Laporan keuangan/kinerja/monitoring /evaluasi /publikasi serta pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan sosial korban peyalahgunaan NAPZA	Laporan keuangan/kinerja/monitoring/ evaluasi /publikasi serta pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan sosial korban peyalahgunaan NAPZA			
-	Dokumen perencanaan/program/anggaran /data dan informasi/kebijakan bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah Dokumen perencanaan/program/ anggaran/data dan informasi/kebijakan bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA			

3.	REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS		-	-	-
-	Rehabilitasi dan perlindungan social orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat mental, cacat fisik dan mental	Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi, dan direhabilitasi baik didalam maupun diluar panti			
-	Laporan keuangan/kinerja/monitoring/ evaluasi /publikasi serta pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan sosial orang dengan kecacatan	Jumlah Laporan keuangan/kinerja/ monitoring/evaluasi/publikasi serta pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan sosial orang dengan kecacatan			
4.	REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG		-	-	-
-	Gelandangan, pengemis & pemulung, tuna susila, korban trafficking perempuan, bekas warga binaan LP, orang dengan HIV/AIDS & kelompok minoritas yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan social	Jumlah tuna sosial yang berhasil dilayani, diberi bantuan, dan direhabilitasi baik didalam maupun diluar panti			
-	Laporan keuangan/kinerja/monitoring /evaluasi/publikasi serta pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna social dan korban perdagangan orang	Jumlah Laporan keuangan/kinerja/ monitoring/evaluasi/publikasi serta pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna social dan korban perdagangan orang			
-	Dokumen perencanaan/program/anggaran /data dan informasi/kebijakan bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna social dan korban perdagangan orang	Jumlah Dokumen perencanaan/program/ anggaran/data dan informasi/kebijakan bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial tuna social dan korban perdagangan orang			
5.	REHABILITASI SOSIAL ANAK		-	-	-
-	Anak balita, anak terlantar & anak jalan, anak berhadapan dengan hokum anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan program kesejahteraan sosial anak (PKSA)	Jumlah Anak balita, anak terlantar & anak jalan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun luar panti.			
-	Laporan keuangan/kinerja/monitoring/	Jumlah Laporan keuangan/kinerja/ monitoring/evaluasi/publikasi serta kegiatan			

	evaluasi /publikasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak	pendukung pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak			
6.	REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA		-	-	-
-	Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan social	Jumlah lanjut usia terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik didalam maupun diluar panti			
-	SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang pelayanan social lanjut usia	Jumlah SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang pelayanan social lanjut usia			
-	Lembaga pelayanan sosial lanjut usia yang telah dikembangkan / dibantu	Jumlah Lembaga pelayanan sosial lanjut usia yang telah dikembangkan / dibantu			
-	Laporan keuangan/kinerja/monitoring/ evaluasi /publikasi serta pelaksanaan pelayanan sosial lanjut usia	Jumlah Laporan keuangan/kinerja/ monitoring/evaluasi /publikasi serta pelaksanaan pelayanan sosial lanjut usia			
7.	PENANGANAN FAKIR MISKIN		2.213.350.000	1.975.038.400	89.23
-	Pendampingan social yang mendapat bimbingan teknis	Jumlah Pendampingan social yang mendapat bimbingan teknis			
-	Laporan keuangan/kinerja/monitoring/ evaluasi/koordinasi/pembinaan/ pendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Laporan keuangan/kinerja/ monitoring/evaluasi /koordinasi/ pembinaan/ pendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan			
-	Dokumen Perencanaan /Program/Anggaran/ Data/Informasi/ Kebijakan Bidang Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen Perencanaan /Program /Anggaran/Data/ Informasi/ Kebijakan Bidang Penanggulangan Kemiskinan			
-	Terlaksananya asistensi social dan simulan usaha eonomi produktif bagi keluarga miskin dan rentan	Jumlah asistensi social dan simulan usaha eonomi produktif bagi keluarga miskin dan rentan			
8.	KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL		80.490.000	80.390.000	99.88
-	TMPN/TMP/MPN yang rehab dan dipelihara	Jumlah taman makam pahlawan nasional (TMPN) utama, TMPN, dan makam pahlawan nasional (MPN) yang terpelihara.			

-	Laporan Keuangan /kinerja/Monitoring / Evaluasi / Pembinaan /Publikasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah Laporan Keuangan /kinerja/ Monitoring/Evaluasi/Pembinaan/Publikasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan social			
-	Generasi Muda yang mengikuti kegiatan Pra-Manggala dan Manggala Indonesia, Intenalisasi dan keterampilan transformasi nilai K2KS	Jumlah Generasi Muda yang mengikuti kegiatan Pra-Manggala dan Manggala Indonesia, Intenalisasi dan keterampilan transformasi nilai K2KS			
9.	PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT		1.172.900.000	1.172.900.000	100
-	LK3 yang melakukan pelayanan social	Tersedianya akses lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) di Kab/Kota			
-	Laporan keuangan/kinerja/monitoring/ evaluasi/koordinasi/pembinaan/ asistensi/ publikasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial.	Jumlah Laporan keuangan/kinerja/ monitoring/evaluasi/ koordinasi/ pembinaan/asistensi/ publikasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial.			
-	TKSK yang mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan	Jumlah TKSK yang diberdayakan			
-	Organisasi Sosial yang mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan	Jumlah Organisasi Sosial yang diberdayakan			
-	PSM yang mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan	Jumlah PSM yang diberdayakan			
-	Karang Taruna yg mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan			
-	WKSBM yang mendapat peningkatan Kapasitas	Jumlah WKSBM yang berkembang			
-	CSR Kesos yang telah di bentuk	Jumlah DU yang melaksanakan CSR Kesos			

-	Family Care Unit yang melakukan Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Family Care Unit yang melakukan Pemberdayaan Keluarga			
10.	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)		59.278.000	52.800.000	89.07
-	Laporan keuangan/kinerja/monitoring/ evaluasi/publikasi/Sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah laporan keuangan/ kinerja/ monitoring/ evaluasi/ publikasi/ sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT			
-	Dokumen Perencanaan /Program/Anggaran/Data/ Informasi/ Kebijakan Bidang pemberdayaan KAT	Jumlah dokumen perencanaan/ program/ anggaran/ data/ informasi/ kebijakan bidang pemberdayaan KAT			
11.	PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL		116.989.000	116.148.750	99.72
-	Laporan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Atas Penyelenggara UGB dan PUB	Laporan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Atas Penyelenggara UGB dan PUB			
-	Laporan Keuangan /kinerja/Pembinaan Pegawai/Kekayaan Milik Negara/ Evaluasi/Monitoring/ Publikasi dan Pengembangan Organisasi Bidang Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana social	Laporan Keuangan /kinerja/Pembinaan Pegawai/Kekayaan Milik Negara/ Evaluasi/Monitoring/ Publikasi dan Pengembangan Organisasi Bidang Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana social			
12.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM		1.409.675.000	1.400.448.300	99.35
-	Lokasi Kampung Siaga Bencana	Jumlah lokasi kampung siaga bencana (KSB)			
-	Petugas Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam yang telah mendapatkan Bimbingan Teknis	Jumlah SDM yang mendapat bimbingan dan melakukan pendampingan social			
-	Laporan Keuangan /kinerja/Pembinaan Pegawai/Kekayaan Milik Negara/Evaluasi/Monitoring/ Publikasi dan Pengembangan Organisasi Bidang Korban Bencana Alam	Jumlah Laporan Keuangan /kinerja/Pembinaan Pegawai/Kekayaan Milik Negara/ Evaluasi/Monitoring/ Publikasi dan Pengembangan Organisasi Bidang Korban Bencana Alam			
-	Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan/program/			

	perencanaan/program/anggaran /bidang korban Bencana Alam	anggaran/bidang korban Bencana Alam			
13.	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL		227.009.000	224.730.000	99
-	Rekomendasi kajian pemetaan desa rawan bencana sosial	Jumlah rekomendasi hasil kajian pemetaan, riflok dan peninjakan keserasian social			
-	Petugas perlindungan sosial korban bencana sosial yang telah mendapatkan bimbingan teknis	Jumlah petugas yan mendapatkan bimbingan dan pelatihan			
-	Dokumen perencanaan/program/anggaran bidang korban bencana sosial	Jumlah dokumen perencanaan			
14.	JAMINAN SOSIAL KELUARGA (BANTUAN TUNAI BERSYARAT/PKH)		1.288.700.000	1.277.442.500	99.13
-	Laporan Evaluasi/Monitoring/publikasi bidang PKH	Jumlah Laporan Evaluasi/Monitoring/ publikasi bidang PKH			
15.	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT)/TP		960.664.000	958.014.000	99.72
-	Rumah warga KAT	Tersedianya permukiman dan infrastruktur			
-	Warga KAT yang mendapat bantuan jaminan hidup	Jumlah warga KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
-	Warga KAT yg mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikat lahan	Jumlah Warga KAT yg mendapat bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras dan sertifikat lahan			
-	Infrastruktur di lingkungan Warga KAT	Jumlah infrastruktur di lingkungan Warga KAT			
-	Laporan keuangan/kinerja/monitoring/evaluasi/publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT	Jumlah Laporan keuangan/kinerja/monitoring/evaluasi/ publikasi/sosialisasi serta kegiatan pendukung pelaksanaan pemberdayaan KAT			

16.	PENYULUHAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL		200.000.000	200.000.000	100
-	Penyuluh sosial masyarakat yang mendapatkan bimbingan dan palatihan	Jumlah penyuluh sosial masyarakat yang terlatih			

4.6.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2020, sumber penganggaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari dua sumber yakni APBD dan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan), dengan rincian sebagai berikut:

- **APBD,**

Pagu Anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 24.318.123.319,- (*dua puluh empat milyar tiga ratus delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah*) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 17.764.186.144,19,- (*tujuh belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah*), realisasinya Rp. 16.277.846.466,- (*enam belas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*) atau 91,63 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.553.937.175,- (*enam milyar lima ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) realisasinya Rp. 6.317.416.949,- (*enam milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus enam belas ribu Sembilan ratus empat puluh Sembilan rupiah*) atau 96,39%.

- **APBN**

Alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 7.234.444.000,- (*tujuh milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah*), realisasinya Rp. 6.958.309.650,- (*enam milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah*) atau 96,18% sedangkan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 960.664.000,- (*Sembilan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah*), realisasinya Rp. 958.014.000,- (*Sembilan ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah*) atau 99,72%.

4.6.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berjumlah 180 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian pada tabel berikut :

**Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat / Golongan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

NO	Perangkat Daerah PD	Pangkat /																Jumlah
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	
1	2	3																4
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	1	-	5	10	17	11	20	8	6	1	33	4	-	1	-	-	117
2	UPT Panti Sosial Anak	-	-	-	2	4	1	7	4	-	-	-	1	-	-	-	-	19
3	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	1	2	3	-	3	-	3	1	9	2	-	2	-	-	25
4	UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago	-	-	-	-	2	3	2	1	6	3	2	-	-	-	-	-	19
Tota																		180

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki panti rehabilitasi penyandang disabilitas.
2. UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial provinsi Sulawesi Tengah belum mengalokasikan untuk pelayanan dan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Bidang Pendidikan

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Peningkatan Kemampuan Teknis Kelembagaan
- Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Mebeleur
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur

5. Program Fasilitasi Tugas Pembantuan Kependidikan

- Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus
- Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Pendidikan Khusus
- Pelayanan administrasi dan pemeliharaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus
- Peningkatan Sarana dan prasarana Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus
- Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa pada tugas pembantuan
- Pengelolaan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Peningkatan Bahan Ajar Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus
- Pendidikan Non Formal Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Khusus
- Pendidikan Non Formal Penuntasan Buta Aksara

6. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

- Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa PLB
- Pengembangan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik PK-PLK
- Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Khusus (PLB)

- Pengembangan dan Pembinaan Mutu PK-PLK
- Pengembangan dan Peningkatan Mutu Manajemen SKO

7. Program Pendidikan Menengah Atas

- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA
- Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sekolah SMA
- Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA
- Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMA
- Pengembangan dan Pembinaan SMA
- Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Atas
- DAK Fisik SMA

8. Program Pendidikan Menengah Kejuruan

- Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri (DUDI)
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMK
- Pelayanan Administrasi dan Pemeliharaan Sekolah SMK
- Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK
- Peningkatan Sarana Pembelajaran TIK dan Laboratorium SMK
- Pengembangan dan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
- Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan
- DAK REGULER SMK

9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMA
- Peningkatan Kualifikasi PTK DIKMEN SMA
- Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK DIKMEN SMK
- Peningkatan Kualifikasi PTK DIKMEN Kejuruan
- Peningkatan dan Pengembangan Mutu PTK
- Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PTK
- Pengelolaan Manajemen Tunjangan Sertifikasi Guru

10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Pengkajian dan Pengembangan Inovasi dan Sistem Kerjasama Terpadu Pendidikan
- Rapat Koordinasi Pendidikan Se Sulawesi Tengah
- Pembinaan dan Penilaian Sekolah Sehat
- Pembinaan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan
- Pengembangan Manajemen pengelolaan satuan pendidikan menengah

- Pengembangan Perencanaan dan sosialisasi Program Pendidikan serta Kerjasama lintas sektor/Lembaga

11. Program Kebudayaan

- Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan Purbakala dan Permuseuman
- Pengembangan Sejarah dan Nilai Budaya
- Pembinaan Kepercayaan kepada TYME dan Tradisi
- Pembinaan Kesenian
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

B. Bidang Kesehatan

1. Program Surveilans APBD

- Pertemuan Reviu Surveilans
- Pengembangan Sumbermas di Kabupaten Banggai Laut dan Donggala
- Konsultasi Kegiatan Program ke Jakarta dan daerah Lainnya
- Pemantauan Surveilans Kesehatan Haji di Embarkasi Balikpapan
- Penyelidikan Epidemiologi/ Verifikasi Rumor KLB
- Pemantauan SKDR di Kab/Kota
- Rapat Tim Terpadu Surveilans Epidemiologi
- Dukungan Manajemen Surveilans

2. Program Surveilans APBN

- Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB di Kab/Kota Surveilans PD3I
- Layanan Respon KLB dan Wabah
- Layanan Kekarantinaan Kesehatan

C. Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Sumber Daya Air

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

- penyediaan jasa pelayanan perkantoran

2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- pengadaan sarana dan prasarana aparatur
- pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

3. program peningkatan disiplin aparatur

- peningkatan administrasi kepegawaian

4. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- penyusunan laporan keuangan
 - sistem pengembangan informasi infrastuktur penyusunan pelaporan asset daerah
 - monitoring dan evaluasi
5. program peningkatan kualitas perencanaan
- sinkronisasi program ke PUan
6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
- pengembangan dan rehabilitasi irigasi dan rawa
 - perencanaan pembangunan jaringan irigasi
 - pemberdayaan petugas OP irigasi dan rawa
 - pengembangan irigasi partisipatif terpadu (IPDMIP)
7. program penyediaan dan pengelolaan air baku
- pengelolaan air baku
8. program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- perencanaan teknik sungai, pantai, danau, dan air baku
- 9 program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- kegiatan perencanaan pengembangan prasarana dan sarana air minum dan air limbah
 - kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum
 - kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah
 - monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. program pengendalian banjir dan pengaman pantai
- pengelolaan sumber daya air wilayah sungai
 - pengelolaan dan pengendalian sungai, pantai, danau
11. program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- perencanaan pengembangan infrastruktur
 - pembangunan / peningkatan infrastruktur bangunan gedung
12. program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
- kegiatan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong

D. Bidang Pekerjaan Umum Perumahan

1. Rehabilitasi Rumah
2. Pembangunan kembali
3. penyediaan rumah (relokasi)

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Pemeliharaan Kam-trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Monitoring dan Evaluasi penyele-nggaraan tibum-tranmas
 - Pembinaan Kam-trantibmas

2. Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah
 - Penegakan Per-aturan Daerah
 - Peningkatan Hubungan Kerjasama
3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Kesiapsiagaan Satlinmas dan Potensi Masyarakat dam meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Monitoring dan Evaluasi Potensi Masyarakat
4. Pembinaan Masyarakat
 - Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat
5. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
 - Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran
 - Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

F. Bidang Sosial

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
 - Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perdesaan
 - Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perkotaan
 - Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pesisir dan Pulau - Pulau
2. Program Peberdayaan Sosial
 - Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku – Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kejuangan serta Kesetiakawanan Sosial
 - Pemberdayaan Sosial Peranan Keluarga
3. Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
 - Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat
 - Pemberdayaan Organisasi Sosial
 - Pemberdayaan Karang Taruna
 - Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Penanganan Masalah – masalah Strategi Yang Menyangkut Cepat Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
- Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial Keluarga

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar
- Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar
- Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Perdagangan Orang

6. Program Penyuluhan Sosial

- Penyuluhan Sosial
- Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial

7. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

- Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan
- Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

8. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

- Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat

9. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

- Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

BAB V

PENUTUP

Secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 mengalami peningkatan capaian yang signifikan sehingga mampu memberi kontribusi bagi upaya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah provinsi Sulawesi Tengah. Pada hakekatnya program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis untuk tahun 2020 ini yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Peningkatan kinerja tersebut adalah berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yang diharapkan akan memberikan tambahan penguatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun demikian masih dibutuhkan kerja keras, semangat, kemampuan dan dukungan moral yang kuat bagi pembangunan di daerah ini, mudah-mudahan kinerja yang dicapai pada tahun 2020 ini dapat lebih meningkat pada tahun-tahun mendatang dan segala kekurangan yang ada dapat kita jadikan koreksi bagi peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah serta Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang kita capai pada tahun 2020 menjadi kebanggaan kita bersama dan perlu disyukuri. Oleh karena itu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama segenap pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh lapisan masyarakat atas terciptanya sinergitas dan hubungan harmonis yang terbangun selama ini

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Taufiq dan Hidayah-Nya serta melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua.